



PUTUSAN

No. 229 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TJULANG STEFANUS YAWOGA ;**
Tempat lahir : Tiongkok ;
Umur/tanggal lahir: 63 tahun / 29 Mei 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Matraman 1 / 3 Rt. 015 / 001 Kebon
Manggis, Jakarta timur dan Perumahan
Taman Alfa Indah blok A.8 / 6 Jakarta
Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Lima Jayakarta Utama bersama dengan Ir. GARNA KOMARUDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) pada Divisi Korporasi I PT.BNI (Persero) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Divisi Korporasi I PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur utama PT Lima Jayakarta Utama (LIMEC) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Pengadaan dan Perdagangan alat-alat security system yang terdiri dari SAS, CCTV, FAS dan BAS merk VICON yang diimport dari Amerika Serikat melalui Supplier CHEMCO PRIVATE LTD Singapura dan merupakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) di Indonesia serta berdomisili di Jalan Matraman 1/3 Jakarta Timur yang adalah merupakan debitur PT. BNI (Persero) Tbk dari Kantor Wilayah 12 PT BNI (Persero) yang telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 21.800.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).

1. Bahwa pada bulan Maret 2003, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) mengajukan surat permohonan Nomor : 116/LIMEC/2003 tanggal 20 Maret 2003 untuk memperoleh kredit sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Dan karena sebelumnya Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) sudah menjadi debitur dari PT BNI (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12, maka dengan menggunakan data-data yang ada pada Kantor Wilayah 12 PT. BNI (Persero) Tbk, kemudian TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA tidak lagi menyerahkan persyaratan kredit sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan prosedur kredit wholesale dan middle market buku 1 yang kemudian diproses oleh Terdakwa, yaitu :

- Legalitas usaha (perusahaan).
- Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) minimal 3 tahun.
- Telah menjadi debitur di Bank BNI atau bank lain minimal 3 tahun yang berjalan lancar.
- Susunan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan tersebut.
- Adanya Jaminan yang mencukupi dan dinilai oleh Apraisal (penilai).
- Laporan aktivitas usaha yang meliputi pemasaran, pembelian, stock,
- Rencana pengembangan usaha yang ditargetkan oleh nasabah.
- Surat keterangan domisili perusahaan.
- Tanda Pengenal diri pemohon Namun hanya menyerahkan:
1.1. Laporan Keuangan PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, berupa :

Hal. 2 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laporan keuangan audited (LKA) per 31-12-2000 yang diterbitkan oleh KAP Drs. A RODI KARTAMULYA, dengan kondisi :

- o LKA tidak ditandatangani.
- o LKA dibuat oleh auditor freelance yaitu NANA SETIAWAN (Key Person dari Appraisal PT KREASI LAKSANA).
- o Format penomorannya sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) lainnya (No.79 NS tgl 10-10-2001)

b. Laporan Keuangan audited per 31-12-2001 yang diterbitkan oleh KAP Drs. ARMANDIAS dan LKA per 31-12-2003 yang diterbitkan oleh KAP THALIB DAENG MATEMU dengan kondisi.

- o Format penomeran sama yakni dengan menggunakan kode "NS" meskipun KAPnya berbeda (seperti No.26 NS tanggal 18- 04-2002 dan No.74 NS tgl 28-06-2004) kode NS merupakan singkatan dari nama petugas pemasaran "NANA SETIAWAN".

Kedua Laporan Keuangan Audit tersebut dibuat oleh auditor freelance yaitu Sdr. NANA SETIAWAN (Key person dari Appraisal PT KREASILAKSANA).

c. Data Laporan Keuangan Audited per 31-12-2002 yang diterbitkan oleh KAP Drs. SALMON M.M. terdapat peningkatan asset yang signifikan sebesar Rp 42.970 000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa tanah seluas 245.545 M2 di Desa Banyuasih Cigeulis Pandeglang dengan menggunakan NJOP Rp 243.000 M3, padahal NJOP yang sebenarnya adalah Rp 2.450 per M2.

12. Pengalaman usaha PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan kondisi : SPK yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja PT. WIDYA WAHANA dan PT. PANCA TATA TRIKA (kedua perusahaan tersebut sebenarnya tidak ada, nomor telepon yang dicantumkan dalam Kop surat PT. WIDYA WAHANA dan PT. PANCA TATA TRIKA adalah nomor telepon Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA (Dirut PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA). Format tulisan dan gaya bahasa pada surat pemesan pengadaan barang dari kedua perusahaan tersebut kepada debitur adalah sama, demikian pula dengan surat penawaran harga yang dibuat oleh PT. Lima Jayakarta utama yang ditujukan kepada PT. Panca Tata Trika dengan No.680/Limec/XI/2003 tanggal 19 November 2003 yang ditandatangani oleh Debitur menggunakan stempel perusahaan PT. Panca Tata Trika.

Hal. 3 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Panca Tata Trika HENDRA KUSWADI adalah pegawai PT. Lima Jayakarta Utama (Direktur Teknik) sedangkan Direktur Utama PT. Widya Wahana KIMUNG adalah karyawan marketing PT. Lima Jayakarta Utama. Demikian juga, SPK tersebut tidak dilampirkan dokumen yang menunjukkan siapa pemesan barang dari masing-masing perusahaan tersebut, juga tidak ditemukan adanya PT. Lima Jayakarta Utama yang memesan alat CCTV kepada CHEMCO PRIVATE LTD di Singapura dan bukti pembayarannya.

1.3. Jaminan berupa tanah dan bangunan.

- a. Sebidang tanah seluas 613 M2 Jakarta Timur dengan SHGB No.252 tanggal 22 Oktober 1998 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA, TJULANG S YAWOGA, WAWA LENI YAWOGA dan DAVID YAWOGA jatuh tempo tanggal 2 Oktober 2018 telah diikat hak Tanggungan sebesar Rp 2.165.000.000,00.
- b. Sebidang tanah seluas 1.017 M2 berlokasi di Jalan Lenteng Agung Gang Mawar Rt.05/02 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan SHM No.241 tanggal 16 Mei 1978 atas nama TJULANG STEFANUS YAWOGA telah diikat hak tanggungan sebesar Rp 1.235.000.000,00.
- c. Tanah seluas 90.000 M2 terletak di kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntulanak Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan perincian :
 - SHM No.978 tanggal 21 Desember 2000 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.979 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.984 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.985 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 4 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.986 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 10.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- d. Tanah seluas 284.505 M2 terletak di sebelah utara kawasan Golf Resort Mega Cemara Blok Kelapa Koneng Desa Banyuasin Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan perincian :
 - SHM No. 96 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.680 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.386.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.97 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.700 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.388.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No. 98 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.940 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.417.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No. 99 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.220 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.330.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No. 100 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.175 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.324.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.101 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.910 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.414.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No. 102 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.425.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.103 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 19.930 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.416.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.104 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.560 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.250.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.105 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.230 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.210.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 5 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.110 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.111 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.114 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 19.580 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 1.767.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.115 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 17.870 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.116 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 18.750 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Jaminan stock barang dan tagihan yang dijaminakan dalam akte fiducia.

- a. Piutang termin proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari BNI yang diikat secara fiducia.
- b. Persediaan barang berupa peralatan dan perlengkapan CCTV, SAS dan FAS yang terletak di Jalan Matraman I No.3 Jakarta Timur akan diikat fiducia notaris menjadi senilai Rp 10.044.000.000,00
- c. Pengurus/pemegang saham atas nama TJULANG S. YAWOGA DIKAT Borgtoch.
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Jeep Harier tahun 2000 atas nama JONNY HERMAN No.Pol B 8493 BG.

Bahwa setelah Terdakwa mengajukan dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat untuk pengajuan kredit tersebut, seharusnya sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) yang ada di Bank BNI yaitu ketentuan dalam Buku Pedoman Kebijakan dan prosedur kredit wholesale dan middle market buku 1 GARNAR KOMARUDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) terlebih dahulu harus melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran laporan keuangan, melakukan verifikasi terhadap kantor akuntan publik dan appraisal yang membuat laporan Keuangan, melakukan kunjungan kepada calon debitur atau pihak ketiga dalam rangka konfirmasi atas syarat-syarat kredit yang diajukan, melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study dan melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan dan appraisal yang melakukan taksiran, melakukan penilaian jaminan namun GARNAR KOMARUDIN yang sebelumnya

Hal. 6 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengenal Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA kemudian hanya membuat laporan tertulis dalam formulir laporan Kunjungan Setempat (PAK 06). GARNA KOMARUDDIN kemudian menyampaikan data keuangan, jaminan dan aktivitas usaha lainnya (yang belum diverifikasinya) kepada Unit Analisa Resiko (ARK) untuk dianalisis lebih lanjut yang diproses oleh saksi ISTIYANI.

Unit Analisa Resiko (ARK) kemudian menyampaikan hasil analisis yang meliputi bidang aspek umum, aspek legal, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek pembelian, aspek jaminan yang disusun dalam bentuk MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang kemudian disampaikan kembali kepada GARNA KOMARUDDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) untuk dilengkapi dalam bentuk PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) secara lengkap.

Bahwa GARNA KOMARUDDIN selaku Pengelola Pemasaran Kredit (RM) bertanggung jawab untuk kelengkapan PAK secara lengkap, selanjutnya Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) lengkap tersebut disirkulasikan ke Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yaitu saksi RONNI SUHARDONO sebagai pemimpin kelompok pemasaran bisnis yang kemudian melakukan penelitian atas hasil analisis yang dibuat oleh Unit Analisa Resiko (UAR) maupun oleh RM yang hasilnya dibuat dalam bentuk pendapat dalam disposisi secara tertulis yang mengusulkan PAK yang telah disusun oleh GARNA KOMARUDDIN dengan suatu pernyataan bahwa dirinya telah melakukan verifikasi atas permohonan nasabah tersebut. PAK tersebut kemudian disirkulasikan oleh Perjanjian Analisa Kredit yang kemudian mengajukan permohonan kredit tersebut PAK tersebut kemudian disirkulasikan kepada saksi PRAMONO selaku Pemimpin Divisi korporasi yang kemudian mempelajari pendapat atau rekomendasi masing-masing anggota KPK lain. Saksi Pramono selaku Pemimpin Divisi Korporasi kemudian memutuskan pengajuan kredit tersebut sesuai dengan keterangan CPC No.70. Kredit tersebut kemudian disetujui oleh Pramono selaku pemimpin Divisi Korporasi sebesar Rp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPI/2/047 tanggal 28 Mei 2003 dan Perjanjian Kredit No.2003/KPI/30 tanggal 11 Juni 2003, dengan fasilitas:

- KMK Permanen Maksimum Rp 26.000.000.000,00 including fasilitas KMK Permanen Rp 18.000.000.000,00
- KMK Sementara Rp 1.800.000.000,00 untuk keperluan tambahan modal kerja operasional perusahaan pembelian stock, pemeliharaan CCTV, SAS, FAS dan KMK transaksional maksimum Rp 39.000.000.000,00 untuk keperluan tambahan modal kerja pengadaan CCTV, SAS, FAS, dan lain-lain.

Hal. 7 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPI/2/047 tanggal 28 Mei 2003, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA, masih mempunyai kredit pada Bank BNI yang belum selesai (membayar angsuran kredit), namun Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA dengan Surat Permohonan No.0181/LIMEC/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk Divisi Korporasi Up Bp Drs. PRAMONO kembali mengajukan permohonan pengajuan tambahan kredit modal kerja permanen dan transaksional dengan jumlah Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Dan GARNA KOMARUDDIN kemudian tetap memproses permohonan pengajuan tambahan kredit modal kerja permanen dan transaksional dari Terdakwa tersebut. Atas permohonan tambahan kredit kedua tersebut GARNA KOMARUDDIN kemudian memproses dengan cara yang sama sebagaimana kredit pertama, dengan menggunakan jaminan yang sebelumnya telah dijaminkan pada saat kredit pertama oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, jaminan tersebut berupa :

Jaminan berupa tanah dan bangunan.

- a. Sebidang tanah seluas 613 M2 Jakarta Timur dengan SHGB No.252 tanggal 22 Oktober 1998 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA, TJULANG S. YAWOGA, WAWA LENI YAWOGA dan DAVID YAWOGA jatuh tempo tanggal 2 Oktober 2018 telah diikat hak tanggungan sebesar Rp 2.165.000.000,00
- b. Sebidang tanah seluas 1.017 M2 berlokasi di Jalan Lenteng Agung Gang Mawar Rt.05/02 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan SHM No.241 tanggal 16 Mei 1978 atas nama TJULANG STEFANUS YAWOGA telah diikat hak tanggungan sebesar Rp 1.235.000.000,00
- c. Tanah seluas 90.000 M2 terletak di kawasan Resort Tanjung Lesung, Blok Kuntulanak, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan perincian:
 - SHM No.978 tanggal 21 Desember 2000 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No. 979 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai

Hal. 8 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

- SHM No. 984 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 985 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 986 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 10.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

d. Tanah seluas 284.505 M2 terletak di sebelah utara kawasan Golf Resort Mega Cemara Blok Kelapa Koneng Desa Banyuasin, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan perincian :

- SHM No. 96 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.680 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.386.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT Lima Jayakarta utama.
- SHM No. 97 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.700 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.388.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 98 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.940 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.417.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 99 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.220 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.330.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 100 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.175 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.324.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.101 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.910 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.414.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 9 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 102 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.425.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 103 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 19.930 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.416.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.104 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.560 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.250.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.105 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.230 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 2.210.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.110 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.111 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.114 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 19.580 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 1.767.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.115 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 17.870 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.116 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 18.750 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp 3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Jaminan stock barang dan tagihan yang dijaminakan dalam akte fiducia.

- a. Piutang termin proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari BNI yang diikat secara fiducia.
- b. Persediaan barang berupa peralatan dan perlengkapan CCTV, SAS dan FAS yang terletak di Jalan Matraman I No.3 Jakarta Timur akan diikat fiducia notariil menjadi senilai Rp 10.044.000.000,00.
- c. Pengurus/pemegang saham atas nama TJULANG S. YAWOGA DIKAT Borgtoch.

Hal. 10 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Jeep Harier tahun 2000 atas nama JONNY HERMAN No.Pol B 8493 BG.

Bahwa permohonan kredit dengan menggunakan jaminan terdahulu tanpa adanya tambahan jaminan tersebut, oleh GARNA KOMARUDDIN tetap diproses dengan mendasarkan hasil proses sebelumnya, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran laporan keuangan, tanpa melakukan verifikasi terhadap kantor akuntan publik dan appraisal yang membuat laporan keuangan, tanpa melakukan kunjungan kepada calon debitur atau pihak ketiga dalam rangka konfirmasi atas syarat- syarat kredit yang diajukan, tanpa melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study dan melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan dan appraisal yang melakukan taksiran tanpa melakukan penilaian jaminan. Terdakwa kemudian membuat laporan tertulis dalam formulir laporan Kunjungan Setempat (PAK 06). Dalam analisisnya, GARNA KOMARUDDIN juga tidak mengemukakan jaminan yang pernah diajukan dalam kredit terdahulu tanpa adanya tambahan jaminan. GARNA KOMARUDDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) yang memproses permohonan kredit Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA, sewaktu melakukan verifikasi terhadap persyaratan kredit yang diajukan Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA, hanya mendasarkan hasil proses sebelumnya, namun GARNA KOMARUDDIN menyampaikan hasil proses verifikasi/pemeriksaan tersebut, seolah-olah sudah sesuai dengan ketentuan dalam proses kredit kepada PRAMONO Pimpinan Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk, sehingga atas laporan dari GARNA KOMARUDDIN tersebut PRAMONO Pimpinan Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk menyetujui dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPS/2/016/R tanggal 10 Februari 2004 yang ditujukan kepada PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA Up Bpk TJULANG STEFANUS YAWOGA, dengan perjanjian kredit No.2004/KPS/06/KMK tanggal 11 Februari 2004, dengan fasilitas yang diberikan berupa :

- a. Tambahan plafon KMK Permanen maksimum Rp19.500.000.000,00 di luar fasilitas KMK Permanen yang berjalan Rp26.000.000.000,00 Keperluan tambahan modal kerja pengadaan dan pemeliharaan peralatan security system.
- b. Pemberian tambahan KMK Transaksional Maksimum Rp29.000.000.000, fasilitas KMK Transaksional yang berjalan sebesar Rp39.000.000.000,00 keperluan tambahan modal kerja perdagangan/pemasangan peralatan security system.

Hal. 11 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan Juni 2004 sewaktu kredit tambahan pertama dan kredit tambahan kedua belum diselesaikan pembayarannya oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA kembali mengajukan kredit kepada Pramono selaku Divisi Korporasi I PT BNI (Persero) Tbk dengan Surat Permohonan No.0112/LIMEC/IV/2004 tanggal 15 April 2004 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk Divisi Korporasi, sedangkan dalam Permohonan Tambahan Kredit ketiga tersebut tetap menggunakan jaminan yang sama sebagaimana pada pengajuan tambahan kredit pertama dan kedua. GARNA KOMARUDDIN kembali memproses permohonan pengajuan kredit dari Terdakwa tersebut sebagaimana memproses permohonan pengajuan kredit tambahan pertama dan tambahan kedua. Dan oleh karena jumlah kredit yang diajukan adalah kredit modal kerja dari Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA telah melampaui jumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), maka diajukan kepada Direktur Korporasi, atas permohonan kredit tersebut, kemudian disetujui oleh Direktur Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPS/2/079/R tanggal 16 Juni 2004 yang ditujukan kepada PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA Up Bpk TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan fasilitas yang diberikan berupa : Tambahan plafon KMK Transaksional maksimum Rp32.800.000.000,00 di luar fasilitas KMK Transaksional yang berjalan Rp68.000.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan Tambahan Modal Kerja Perdagangan/Pemasangan Peralatan security system.
4. Pada bulan Februari 2005 sewaktu kredit tambahan pertama, kedua dan ketiga belum diselesaikan pembayarannya Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA mengajukan permohonan kembali kepada PRAMONO selaku Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk dengan Surat Permohonan No.VIII/LIMEC/IV/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk Divisi Korporasi dan Permohonan Tambahan Kredit KMK sementara tersebut dengan menggunakan jaminan yang sama sebagaimana pada pengajuan tambahan kredit pertama, kedua dan ketiga yang kemudian kembali diproses oleh GARNA KOMARUDDIN sebagaimana memproses permohonan pengajuan kredit tambahan pertama, kedua dan ketiga, dan karena kredit yang

Hal. 12 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah tambahan sementara dengan jumlah permohonan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang merupakan kewenangan dari Pemimpin Divisi Korporasi), kemudian diajukan kepada Pimpinan Divisi Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No. KPS/2/079/R tanggal 16 Februari 2005 yang ditujukan kepada PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA Up Bpk TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan fasilitas yang diberikan berupa : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa setelah disetujuinya kredit-kredit tersebut, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA melakukan pencairan dengan cara mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berasal dari PT. Widya Wahana dan PT. Panca Tata Trika yaitu :

4.1. Berdasarkan Surat No.576/LIMEC/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp9.303.498.750,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- a. SPK No.544/WW/XI/2004 tanggal 22 November 2004 senilai Rp3.578.500.000,00 Jatuh tempo tanggal 21 Mei 2005.
- b. SPK No.547/WW/XI/2004 tanggal 24 November 2004 senilai Rp3.910.250.000,00 Jatuh tempo tanggal 23 Mei 2005.
- c. SPK No.552/WW/XI/2004 tanggal 26 November 2004 senilai Rp2.986.210.000,00 Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2005.
- d. SPK No.556/WW/XI/2004 tanggal 30 November 2004 senilai Rp3.388.115.000,00 Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2005.

4.2. Berdasarkan Surat No.625/LIMEC/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp7.889.050.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- SPK No.560/WW/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 senilai Rp3.721.560.000,00 Jatuh tempo tanggal 1 Juni 2005.
- SPK No.564/WW/XI/2004 tanggal 6 Desember 2004 senilai Rp2.149.980.030,00 Jatuh tempo tanggal 5 Juni 2005.
- SPK No.566/WW/XI/2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp2.514.787.000,00 Jatuh tempo tanggal 6 Juni 2005.

Hal. 13 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK No.570M/W/XI/2004 tanggal 9 Desember 2004 senilai Rp3.751.555.000,00 Jatuh tempo tanggal 8 Juni 2005.
- 4.3. Surat No.631/LIMEC/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp3.731.499.850,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK):
 - SPK No.5824/WW/XII/2004 senilai Rp2.956.321.000,00 Jatuh tempo tanggal 14 Juni 2005.
 - SPK No.587/WW/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 senilai Rp5.740.769.000,00 Jatuh tempo tanggal 19 Juni 2005.
- 4.4. Surat No.632/LIMEC/XII/2004 tanggal 22 Desember 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp5.971.999.800,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan melampirkan 3 (tiga) Surat Perintah Kerja (SPK):
 - SPK No.592/WW/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 senilai Rp1.357.060.000,00 Jatuh tempo tanggal 19 Juni 2005.
 - SPK No.595/WW/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004 senilai Rp3.578.432.000,00 Jatuh tempo tanggal 20 Juni 2005.
 - SPK No.596/WW/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp4.252.200.000,00 Jatuh tempo tanggal 21 Juni 2005.
 - SPK No.556/WW/XI/2004 tanggal 30 November 2004 senilai Rp3.388.115.000,00 Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2005.
- 4.5. Surat No.003/LIMEC/I/2005 tanggal 3 Januari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp8.678.013.500,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK):
 - SPK No.598/WW/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 senilai Rp4.362.100.000,00 Jatuh tempo tanggal 22 Juni 2005.
 - SPK No.602/WW/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 senilai Rp2.288.560.000,00 Jatuh tempo tanggal 23 Juni 2005.
 - SPK No.608/WW/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 senilai Rp3.246.550.000,00 Jatuh tempo tanggal 27 Juni 2005.
 - SPK No.612/WW/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 senilai Rp2.023.740.000,00 Jatuh tempo tanggal 29 Juni 2005.

Hal. 14 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK No.614/WW/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 senilai Rp1.429.840.000,00 Jatuh tempo tanggal 29 Juni 2005.
- 4.6. Surat No.008/LIMEC/I/2005 tanggal 13 Januari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp7.508.033.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):
 - o SPK No.002 / WW / I / 2005 tanggal 4 Januari 2005 senilai Rp3.754.800.000,00 Jatuh tempo tanggal 3 Juli 2005.
 - o SPK No.004 / WW / I / 2005 tanggal 6 Januari 2005 senilai Rp2.266.310.000,00 Jatuh tempo tanggal 5 Juli 2005.
 - o SPK No.006 / WW / I / 2005 tanggal 10 Januari 2005 senilai Rp1.918.720.000,00 Jatuh tempo tanggal 9 Juli 2005.
 - o SPK No.010 / WW / I / 2005 tanggal 12 Januari 2005 senilai Rp3.610.990.000,00 Jatuh tempo tanggal 11 Juli 2005.
- 4.7. Surat No.030/LIMEC/I/2005 tanggal 25 Januari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp6.169.800.000,00 (enam miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):
 - SPK No.012/WW/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 senilai Rp2.102.560.000,00 Jatuh tempo tanggal 13 Juli 2005.
 - SPK No.015/WW/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 senilai Rp3.078.680.000,00 Jatuh tempo tanggal 17 Juli 2005.
 - SPK No.018/WW/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 senilai Rp1.702.210.000,00 Jatuh tempo tanggal 19 Juli 2005.
 - SPK No.021/WW/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 senilai Rp2.608.550.000,00 Jatuh tempo tanggal 23 Juli 2005.
- 4.8. Surat No.042/LIMEC/II/2005 tanggal 1 Februari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp5.241.431.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh satu empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK):
 - SPK No.024/WW/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 senilai Rp3.854.780.000,00 Jatuh tempo tanggal 26 Juli 2005.
 - SPK No.028/WW/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 senilai Rp4.208.960.000,00 Jatuh tempo tanggal 30 Juli 2005.
- 4.9. Surat No.050/LIMEC/II/2005 tanggal 11 Februari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp4.098.900.000,00 (empat miliar

Hal. 15 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK):

- SPK No.042/WW/I/2005 tanggal 7 Februari 2005 senilai Rp3.390.600.000,00 Jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
- SPK No.045/WW/I/2005 tanggal 8 Februari 2005 senilai Rp2.915.400.000,00 Jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2005.

4.10. Surat No.062/LIMEC/II/2005 tanggal 18 Februari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp 4.978.486.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK):

- SPK No.052/WW/II/2005 tanggal 14 Februari 2005 senilai Rp3.172.680.000,00 Jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2005.
- SPK No.056/WW/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 senilai Rp4.486.530.000,00 Jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2005.

4.11. Surat No.047/LIMEC/II/2005 tanggal 8 Februari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- SPK No.031/WW/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 senilai Rp4.198.200.000,00 Jatuh tempo tanggal 24 Mei 2005.
- SPK No.035/WW/I/2005 tanggal 2 Februari 2005 senilai Rp3.470.500.000,00 Jatuh tempo tanggal 24 Mei 2005.
- SPK No.037/WW/I/2005 tanggal 3 Februari 2005 senilai Rp4.870.100.000,00 jatuh tempo 24 Mei 2005.
- SPK No.039/WW/I/2005 tanggal 4 Februari 2005 senilai Rp2.846.800.000,00 jatuh tempo 24 Mei 2005.

4.12. Surat No.078/LIMEC/III/2005 tanggal 4 Maret 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp11.512.026.500,00 (sebelas miliar lima ratus dua belas juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan 6 (enam) Surat Perintah Kerja (SPK)

- SPK No.058/WW/II/2005 tanggal 18 Februari 2005 senilai Rp3.178.750.000,00 Jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2005.
- SPK No.061/WW/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 senilai Rp2.825.400.000,00 Jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2005.
- SPK No.065/WW/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 senilai Rp3.422.330.000,00 jatuh tempo 22 Agustus 2005.

Hal. 16 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK No.067/WW/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 senilai Rp3.680.770.000,00 jatuh tempo 24 Agustus 2005.
- SPK No.073/WW/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 senilai Rp2.776.340.000,00 jatuh tempo 27 Agustus 2005.
- SPK No.076/WW/III/2005 tanggal 2 Maret 2005 senilai Rp1.827.220.000,00 jatuh tempo 2 Maret 2005.

4.13. Surat No.101/LIMEC/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp9.278.999.600,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- Tanggal 9 September 2005.
 - SPK No.067 / WW / II / 2005 tanggal 25 Februari 2005 senilai Rp3.680.770.000,00 jatuh tempo 24 Agustus 2005.
 - SPK No.073 / WW / II / 2005 tanggal 28 Februari 2005 senilai Rp2.776.340.000,00 jatuh tempo 27 Agustus 2005.
 - SPK No.076 / WW / III / 2005 tanggal 2 Maret 2005 senilai Rp1.827.220.000,00 jatuh tempo 2 Maret 2005.
 - No.080 / WW / III / 2005 tanggal 4 Maret 2005 senilai Rp3.307.286.000,00 Jatuh tempo tanggal 3 September 2005.
5. Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja yang diajukan oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA sebagai Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA dalam pencairan atas persetujuan kreditnya tidak pernah diverifikasi oleh GARNIA KOMARUDDIN selaku Pengelola Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I Sub Bab huruf K angka 03 INDEKS IN / 0137 / PAR tanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman kebijakan dan prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I, tetapi atas SPK tersebut selalu terjadi pembayaran oleh pihak Bank BNI.

Bahwa surat perintah kerja tersebut di atas ternyata adalah fiktif, yaitu :

Bahwa sebenarnya kedua perusahaan tersebut tidak pernah ada (nomor telepon yang dicantumkan dalam Kop surat tersebut saat dihubungi tidak bisa dihubungi, dan saat melakukan konfirmasi ke Call Centre Telkom 108 : nomor telepon dan alamat PT. Widya Wahana sama dengan alamat debitur di PT. Lima Jayakarta Utama.

Format tulisan dan gaya bahasa pada surat pemesan pengadaan barang dari kedua perusahaan tersebut kepada Debitur adalah sama.

Hal. 17 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat penawaran harga yang dibuat oleh PT. Lima Jayakarta Utama yang ditujukan kepada PT. Panca Tata Trika dengan No.680/Limec/XI/2003 tanggal 19 November 2003 yang ditandatangani oleh Debitur menggunakan stempel Perusahaan PT. Panca Tata Trika.

Direktur Utama PT. Panca Tata Trika HENDRA KUSWADI diketahui adalah pegawai PT. Lima Jayakarta Utama (Direktur Teknik) sedangkan Direktur Utama PT Widya Wahana : KIMUNG, adalah karyawan marketing PT. Lima Jayakarta Utama.

Tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan siapa pemesan barang dari masing-masing perusahaan tersebut.

Tidak menemukan adanya PT. Lima Jayakarta Utama memesan alat CCTV kepada CHEMCO PRIVATE LTD di Singapura dan bukti pembayarannya.

Pada tanggal 2 Maret 2005, realisasi tambahan kredit sementara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditransfer ke rekening 168-1701406 atas nama JHONI HERMAN di BCA Pluit Jakarta yang dijelaskan sebagai rekening CHEMCO PRIVATE comfrom surat PT. Lima Jayakarta Utama No.070 / Limec / 11 / 2005 tanggal 25 Februari 2005.

Bahwa dana kredit yang diterima oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, digunakan tidak sesuai peruntukan permohonan kredit tetapi digunakan untuk :

- 5.1. Sebagaimana surat PT. Lima Jayakarta Utama selaku Debitur dengan No.012 / Limec / TSY / IV / 2006 tanggal 3 April 2006 disebutkan penggunaan KMK transaksional sebesar Rp110.800.000.000,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dan KMK rekening koran telah digunakan antara lain digunakan untuk operasional perusahaan (termasuk dalam pembayaran bunga kredit) sebesar Rp28.760.000. 000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- 5.2. Untuk keperluan pribadi sebesar Rp10.790.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 5.3. Membeli Cheque Multi Guna sebesar Rp14.627.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 5.4. Pembayaran setoran saham pada PT. Graha Lintas Property sebesar Rp19.200.000. 000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah).
- 5.5. Pelunasan pembelian tanah di Tanjung Lesung sebesar Rp60.460.000. 000,00 (enam puluh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;

Seharusnya, sesuai dengan Buku Petunjuk Pedoman Kebijakan dan Prosedur pemberian kredit, setelah kredit diperoleh Terdakwa TJULANG STEFANUS

Hal. 18 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAWOGA sebagai Debitur, GARNA KOMARUDDIN sebagai pengelola nasabah mengawasi penggunaan kredit apakah sesuai dengan peruntukannya, namun ternyata, GARNA KOMARUDDIN tidak melakukan pengawasan.

Bahwa akibat dari perbuatan GARNA KOMARUDDIN yang tidak memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA sebagaimana diatur dalam Bab I Sub Bab K sub bab 03 INDEKS IN/0137/PAR tanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I, kemudian diketahui :

- a. Bahwa jaminan tanah yang dimark up adalah jaminan tanah kosong yang terletak di Blok Cisadang dan Blok Kuntulanak Desa Tanjung Jaya serta Blok Kelapa Koneng Desa Banyu Asih Kabupaten Pandeglang Banten dan terdapat dua surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2003 dari kantor pajak Pandeglang atas obyek yang sama namun klasifikasi tarif NJOPnya berbeda sangat signifikan.
 - b. Bahwa untuk jaminan tanah di Desa Banyuasih tarif NJOPnya ada dua yaitu sebesar Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) permeter persegi dan sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) permeter persegi, dan untuk Desa Tanjung Jaya tarif NJOPnya tahun 2001 dan tahun 2002 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah).
 - c. Bahwa GARNA KOMARUDDIN dan Terdakwa mengetahui adanya dua NJOP terhadap satu obyek yang digunakan untuk jaminan dan menyatakannya dalam formulir evaluasi taksasi jaminan dan formulir Berita Acara Taksasi jaminan tertanggal 22 Desember 2003.
 - d. Adanya rekayasa perusahaan fiktif selaku partner kerja Debitur : Partner kerja Debitur fiktif dan karenanya kontrak kerja yang disampaikan juga fiktif. Surat perintah kerja dari rekanan kerja perusahaan (fiktif yang diajukan oleh PT. Lima Jayakarta Utama tidak dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang menerbitkan SPK tersebut (PT. Widia Wahana dengan PT. Panca Tata Trika) sebagai Rekanan Debitur yang ternyata fiktif. Pada tanggal 2 Maret 2005, realisasi tambahan kredit sementara sebesar Rp10.000.000.000,00 ditransfer ke rekening 168-1701406 atas nama JHONI HERMAN di BCA Pluit Jakarta yang dijelaskan sebagai rekening CHEMCO PRIVATE Conform Surat PT. Lima Jayakarta Utama No.070 / Limec / II / 2005 tanggal 25 Februari 2005.
6. Bahwa Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA setelah memperoleh kucuran kredit-kredit tersebut di atas, memberikan uang kepada Ir. GARNA KOMARUDIN atas

Hal. 19 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasamanya melancarkan pengucuran kredit untuk Terdakwa tersebut. Dan karenanya telah memperkaya GARNA KOMARUDDIN sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) yang diberikan dalam bentuk Cheque Multi Guna atau orang lain yaitu TJULANG STEFANUS YAWOGA yang menyebabkan GARNA KOMARUDDIN menjadi kaya juga telah memperkaya Terdakwa beserta korporasinya yaitu PT. Lima Jayakarta Utama sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

7. Akibat perbuatan Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA bersama-sama dengan saksi Ir. GARNA KOMARUDIN telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp133.837.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Lima Jayakarta Utama bersama dengan Ir. GARNA KOMARUDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) pada Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Divisi Korporasi I PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 20 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Maret 2003, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA mengajukan permohonan kredit sebagai Kredit Modal Kerja Permanen dan Kredit Modal Kerja Transaksional dengan Surat Nomor : 116/LIMEC/2003 tanggal 20 Maret 2003 dengan jumlah pengajuan kredit Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang merupakan kredit tambahan, karena sebelumnya TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp21.800.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12. Bahwa surat permohonan tersebut kemudian diproses oleh GARNA KOMARUDDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah, yang diangkat sebagai pegawai Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) pada Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk sesuai Surat Pimpinan Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KPI / 1 / 049 / Rahasia Tanggal 08 Januari 2002 yang telah diubah dengan Surat Nomor : KPS / 1 / 081 / Rahasia tanggal 08 Januari 2004, yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Pemasaran Bisnis (Segment Wholesale market) sesuai dengan Bab I Sub Bab K Sub bab 03 INDEKS IN / 0137 / PAR tanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I yaitu :
 - a. Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lain dari Debitur/calon Debitur, dengan wewenang dapat memberikan informasi kepada Debitur/calon Debitur bahwa Pengelola Pemasaran Bisnis yang bersangkutan bertanggung jawab atas hubungan antara Debitur dengan Bank BNI.
 - b. Memberitahu Pemimpin Kelompok Pengelolaan dokumen & Administrasi untuk segmen Wholesale tentang pemrosesan permohonan kredit, dengan wewenang meneruskan permohonan kredit Debitur/calon Debitur ke Unit Pengendalian Risiko Kredit dan dapat memberikan rekomendasi/ mengusulkan kepada atasannya langsung agar permohonan kredit tidak perlu diproses dengan PAK lengkap, misalnya karena Debitur/calon Debitur yang bersangkutan merupakan debitur kredit macet dan/atau jenis usahanya termasuk yang dilarang untuk dibiayai Bank BNI.
 - c. Menge-check apakah pemohon kredit merupakan Debitur kredit macet di Bank BNI, dan/atau Bank/Lembaga Pembiayaan lain, dan membuat surat penolakan kredit apabila yang bersangkutan termasuk debitur macet dengan wewenang dapat memberitahukan kepada Debitur/calon Debitur

Hal. 21 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan (sebelum SKK dibuat) tentang penolakan permohonan kredit setelah penolakan tersebut disetujui.

- d. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi Debitur/calon Debitur/pihak ketiga berkaitan dengan langkah awal dalam proses pemberian kredit melalui :
 1. Bank Indonesia.
 2. Bank lain/lembaga pembiayaan lain.
 3. Pemasok, pembeli/langganan, dll.
 - e. Menetapkan barang jaminan, jumlah dan obyek pengikatannya, serta syarat-syarat kredit bersama dengan atasannya langsung.
 - f. Menetapkan jumlah dan obyek penutupan asuransi barang - barang jaminan/kredit.
 - g. Menelaah PAK bersama-sama atasannya langsung.
 - h. Membina/membimbing/memberikan petunjuk kepada Analis Pemasaran dalam pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab penuh atas ketertiban dan terlaksananya pembuatan PAK.
 - i. Membuat dan menginformasikan serta mengup-date laporan bulanan untuk atasannya langsung mengenai pelaksanaan kredit review untuk kemudian diteruskan kepada Unit Pengelolaan Dokumen & Administrasi untuk Segmen Wholesale.
2. Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat bagi pengajuan kredit tersebut, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT LIMA JAYAKARTA UTAMA mengajukan surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit secara umum berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan prosedur kredit wholesale dan middle market buku 1 yang kemudian juga diproses oleh GARNA KOMARUDDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), yaitu :
- i. Legalitas usaha (perusahaan).
 - ii. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - iii. Laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) minimal 3 tahun.
 - iv. Telah menjadi Debitur di di Bank BNI atau bank lain minimal 3 tahun yang berjalan lancar.
 - v. Susunan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan tersebut.
 - vi. Adanya Jaminan yang mencukupi dan dinilai oleh Apraisal (penilai).

Hal. 22 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. Laporan aktivitas usaha yang meliputi pemasaran, pembelian, stock,
- viii. Rencana pengembangan usaha yang ditargetkan oleh Nasabah.
- ix. Surat keterangan domisili perusahaan
- x. Tanda Pengenal diri pemohon.

Dan karena Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA adalah debitur PT. BNI (Persero) Tbk yang masih menjadi Debitur untuk kredit yang sebelumnya diterimanya dari Kantor Wilayah 12 PT. BNI (Persero) Tbk, dengan data-data yang sebelumnya sudah berada pada Kantor Wilayah 12 PT. BNI (Persero) Tbk, maka kemudian Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA hanya menyerahkan :

2.1. Laporan Keuangan PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, berupa :

- a. Laporan keuangan audited (LKA) per 31-12-2000 yang diterbitkan oleh KAP Drs. A RODI KARTAMULYA, dengan kondisi :
 - o LKA tidak ditandatangani.
 - o LKA dibuat oleh auditor freelance yaitu NANA SETIAWAN (Key Person dari Appraisal PT. KREASILAKSANA).
 - o Format penomorannya sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) lainnya (No.79 NS tgl 10-10-2001)
- b. Laporan keuangan audited per 31-12-2001 yang diterbitkan oleh KAP Drs. ARMANDIAS dan LKA per 31-12-2003 yang diterbitkan oleh KAP THALIB DAENG MATEMU dengan kondisi:
 - o Format penomeran sama yakni dengan menggunakan kode "NS" meskipun KAPnya berbeda (seperti No.26 NS tgl 18-04-2002 dan No.74 NS tgl 28-06-2004) kode NS merupakan singkatan dari nama petugas pemasaran "NANA SETIAWAN".Kedua LKA tersebut dibuat oleh auditor freelance yaitu Sdr NANA SETIAWAN (Key person dari Appraisal PT. KREASI LAKSANA).
- c. Data Laporan Keuangan Audited per 31-12-2002 yang diterbitkan oleh KAP Drs. SALMON M.M. terdapat peningkatan asset yang signifikan sebesar Rp42.970 juta berupa tanah seluas 245.545 M2 di Desa Banyuasih Cigeulis Pandeglang dengan menggunakan NJOP Rp243.000 M3, padahal NJOP yang sebenarnya adalah Rp2.450 per M2.

2.2. Pengalaman usaha PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, berupa adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan kondisi : SPK yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja PT. WIDYA WAHANA dan PT. PANCA TATA TRIKA (kedua

Hal. 23 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut sebenarnya tidak ada, nomor telepon yang dicantumkan dalam Kop surat PT. WIDYA WAHANA dan PT. PANCA TATA TRIKA adalah nomor telepon Debitur yaitu TJULANG STEFANUS YAWOGA (Dirut PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA). Format tulisan dan gaya bahasa pada surat pemesan pengadaan barang dari kedua perusahaan tersebut kepada Debitur adalah sama, demikian juga dengan Surat penawaran harga yang dibuat oleh PT. Lima Jayakarta Utama yang ditujukan kepada PT. Panca Tata Trika dengan No.680 / Limec / XI / 2003 tanggal 19 November 2003 yang ditandatangani oleh Debitur menggunakan stempel perusahaan PT. Panca Tata Trika. Direktur Utama PT. Panca Tata Trika HENDDDRA KUSWADI adalah pegawai PT. Lima Jayakarta Utama (Direktur Tekhnik) sedangkan Direktur Utama PT. Widya Wahana KIMUNG adalah karyawan marketing PT. Lima Jayakarta Utama. Demikian pula, atas SPK tersebut tidak dilampirkan dokumen yang menunjukkan siapa pemesan barang dari masing-masing perusahaan tersebut, juga tidak ditemukan adanya PT. Lima Jayakarta Utama yang memesan alat CCTV kepada CHEMCO PRIVATE LTD di Singapura dan bukti pembayarannya.

2.3. Jaminan berupa tanah dan bangunan.

- a. Sebidang tanah seluas 613 M2 Jakarta Timur dengan SHGB No.252 tanggal 22 Oktober 1998 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA, TJULANG S YAWOGA, WAWA LENI YAWOGA dan DAVID YAWOGA jatuh tempo tanggal 2 Oktober 2018 telah diikat hak tanggungan sebesar Rp2.165.000.000,00
- b. Sebidang tanah seluas 1.017 M2 berlokasi di Jalan Lenteng Agung Gang Mawar Rt.05/02 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan SHM No.241 tanggal 16 Mei 1978 atas nama TJULANG STEFANUS YAWOGA telah diikat hak tanggungan sebesar Rp1.235.000.000,00
- c. Tanah seluas 90.000 M2 terletak di kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntulanak, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan perincian :
 - SHM No.978 tanggal 21 Desember 2000 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 24 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.979 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.984 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.985 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.986 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 10.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- d. Tanah seluas 284.505 M2 terletak di sebelah utara kawasan Golf Resort Mega Cemara Blok Kelapa Koneng, Desa Banyuasin, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan perincian :
 - SHM No.96 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.680 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.386.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta utama.
 - SHM No.97 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.700 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.388.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.98 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.940 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.417.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No.99 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.220 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.330.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
 - SHM No. 100 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.175 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.324.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 25 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.101 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.910 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.414.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.102 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.425.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.103 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 19.930 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.416.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.104 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.560 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.250.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.105 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.230 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.210.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.110 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.111 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.114 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 19.580 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp1.767.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.115 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 17.870 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.116 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 18.750 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

2.4. Jaminan stock barang dan tagihan yang dijaminakan dalam akte fiducia.

- a. Piutang termin proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari BNI yang diikat secara fiducia.
- b. Persediaan barang berupa peralatan dan perlengkapan CCTV, SAS dan FAS yang terletak di Jalan Matraman I No.3 Jakarta Timur akan diikat fiducia notaril menjadi senilai Rp10.044.000.000,00

Hal. 26 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengurus/pemegang saham atas nama TJULANG SYAWOGA DIKAT Borgtoch.
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Jeep Harier tahun 2000 atas nama JONNY HERMAN No.Pol B 8493 BG.

Bahwa dari dokumen persyaratan tersebut, GARNA KOMARUDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran laporan keuangan, tanpa melakukan verifikasi terhadap kantor akuntan publik dan appraisal yang membuat laporan keuangan, tanpa melakukan kunjungan kepada calon debitur atau pihak ketiga dalam rangka konfirmasi atas syarat-syarat kredit yang diajukan, tanpa melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study dan melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan dan appraisal yang melakukan taksiran tanpa melakukan penilaian jaminan. Kemudian GARNA KOMARUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara membuat laporan tertulis dalam formulir laporan Kunjungan Setempat (PAK 06). GARNA KOMARUDDIN kemudian menyampaikan data keuangan, jaminan dan aktivitas usaha lainnya (yang belum diverifikasinya) kepada Unit Analisa Resiko (ARK) untuk dianalisis lebih lanjut yang diproses oleh saksi ISTIYANI.

Unit Analisa Resiko (ARK) kemudian menyampaikan hasil analisis yang meliputi bidang aspek umum, aspek legal, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek pembelian, aspek jaminan yang disusun dalam bentuk MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang kemudian disampaikan kembali kepada GARNA KOMARUDDIN selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) untuk dilengkapi dalam bentuk PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) secara lengkap.

Bahwa GARNA KOMARUDDIN selaku RM bertanggung jawab untuk kelengkapan PAK secara lengkap, selanjutnya PAK lengkap tersebut disirkuiasikan ke Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yaitu saksi RONNI SUHARDONO sebagai pemimpin kelompok pemasaran bisnis yang kemudian melakukan penelitian atas hasil analisis yang dibuat oleh ARK maupun oleh RM yang hasilnya dibuat dalam bentuk pendapat dalam disposisi secara tertulis yang mengusulkan PAK yang telah disusun oleh GARNA KOMARUDDIN dengan suatu pernyataan bahwa dirinya telah melakukan verifikasi atas permohonan nasabah tersebut. PAK tersebut kemudian disirkulasikan oleh Pemimpin Analisa Kredit yang kemudian mendukung permohonan kredit tersebut. PAK tersebut kemudian disirkulasikan kepada saksi PRAMONO selaku Pemimpin Divisi Korporasi yang kemudian mempelajari pendapat atau

Hal. 27 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi masing-masing anggota KPK lain. Saksi PRAMONO selaku Pemimpin Divisi Korporasi kemudian memutuskan pengajuan kredit tersebut sesuai dengan ketentuan CPC No.70 yang memberikan kewenangan kepada saksi PRAMONO selaku Pemimpin Divisi Korporasi untuk memutuskan kredit dengan jumlah di atas Rp 50.000.000.000,00 sampai dengan Rp 75.000.000.000,00 Kredit tersebut kemudian disetujui sejumlah Rp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPI / 2 / 047 tanggal 28 Mei 2003 dan perjanjian kredit No.2003 / KPI / 30 tanggal 11 Juni 2003, dengan fasilitas :

- KMK Permanen Maksimum Rp26.000.000.000,00 including fasilitas KMK Permanen Rp18.000.000.000,00
- KMK Sementara Rp1.800.000.000,00 untuk keperluan tambahan modal kerja operasional perusahaan pembelian stock, pemeliharaan CCTV, SAS, FAS dan KMK transaksional maksimum Rp39.000.000.000,00 untuk keperluan tambahan modal kerja pengadaan CCTV, SAS, FAS, dan lain-lain.

Bahwa pada bulan Oktober 2003, sewaktu kredit dengan SKK No.KPI / 2 / 047 tanggal 28 Mei 2003 belum selesai mengangsur/lunas, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA kembali mengajukan permohonan tambahan kredit modal kerja permanen dan transaksional dengan Surat Permohonan No.0181 / LIMEC / X / 2003 tanggal 16 Oktober 2003 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk Divisi Korporasi yang saat itu dijabat oleh Drs. PRAMONO dengan jumlah Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Permohonan tersebut kemudian kembali diproses oleh GARNA KOMARUDDIN dengan cara yang sama dengan tambahan kredit pertama, dengan jaminan yang sebelumnya telah dijaminan oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA pada pengajuan kredit sebelumnya, yaitu :

Jaminan berupa tanah dan bangunan.

- a. Sebidang tanah seluas 613 M2 Jakarta Timur dengan SHGB No.252 tanggal 22 Oktober 1998 atas nama MAREIA KUMALA YAWOGA, TJULANG S. YAWOGA, WAWA LENI YAWOGA dan DAVID YAWOGA jatuh tempo tanggal 2 Oktober 2018 telah diikat hak tanggungan sebesar Rp2.165.000.000,00
- b. Sebidang tanah seluas 1.017 M2 berlokasi di Jalan Lenteng Agung Gang Mawar Rt.05/02 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta

Hal. 28 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan SHM No.241 tanggal 16 Mei 1978 atas nama TJULANG STEFANUS YAWOGA telah diikat hak tanggungan sebesar Rp1.235.000.000,00

c. Tanah seluas 90.000 M2 terletak di kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntulanak, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan perincian :

- SHM No. 978 tanggal 21 Desember 2000 atas nama MARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 979 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 984 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG SMARIA KUMALA YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.985 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.986 tanggal 21 Desember 2000 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 10.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Tanah seluas 284.505 M2 terletak di sebelah utara kawasan Golf Resort Mega Cemara Blok Kelapa Koneng Desa Banyuasin, Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan perincian :

- SHM No. 96 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.680 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.386.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 97 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.700 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.388.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 29 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.98 tanggal 1 Maret 1993 atas nama NINA MUKTAR seluas 19.940 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.417.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.99 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.220 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.330.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No. 100 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.175 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.324.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.101 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 19.910 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.414.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.102 tanggal 1 Maret 1993 atas nama TJULANG S. YAWOGA seluas 20.000 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.425.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.103 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 19.930 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.416.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.104 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.560 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.250.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.105 tanggal 1 Maret 1993 atas nama ILONA K seluas 18.230 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp2.210.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.110 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.111 tanggal 1 Maret 1993 atas nama HANDI SANTOSA seluas 19.480 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.114 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 19.580 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp1.767.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.
- SHM No.115 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 17.870 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Hal. 30 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.116 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. HERMAN seluas 18.750 M2 telah diikat hak tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama.

Jaminan stock barang dan tagihan yang dijaminakan dalam akte fiducia.

- a. Piutang termin proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari BNI yang diikat secara fiducia.
- b. Persediaan barang berupa peralatan dan perlengkapan CCTV, SAS dan FAS yang terletak di Jalan Matraman I No.3 Jakarta Timur akan diikat fiducia notariil menjadi senilai Rp10.044.000.000,00
- c. Pengurus/pemegang saham atas nama TJULANG S. YAWOGA diikat Borgtoch.
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Jeep Harier tahun 2000 atas nama JONNY HERMAN No.Pol B 8493 BG.

Bahwa permohonan dengan menggunakan jaminan terdahulu tanpa adanya tambahan jaminan tersebut kemudian oleh GARNA KOMARUDDIN tetap diproses sebagaimana proses sebelumnya, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran laporan keuangan, tanpa melakukan verifikasi terhadap kantor akuntan publik dan appraisal yang membuat laporan keuangan, tanpa melakukan kunjungan kepada Calon Debitur atau pihak ketiga dalam rangka konfirmasi atas syarat-syarat kredit yang diajukan, tanpa melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study dan melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan dan appresial yang melakukan taksiran tanpa melakukan penilaian jaminan Terdakwa kemudian membuat laporan tertulis dalam formulir laporan Kunjungan Setempat (PAK 06). Dalam analisisnya, GARNA KOMARUDDIN juga tidak mengemukakan jaminan yang pernah diajukan dalam kredit terdahulu tanpa adanya tambahan jaminan.

Setelah melalui proses sebagaimana proses terdahulu, GARNA KOMARUDDIN kemudian menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan Divisi Korporasi I PT BNI (Persero) Tbk yang disetujui oleh Pimpinan Divisi Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPS / 2 / 016 / R tanggal 10 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA Up Bpk TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan Perjanjian Kredit No.2004 / KPS / 06 / KMK tanggal 11 Februari 2004, dengan fasilitas yang diberikan berupa :

- a. Tambahan plafon KMK Permanen maksimum Rp19.500.000.000,00 di luar fasilitas KMK Permanen yang berjalan Rp26.000.000.000,00 keperluan tambahan modal kerja pengadaan dan pemeliharaan peralatan security system.

Hal. 31 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian tambahan KMK Transaksional Maksimum Rp29.000.000.000,00 fasilitas KMK Transaksional yang berjalan sebesar Rp39.000.000.000,00 keperluan tambahan Modal Kerja perdagangan/pemasangan peralatan security system.
4. Pada bulan Juni 2004 (saat kredit tambahan pertama dan kredit tambahan kedua belum diselesaikan pembayarannya oleh TJULANG STEFANUS YAWOGA), Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA mengajukan surat ke Divisi Korporasi I PT BNI (Persero) Tbk dengan Surat Permohonan No.0112 / LIMEC / IV / 2004 tanggal 15 April 2004 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk Divisi Korporasi dan permohonan tambahan kredit ketiga tersebut dengan menggunakan jaminan yang sama sebagaimana pada pengajuan tambahan kredit kedua, tetap diproses oleh GARNA KOMARUDDIN sebagaimana memproses permohonan pengajuan kredit tambahan pertama dan tambahan kedua, namun, karena jumlah yang diajukan adalah total dari kredit modal kerja yang berada pada Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA sebagai Direktur Utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA telah melampaui jumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) maka kemudian diajukan kepada Direktur Korporasi yang kemudian disetujui oleh Direktur Korporasi I PT. BNI (Persero) Tbk. dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPS / 2 / 079 / R tanggal 16 Juni 2004 yang ditujukan kepada PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA Up Bpk. TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan fasilitas yang diberikan berupa : Tambahan plafon KMK Transaksional Maksimum Rp32.800.000.000,00 di luar fasilitas KMK Transaksional yang berjalan Rp68.000.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan Tambahan Modal Kerja Perdagangan/ Pemasangan Peralatan security system.
5. Pada bulan Februari 2005 (saat kredit tambahan pertama, kedua dan ketiga belum diselesaikan pembayarannya oleh TJULANG STEFANUS YAWOGA), Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur utama PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA dengan Surat Permohonan No.VIII / LIMEC / IV / 2005 tanggal 15 Februari 2005 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk. Divisi Korporasi mengajukan Permohonan Tambahan Kredit KMK sementara, dengan menggunakan jaminan yang sama sebagaimana pada pengajuan tambahan kredit kedua, yang tetap diproses oleh GARNA KOMARUDDIN sebagaimana memproses permohonan pengajuan kredit tambahan pertama, kedua dan ketiga, dan karena kredit yang diajukan

Hal. 32 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tambahan sementara dengan jumlah permohonan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang merupakan kewenangan dari Pemimpin Divisi Korporasi), kemudian diajukan kepada Pimpinan Divisi Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) No.KPS / 2 / 079 / R tanggal 16 Februari 2005 yang ditujukan kepada PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA Up Bpk. TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan fasilitas yang diberikan berupa Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa setelah disetujuinya kredit-kredit tersebut, Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA melakukan pencairan dengan cara mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berasal dari PT. Widya Wahana dan PT. Panca Tata Trika yaitu:

5.1 Berdasarkan Surat No.576 / LIMEC / XII / 2004 tanggal 1 Desember 2004, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp 9.303.498.750,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- a. SPK No.544 / WW / XI / 2004 tanggal 22 November 2004 senilai Rp3.578.500.000,00 Jatuh tempo tanggal 21 Mei 2005.
- b. SPK No.547 / WW / XI / 2004 tanggal 24 November 2004 senilai Rp3.910.250.000,00 Jatuh tempo tanggal 23 Mei 2005.
- c. SPK No.552 / WW / XI / 2004 tanggal 26 November 2004 senilai Rp2.986.210.000,00 Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2005.
- d. SPK No.556 / WW / XI / 2004 tanggal 30 November 2004 senilai Rp3.388.115.000,00 Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2005.

5.2. Berdasarkan Surat No.625 / LIMEC / XII / 2004 tanggal 10 Desember 2004, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp7.889.050.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK) :

- SPK No.560 / WW / XII / 2004 tanggal 2 Desember 2004 senilai Rp3.721.560.000,00 Jatuh tempo tanggal 1 Juni 2005.
- SPK No.564 / WW / XI / 2004 tanggal 6 Desember 2004 senilai Rp2.149.980.030,00 Jatuh tempo tanggal 5 Juni 2005.
- SPK NO.566 / WW / XI / 2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp2.514.787.000,00 Jatuh tempo tanggal 6 Juni 2005.
- SPK No.570 / WW / XI / 2004 tanggal 9 Desember 2004 senilai Rp3.751.555.000,00 Jatuh tempo tanggal 8 Juni 2005.

Hal. 33 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Surat No.631 / LIMEC / XII / 2004 tanggal 21 Desember 2004, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp3.731.499.850,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK):
- SPK No.5824 / WW / XH / 2004 senilai Rp2.956.321.000,00 Jatuh tempo tanggal 14 Juni 2005.
 - SPK No.587 / WW / XII / 2004 tanggal 20 Desember 2004 senilai Rp5.740.769.000,00 Jatuh tempo tanggal 19 Juni 2005.
- 5.4. Surat No.632 / LIMEC / XII / 2004 tanggal 22 Desember 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp5.971.999.800,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus rupiah) dengan melampirkan 3 (tiga) Surat Perintah Kerja (SPK):
- SPK No.592 / WW / XII / 2004 tanggal 20 Desember 2004 senilai Rp1.357.060.000,00 Jatuh tempo tanggal 19 Juni 2005.
 - SPK No.595 / WW / XII / 2004 tanggal 21 Desember 2004 senilai Rp3.578.432.000,00 Jatuh tempo tanggal 20 Juni 2005.
 - SPK No.596 / WW / XII / 2004 tanggal 22 Desember 2004 senilai Rp4.252.200.000,00 Jatuh tempo tanggal 21 Juni 2005.
 - SPK No.556 / WW / XI / 2004 tanggal 30 Nopember 2004 senilai Rp3.388.115.000,00 Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2005.
- 5.5. Surat No.003 / LIMEC / I / 2005 tanggal 3 Januari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp8.678.013.500,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) :
- SPK No.598 / WW / XII / 2004 tanggal 23 Desember 2004 senilai Rp4.362.100.000,00 Jatuh tempo tanggal 22 Juni 2005.
 - SPK No.045 / WW / Li / 2005 tanggal 8 Februari 2005 senilai Rp2.915.400.000,00 Jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2005.
- 5.10. Surat No.062 / LIMEC / II / 2005 tanggal 18 Februari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp4.978.486.500,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK):
- SPK No.052 / WW / II / 2005 tanggal 14 Februari 2005 senilai Rp3.172.680.000,00 Jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK No.056 / WW / II / 2005 tanggal 17 Februari 2005 senilai Rp4.486.530.000,00 Jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2005.

5.11.Surat No.047 / LIMEC / II / 2005 tanggal 8 Februari 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- SPK No.031 / WW / II / 2005 tanggal 1 Februari 2005 senilai Rp4.198.200.000,00 Jatuh tempo tanggal 24 Mei 2005.
- SPK No.035/WW/II/2005 tanggal 2 Februari 2005 senilai Rp3.470.500.000,00 Jatuh tempo tanggal 24 Mei 2005.
- SPK No.037/WW/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 senilai Rp4.870.100.000,00 jatuh tempo 24 Mei 2005.
- SPK No.039/WW/II/2005 tanggal 4 Februari 2005 senilai Rp2.846.800.000,00 jatuh tempo 24 Mei 2005.

5.12.Surat No.078 / LIMEC / IH / 2005 tanggal 4 Maret 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp11.512.026.500,00 (sebelas miliar lima ratus dua belas juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan 6 (enam) Surat Perintah Kerja (SPK).

- SPK No.058 / WW / II / 2005 tanggal 18 Februari 2005 senilai Rp3.178.750.000,00 Jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2005.
- SPK No.061 / WW / II / 2005 tanggal 21 Februari 2005 senilai Rp2.825.400.000,00 Jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2005.
- SPK No.065 / WW / II / 2005 tanggal 23 Februari 2005 senilai Rp3.422.330.000,00 jatuh tempo 22 Agustus 2005.
- SPK No.067 / WW / II / 2005 tanggal 25 Februari 2005 senilai Rp3.680.770.000,00 jatuh tempo 24 Agustus 2005.
- SPK No.073 / WW / II / 2005 tanggal 28 Februari 2005 senilai Rp2.776.340.000,00 jatuh tempo 27 Agustus 2005.
- SPK No.076 / WW / III / 2005 tanggal 2 Maret 2005 senilai Rp1.827.220.000,00 jatuh tempo 2 Maret 2005.

5.13.Surat No.101 / LIMEC / III / 2005 tanggal 17 Maret 2005, mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp9.278.999.600,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK):

- SPK No.080 / WW / III / 2005 tanggal 4 Maret 2005 senilai Rp3.307.286.000,00 Jatuh tempo tanggal 3 September 2005.

Hal. 35 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK No.085 / WW / III / 2005 tanggal 8 Maret 2005 senilai Rp4.110.280.000,00 Jatuh tempo tanggal 7 September 2005.
- SPK No.089 / WW / III / 2005 tanggal 10 Maret 2005 senilai Rp3.829.472.000,00 jatuh tempo 9 September 2005.
- SPK No.067 / WW / II / 2005 tanggal 25 Februari 2005 senilai Rp3.680.770.000,00 jatuh tempo 24 Agustus 2005.
- SPK No.073 / WW / II / 2005 tanggal 28 Februari 2005 senilai Rp2.776.340.000,00 jatuh tempo 27 Agustus 2005.
- SPK No.076 / WW / III / 2005 tanggal 2 Maret 2005 senilai Rp1.827.220.000,00 jatuh tempo 2 Maret 2005.
- No.080 / WW / III / 2005 tanggal 4 Maret 2005 senilai Rp3.307.286.000,00 Jatuh tempo tanggal 3 September 2005.

Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja yang diajukan oleh TJULANG STEFANUS YAWOGA sebagai Direktur Utama PT LIMA JAYAKARTA UTAMA dalam pencairan atas persetujuan kreditnya, tidak pernah diverifikasi oleh GARNA KOMARUDDIN selaku Pengelola nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Bab I Sub Bab K sub sub bab 03 INDEKS IN / 0137 / PAR tanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman kebijakan dan prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I. Dan atas SPK tersebut selalu terjadi pembayaran.

Bahwa surat perintah kerja tersebut di atas ternyata adalah fiktif, yaitu :

- Bahwa sebenarnya kedua perusahaan tersebut tidak pernah ada (nomor telepon yang dicantumkan dalam Kop surat tersebut saat dihubungi tidak bisa dihubungi, dan saat melakukan konfirmasi ke Call Centre Telkom 108 : nomor telepon dan alamat PT. Widya Wahana sama dengan alamat debitur di PT Lima Jayakarta Utama.
- Format tulisan dan gaya bahasa pada surat pemesanan pengadaan barang dari kedua perusahaan tersebut kepada Debitur adalah sama.
- Surat penawaran harga yang dibuat oleh PT. Lima Jayakarta Utama yang ditujukan kepada PT. Panca Tata Trika dengan No.680/Limec/XI/2003 tanggal 19 November 2003 yang ditandatangani oleh Debitur menggunakan stempel Perusahaan PT. Panca Tata Trika.
- Direktur Utama PT. Panca Tata Trika HENDRA KUSWADI diketahui adalah pegawai PT. Lima Jayakarta Utama (Direktur Teknik) sedangkan Direktur Utama PT. Widya Wahana : KIMUNG, adalah karyawan marketing PT. Lima Jayakarta utama.

Hal. 36 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan siapa pemesan barang dari masing-masing perusahaan tersebut.
- Tidak menemukan adanya PT. Lima Jayakarta Utama memesan alat CCTV kepada CHEMCO PRIVATE LTD di Singapura dan bukti pembayarannya.
- Pada tanggal 2 Maret 2005, realisasi tambahan kredit sementara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditransfer ke rekening 168-1701406 atas nama JHONI HERMAN di BCA Pluit Jakarta yang dijelaskan sebagai rekening CHEMCO PRIVATE comfrom surat PT. Lima Jayakarta Utama No.070 / Limec / II / 2005 tanggal 25 Februari 2005.

Bahwa dana kredit yang diterima oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA selaku Direktur PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, kemudian digunakan untuk :

1. Sebagaimana surat PT. Lima Jayakarta Utama selaku Debitur dengan No.012 / Limec / TSY / IV / 2006 tanggal 3 April 2006 disebutkan penggunaan KMK Transaksional sebesar Rp110.800.000.000,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dan KMK rekening koran telah digunakan antara lain digunakan untuk operasional perusahaan (termasuk dalam pembayaran bunga kredit) sebesar Rp28.760.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
2. Untuk keperluan pribadi sebesar Rp10.790.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
3. Membeli Cheque Multi Guna sebesar Rp14.627.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Pembayaran setoran saham pada PT. Graha Lintas Property sebesar Rp19.200.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah).
5. Pelunasan pembelian tanah di Tanjung Lesung sebesar Rp60.460.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa seharusnya, sesuai dengan Buku Petunjuk Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, setelah kredit diperoleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA sebagai Debitur, GARNA KOMARUDDIN sebagai pengelola nasabah mengawasi penggunaan kredit apakah sesuai dengan peruntukannya, namun ternyata, GARNA KOMARUDDIN tidak melakukan pengawasan, sehingga GARNA KOMARUDDIN yang seharusnya melakukan peneguran kepada Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA yang telah menggunakan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya tidak melakukan peneguran kepada Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA.

Hal. 37 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan kedudukannya selaku Pemohon Kredit telah menggunakan kesempatan yakni mengajukan kredit dengan :

- Bahwa jaminan tanah yang dimark up adalah jaminan tanah kosong yang terletak di Blok Cisadang dan Blok Kuntulanak Desa Tanjung Jaya serta Blok Kelapa Koneng, Desa Banyu Asih, Kabupaten Pandeglang, Banten dan terdapat dua surat Pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2003 dari kantor pajak Pandeglang atas obyek yang sama namun klasifikasi tarif NJOPnya berbeda sangat signifikan.
- Bahwa untuk jaminan tanah di Desa Banyuasih tarif NJOPnya ada dua yaitu sebesar Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) permeter persegi dan sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) permeter persegi , dan untuk Desa Tanjung Jaya tarif NJOPnya tahun 2001 dan tahun 2002 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah), GARNA KOMARUDDIN mengetahui adanya dua NJOP terhadap satu obyek yang diajukan oleh Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dan yang digunakan untuk jaminan dan menyatakannya dalam Formulir evaluasi taksasi jaminan dan formulir Berita Acara Saksi jaminan tertanggal 22 Desember 2003.
- Adanya rekayasa perusahaan fiktif selaku partner kerja Debitur : Partner kerja Debitur fiktif dan karenanya kontrak kerja yang disampaikan juga fiktif. Surat perintah kerja dari rekanan kerja perusahaan (fiktif yang diajukan oleh PT. Lima Jayakarta Utama tidak dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang menerbitkan SPK tersebut (PT. Widia Wahana dengan PT. Panca Tata Trika) sebagai Rekanan Debitur yang ternyata fiktif. Pada tanggal 2 Maret 2005, realisasi tambahan kredit sementara sebesar Rp10.000.000.000,00 ditransfer ke rekening 168-1701406 atas nama JHONI HERMAN di BCA Pluit Jakarta yang dijelaskan sebagai rekening CHEMCO PRIVATE Conform Surat PT. Lima Jayakarta Utama No.070 / Limec / II / 2005 tanggal 25 Februari 2005. Selanjutnya atas permohonan kredit Terdakwa tersebut, saksi GARNA KOMARUDDIN yang tidak memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA sebagaimana diatur dalam Bab I Sub Bab K sub sub bab 03 INDEKS IN / 0137 / PAR tanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I.

Hal. 38 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbuatan Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA bersama-sama saksi GARNA KOMARUDIN telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) yang diberikan dalam bentuk Cheque Multi Guna atau orang lain yaitu TJULANG STEFANUS YAWOGA atau suatu korporasi yaitu PT. Lima Jayakarta Utama sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)
7. Akibat perbuatan Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA bersama-sama dengan saksi GARNA KOMARUDDIN telah merugikan keuangan Negara Cq PT. BNI (Persero) sebesar Rp133.837.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 39 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kendaraan:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Harrier warna kuning metalik dengan nomor rangka MCV 150-142289, nomor mesin 0947686, No. Pol. B-8493-BG berikut kunci kontak;
2. BPKB ASLI mobil Toyota Harrier No.A93074926 No. Pol. B-8493- BG tahun 2000 dengan nomor rangka MCV 150-142289 dan nomor mesin 0947686;
3. Faktur ASLI Toyota Harrier dengan No 60117/APS/DN/2000 tanggal 16 Mei 2000 A.n. JONNY HERMAN yang dikeluarkan dari PT. ANDIKA PRATAMA SENTOSA;
4. STNK ASLI No. 004296/MJ/001 tanggal 26 Mei 2000 A.n. JONNY HERMAN kendaraan roda empat merk Toyota Harrier warna kuning metalik dengan nomor rangka MCV 150-142289, Nomor mesin 0947686, No. Pol. B-8493-BG.

2. Dokumen Jaminan dan Penaikatan Jaminan Tanah :

1. Dokumen Sertifikat

a. Dokumen I :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SHM No.241/Pasar Minggu	16-05-1978
2	Asli Akta Jual Beli No. 113/2001	06-12-2001
3	Salinan SKMHT No. 19	16-12-2001
4	Asli SHT No.225/2002	06-03-2002
5	Asli SHGB No.252/Kebon Manggis (beserta Asli STTS & Asli SSB)	22-10-1998
6	Salinan SKMHT No. 18	06-12-2001
7	Asli SHT No. 155/2002	15-02-2002
8	Asli SHGB No.289/Tanjung Jaya	21-12-2000
9	Asli SHGB N0.290/Tanjung Jaya	21-12-2000
10	Asli SHGB No.291/Tanjung Jaya	21-12-2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Salinan SKMHT No. 16	06-12-2001
12	Asli SHGB No.292/Tanjung Jaya	21-12-2000
13	Salinan SKMHT No. 15	06-12-2001
14	Asli SHGB No-293/Tanjung Jaya	21-12-2000
15	Salinan SKMHT No. 17	06-12-2001
16	Asli SHT No.391/2003	30-12-2003
17	Asli SHGB No.02/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001 -0008.0)	01-03-1993
18	Asli SHGB No.03/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0009.0)	01-03-1993
19	Asli SHGB No.04/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0010.0)	01-03-1993
20	Asli SHGB No.05/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0004.0)	01-03-1993
21	Asli SHGB No.06/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0005.0)	01-03-1993
22	Asli SHGB No.07/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0006.0)	01-03-1993
23	Asli SHGB No.08/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0007.0)	01-03-1993
24	Asli SHGB No.09/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0011.0)	01-03-1993
25	Asli SHGB No.10/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0013.0)	01-03-1993
26	Asli SHGB No.11/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0014.0)	01-03-1993
27	Asli SHGB No.12/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0019.0)	01-03-1993
28	Asli SHGB No.13/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0020.0)	01-03-1993
29	Asli SHGB No.14/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0023.0)	01-03-1993
30	Asli SHGB No.15/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001 -0024.0)	01-03-1993
31	Asli SHGB No.16/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0025.0)	01-03-1993
32	Asli SHT No.392/2003	30-12-2003
33	Asli SHM No.981/Tanjung Jaya	21-12-2000
34	Salinan APHT No.64/2004	11-02-2004
35	Asli SHT No.32/2004	18-02-2004
36	Asli SHM No.987/Tanjung Jaya	21-12-2000
37	Salinan APHT No.61/2004	11-02-2004
38	Asli SHT No.30/2004	18-02-2004
39	Asli SHP No.05/Tanjung Jaya	28-07-2003
40	Salinan APHT No.60/2004	11-02-2004
41	Asli SHT No.31/2004	18-02-2004
42	Asli SHP No.03/Tanjung Jaya	28-07-2003
43	Salinan APHT No.63/2004	11-02-2004
44	Asli SHT No.33/2004	18-02-2004
45	Asli SHM No.106/Banyuasih	01-03-1993
46	Asli SHM No.107/Banyuasih	01-03-1993
47	Asli SHM No.108/Banyuasih	01-03-1993
48	Asli SHM No.109/Banyuasih	01-03-1993
49	Salinan APHT No.62/2004	11-02-2004
50	Asli SHT No.34/2004	18-02-2004
51	Asli SHM No.112/Banyuasih	01-03-1993
52	Asli SHM No.113/Banyuasih	01-03-1993
53	Salinan APHT No.59/2004	11-02-2004

Hal. 41 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Asli SHT No.29/2004	18-12-2004
55	Asli 1MB No. 14476/IMB/1981	03-12-1981
56	Asli Berita Acara Plotting SHM No.241	12-11-2001
57	Asli Berita Acara Plotting SHM No.986, 985 & 984	12-11-2001
58	Asli Berita Acara Plotting SHGB No.252	12-11-2001
59	Asli Berita Acara Plotting SHM No.978 & 979	25-10-2002
60	Asli Berita Acara Plotting SHGB No.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, & 16	18 s/d 19-12-1993
61	Asli Foto2 Tanah Jaminan Kredit PT. LJU	18 s/d 19-12-1993
62	Asli Berita Acara Plotting SHGB No.289, 290, 291, 292 & 293	1993
63	Copy Gambar Situasi No.1582 s.d 1601/1992	
64	Asli Surat Tanda Terima Agunan No.W. 12/6.1/059	29-11-2001
65	Asli Surat NO.47/PPAT/XI/2001	29-11-2001
66	Asli Surat NO.W12/6.1/7160/R	30-11-2001
67	Asli Surat Tanda Penerimaan Agunan No.W.12/6.1/001	04-01-2002
68	Asli Surat No.W12/6.1/6722/R	29-11-2002
69	Copy Tanda Terima	02-06-2003
70	Asli Surat Keterangan Notaris No.N/81-K/VI/Jkt/2003	03-06-2003
71	Copy Tanda Terima	05-06-2003
72	Asli Tanda Terima	09-06-2003
73	Copy Surat No.W12/6.1/2284/R	12-06-2003
74	Salinan Surat No.KPI/9/1354/R	09-06-2003
75	Salinan Surat No.KPI/9/1387A/R	10-06-2003
76	Asli Surat Keterangan Notaris No.N/87-k/VI/Jkt/2003	11-06-2003
77	Salinan Surat No.KPI/9/1720/R	15-07-2003
78	Salinan Surat No.KPI/9/1776/R	24-07-2003
79	Copy Surat No.N/3/X/JKT/2003	01-10-2003
80	Asli Surat No.004/LIMEC/TSY/XI/03	10-11-2003
81	Copy Surat No.12/N/XI/JKT/2003	10-11-2003
82	Salinan Memorandum No.KPS/9/299	12-11-2003
83	Salinan Surat No.KPS/9/29727/R	17-11-2003
84	Asli Tanda Terima	08-01-2004
85	Asli Surat Keterangan No.130/VI/2004	10-06-2004
86	Salinan Surat No.KPS/9/0487/R	10-02-2004
87	Salinan Surat No.KPS/4/0516/R	17-02-2004
88	Salinan Surat No.KPS/4/0558/R	25-02-2004

Hal. 42 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Asli Surat No.20/SY/N/II/2004	26-02-2004
90	Asli Memo No.KKS/3/0773	17-07-2007
91	Asli Tanda Terima Dokumen	20-07-2007

b. Dokumen II :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SHM No.701/Tanjungjaya	26-12-1996
2	Asli SHM No.702/Tanjungjaya	26-12-1996
3	Asli SHM No.703/Tanjungjaya	26-12-1996
4	Asli SHM No.704/Tanjungjaya	26-12-1996
5	Asli SHM No.708/Tanjungjaya	26-12-1996
6	Asli SHM No.709/Tanjungjaya	26-12-1996
7	Asli SHM No.710/Tanjungjaya	26-12-1996
8	Asli SHM No.711/Tanjungjaya	26-12-1996
9	Asli SHM No.712/Tanjungjaya	26-12-1996
10	Asli SHM No.713/Tanjungjaya	26-12-1996
11	Asli SHM No.714/Tanjungjaya	26-12-1996
12	Asli SHM No.716/Tanjungjaya	26-12-1996
13	Salinan SKMHT No.36	18-06-2004
14	Salinan APHT No.200/2004	06-07-2004
15	Asli SHT No. 156/2004	15-07-2004
16	Asli SHM No.686/Tanjungjaya	26-12-1996
17	Asli SHM No.695/Tanjungjaya	26-12-1996
18	Asli SHM No.696/Tanjungjaya	26-12-1996
19	Asli SHM No.697/Tanjungjaya	26-12-1996
20	Asli SHM No.698/Tanjungjaya	26-12-1996
21	Asli SHM No.699/Tanjungjaya	26-12-1996
22	Asli SHM No.700/Tanjungjaya	26-12-1996
23	Salinan SKMHT No.35	18-06-2004
24	Salinan APHT No. 199/2004	06-07-2004
25	Asli SHT No. 162/2004	15-07-2004
26	Asli SHM No.785/Tanjungjaya	26-12-1996
27	Asli SHM No.786/Tanjungjaya	26-12-1996
28	Asli SHM No.797/Tanjungjaya	26-12-1996
29	Asli SHM No.800/Tanjungjaya	26-12-1996
30	Asli SHM No.801/Tanjungjaya	26-12-1996
31	Asli SHM NO.802/Tanjungjaya	26-12-1996
32	Asli SHM No.803/Tanjungjaya	26-12-1996
33	Asli SHM No.804/Tanjungjaya	26-12-1996
34	Asli SHM No.805/Tanjungjaya	26-12-1996
35	Asli SHM No.806/Tanjungjaya	26-12-1996
36	Asli SHM No.807/Tanjungjaya	26-12-1996
37	Asli SHM No.808/Tanjungjaya	26-12-1996
38	Salinan SKMHT No.41	18-06-2004
39	Salinan APHT No.205/2004	06-07-2004
40	Asli SHT No. 160/2004	15-07-2004
41	Asli SHM No.729/Tanjungjaya	26-12-1996
42	Asli SHM No.730/Tanjungjaya	26-12-1996
43	Asli SHM No.731/Tanjungjaya	26-12-1996

Hal. 43 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Asli SHM No.732/Tanjungjaya	26-12-1996
45	Asli SHM No.733/Tanjungjaya	26-12-1996
46	Asli SHM No.734/Tanjungjaya	26-12-1996
47	Asli SHM No.736/Tanjungjaya	26-12-1996
48	Asli SHM No.738/Tanjungjaya	26-12-1996
49	Asli SHM No.739/Tanjungjaya	26-12-1996
50	Asli SHM No.740/Tanjungjaya	26-12-1996
51	Asli SHM No.741/Tanjungjaya	26-12-1996
52	Asli SHM No.742/Tanjungjaya	26-12-1996
53	Asli SHM No.743/Tanjungjaya	26-12-1996
54	Asli SHM No.744/Tanjungjaya	26-12-1996
55	Asli SHM No.746/Tanjungjaya	26-12-1996
56	Asli SHM No.747/Tanjungjaya	26-12-1996
57	Asli SHM No.749/Tanjungjaya	26-12-1996
58	Salinan SKMHT No.38	18-06-2004
59	Salinan APHT No.202/2004	06-07-2004
60	Asli SHT No. 166/2004	15-07-2004
61	Asli SHM No.670/Tanjungjaya	26-12-1996
62	Asli SHM No.671/Tanjungjaya	26-12-1996
63	Asli SHM No.672/Tanjungjaya	26-12-1996
64	Asli SHM No.673/Tanjungjaya	26-12-1996
65	Asli SHM No.675/Tanjungjaya	26-12-1996
66	Asli SHM No.676/Tanjungjaya	26-12-1996
67	Asli SHM No.685/Tanjungjaya	26-12-1996
68	Asli SHM No.680/Tanjungjaya	26-12-1996
69	Salinan SKMHT no.34	18-06-2004
70	Salinan APHT No. 198/2004	06-07-2004
71	Asli SHT No. 159/2004	15-07-2004
72	1 Set Tanda Terima dari Notaris	28-07-2004

c. Dokumen III:

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SHM No.718/Tanjungjaya	26-12-1996
2	Asli SHM No.719/Tanjungjaya	26-12-1996
3	Asli SHM No.720/Tanjungjaya	26-12-1996
4	Asli SHM No.721/Tanjungjaya	26-12-1996
5	Asli SHM No.722/Tanjungjaya	26-12-1996
6	Asli SHM No.723/Tanjungjaya	26-12-1996
7	Asli SHM No.724/Tanjungjaya	26-12-1996
8	Asli SHM No.725/Tanjungjaya	26-12-1996
9	Asli SHM No.726/Tanjungjaya	26-12-1996
10	Asli SHM No.727/Tanjungjaya	26-12-1996
11	Asli SHM No.728/Tanjungjaya	26-12-1996
12	Salinan SKMHT No.37	18-06-2004
13	Salinan APHT No.201/2004	06-07-2004
14	Asli SHT No.164/2004	15-07-2004
15	Asli SHM No.627/Tanjungjaya	14-08-1996
16	Asli SHM No.628/Tanjungjaya	14-08-1996
17	Asli SHM No.631/Tanjungjaya	14-08-1996
18	Asli SHM No.632/Tanjungjaya	14-08-1996
19	Asli SHM No.633/Tanjungjaya	14-08-1996

Hal. 44 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Asli SHM N0.634/Tanjungjaya	14-08-1996
21	Asli SHM No.635/Tanjungjaya	14-08-1996
22	Asli SHM No.636/Tanjungjaya	14-08-1996
23	Salinan SKMHT No.32	18-06-2004
24	Salinan APHT No. 196/2004	06-07-2004
25	Asli SHT No. 158/2004	15-07-2004
26	Asli SHM No.809/Tanjungjaya	26-12-1996
27	Asli SHM No.867/Tanjungjaya	02-04-1998
28	Asli SHM No.868/Tanjungjaya	02-04-1998
29	Asli SHM No.869/Tanjungjaya	02-04-1998
30	Asli SHM No.870/Tanjungjaya	02-04-1998
31	Asli SHM No.871/Tanjungjaya	02-04-1998
32	Asli SHM No.872/Tanjungjaya	02-04-1998
33	Asli SHM No.873/Tanjungjaya	02-04-1998
34	Salinan SKMHT No.42	18-06-2004
35	Salinan APHT No.206/2004	06-07-2004
36	Asli SHT No. 163/2004	15-07-2004
37	Asli SHM No.764/Tanjungjaya	26-12-1996
38	Asli SHM No.767/Tanjungjaya	26-12-1996
39	Asli SHM No.769/Tanjungjaya	26-12-1996
40	Asli SHM No.770/Tanjungjaya	26-12-1996
41	Asli SHM No.774/Tanjungjaya	26-12-1996
42	Asli SHM No.776/Tanjungjaya	26-12-1996
43	Asli SHM No.778/Tanjungjaya	26-12-1996
44	Asli SHM No.779/Tanjungjaya	26-12-1996
45	Asli SHM No.782/Tanjungjaya	26-12-1996
46	Salinan SKMHT No.40	18-06-2004
47	Salinan APHT No.204/2004	06-07-2004
48	Asli SHT No.161/2004	15-07-2004
49	Asli SHM No.637/Tanjungjaya	14-08-1996
50	Asli SHM No.642/Tanjungjaya	14-08-1996
51	Asli SHM No.644/Tanjungjaya	14-08-1996
52	Asli SHM No.664/Tanjungjaya	26-12-1996
53	Asli SHM No.665/Tanjungjaya	26-12-1996
54	Asli SHM No.666/Tanjungjaya	26-12-1996
55	Asli SHM No.667/Tanjungjaya	26-12-1996
56	Asli SHM No.668/Tanjungjaya	26-12-1996
57	Asli SHM N0.669/Tanjungjaya	26-12-1996
58	Salinan SKMHT No.33	18-06-2004
59	Salinan APHT No. 197/2004	06-07-2004
60	Asli SHT No. 165/2004	15-07-2004
61	Asli SHM No.752/Tanjungjaya	26-12-1996
62	Asli SHM No.753/Tanjungjaya	26-12-1996
63	Asli SHM No.754/Tanjungjaya	26-12-1996
64	Asli SHM No.755/Tanjungjaya	26-12-1996
65	Asli SHM No.756/Tanjungjaya	26-12-1996
66	Asli SHM No.758/Tanjungjaya	26-12-1996
67	Asli SHM No.759/Tanjungjaya	26-12-1996
68	Asli SHM No.760/Tanjungjaya	26-12-1996
69	Asli SHM No.763/Tanjungjaya	26-12-1996
70	Salinan SKMHT No. 39	18-06-2004
71	Salinan APHT No.203/2004	06-07-2004
72	Asli SHT No. 157/2004	15-07-2004

Hal. 45 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Akta Jual Beli :
- a. Dokumen Akta Jual Beli I :

No	URAIAN / DOKUMEN		TANGGAL
1	Salinan Akta Jual Beli	No.72/2004	08-06-2004
2	Salinan Akta Jual Beli	No.73/2004	08-06-2004
3	Salinan Akta Jual Beli	No.74/2004	08-06-2004
4	Salinan Akta Jual Beli	No.75/2004	08-06-2004
5	Salinan Akta Jual Beli	No.76/2004	08-06-2004
6	Salinan Akta Jual Beli	No.77/2004	08-06-2004
7	Salinan Akta Jual Beli	No.78/2004	08-06-2004
8	Salinan Akta Jual Beli	No.79/2004	08-06-2004
9	Salinan Akta Jual Beli	No.80/2004	08-06-2004
10	Salinan Akta Jual Beli	No.81/2004	08-06-2004
11	Salinan Akta Jual Beli	No.82/2004	08-06-2004
12	Salinan Akta Jual Beli	No.83/2004	08-06-2004
13	Salinan Akta Jual Beli	No.84/2004	08-06-2004
14	Salinan Akta Jual Beli	No.85/2004	08-06-2004
15	Salinan Akta Jual Beli	No.86/2004	08-06-2004
16	Salinan Akta Jual Beli	No.87/2004	08-06-2004
17	Salinan Akta Jual Beli	No.88/2004	08-06-2004
18	Salinan Akta Jual Beli	No.89/2004	08-06-2004
19	Salinan Akta Jual Beli	No.90/2004	08-06-2004
20	Salinan Akta Jual Beli	No.91/2004	08-06-2004
21	Salinan Akta Jual Beli	No.92/2004	08-06-2004
22	Salinan Akta Jual Beli	No.93/2004	08-06-2004
23	Salinan Akta Jual Beli	No.94/2004	08-06-2004
24	Salinan Akta Jual Beli	No.95/2004	08-06-2004
25	Salinan Akta Jual Beli	No.96/2004	08-06-2004
26	Salinan Akta Jual Beli	No.97/2004	08-06-2004
27	Salinan Akta Jual Beli	No.98/2004	08-06-2004
28	Salinan Akta Jual Beli	No.99/2004	08-06-2004
29	Salinan Akta Jual Beli	No. 100/2004	08-06-2004
30	Salinan Akta Jual Beli	No.101/2004	08-06-2004
31	Salinan Akta Jual Beli	No. 102/2004	08-06-2004
32	Salinan Akta Jual Beli	No. 103/2004	08-06-2004
33	Salinan Akta Jual Beli	No. 104/2004	08-06-2004
34	Salinan Akta Jual Beli	No. 105/2004	08-06-2004
35	Salinan Akta Jual Beli	No. 106/2004	08-06-2004
36	Salinan Akta Jual Beli	No.107/2004	08-06-2004
37	Salinan Akta Jual Beli	No. 108/2004	08-06-2004
38	Salinan Akta Jual Beli	No. 109/2004	08-06-2004
39	Salinan Akta Jual Beli	No. 110/2004	08-06-2004
40	Salinan Akta Jual Beli	No.111/2004	08-06-2004
41	Salinan Akta Jual Beli	No. 112/2004	08-06-2004
42	Salinan Akta Jual Beli	No. 113/2004	08-06-2004
43	Salinan Akta Jual Beli	No. 114/2004	09-06-2004
44	Salinan Akta Jual Beli	No.115/2004	09-06-2004
45	Salinan Akta Jual Beli	No. 116/2004	09-06-2004
46	Salinan Akta Jual Beli	No. 117/2004	09-06-2004
47	Salinan Akta Jual Beli	No. 118/2004	09-06-2004
48	Salinan Akta Jual Beli	No. 119/2004	09-06-2004

Hal. 46 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Salinan Akta Jual Beli	No. 120/2004	09-06-2004
50	Salinan Akta Jual Beli	No. 121/2004	09-06-2004
51	Salinan Akta Jual Beli	No. 122/2004	09-06-2004
52	Salinan Akta Jual Beli	No. 123/2004	09-06-2004
53	Salinan Akta Jual Beli	No. 124/2004	09-06-2004
54	Salinan Akta Jual Beli	No. 125/2004	09-06-2004
55	Salinan Akta Jual Beli	No. 126/2004	09-06-2004
56	Salinan Akta Jual Beli	No. 127/2004	09-06-2004
57	Salinan Akta Jual Beli	No. 128/2004	09-06-2004
58	Salinan Akta Jual Beli	No. 129/2004	09-06-2004
59	Salinan Akta Jual Beli	No. 130/2004	09-06-2004
60	Salinan Akta Jual Beli	No. 131/2004	09-06-2004
61	Salinan Akta Jual Beli	No. 132/2004	09-06-2004
62	Salinan Akta Jual Beli	No. 133/2004	09-06-2004
63	Salinan Akta Jual Beli	No. 134/2004	09-06-2004
64	Salinan Akta Jual Beli	No. 135/2004	09-06-2004
65	Salinan Akta Jual Beli	No. 136/2004	09-06-2004
66	Salinan Akta Jual Beli	No.137/2004	09-06-2004
67	Salinan Akta Jual Beli	No. 138/2004	09-06-2004
68	Salinan Akta Jual Beli	No. 139/2004	09-06-2004
69	Salinan Akta Jual Beli	No. 140/2004	09-06-2004
70	Salinan Akta Jual Beli	No. 141/2004	09-06-2004
71	Salinan Akta Jual Beli	No. 142/2004	09-06-2004
72	Salinan Akta Jual Beli	No. 143/2004	09-06-2004
73	Salinan Akta Jual Beli	No. 144/2004	09-06-2004
74	Salinan Akta Jual Beli	No.145/2004	09-06-2004
75	Salinan Akta Jual Beli	No. 146/2004	09-06-2004
76	Salinan Akta Jual Beli	No. 147/2004	09-06-2004
77	Salinan Akta Jual Beli	No. 148/2004	09-06-2004
78	Salinan Akta Jual Beli	No. 149/2004	09-06-2004
79	Salinan Akta Jual Beli	No. 150/2004	09-06-2004

b. Akta Jual Beli II :

No	URAIAN / DOKUMEN		TANGGAL
1	Salinan Akta Jual Beli	No.151/2004	09-06-2004
2	Salinan Akta Jual Beli	No.152/2004	09-06-2004
3	Salinan Akta Jual Beli	No.153/2004	10-06-2004
4	Salinan Akta Jual Beli	No.155/2004	10-06-2004
5	Salinan Akta Jual Beli	No.156/2004	10-06-2004
6	Salinan Akta Jual Beli	No.157/2004	10-06-2004
7	Salinan Akta Jual Beli	No.158/2004	10-06-2004
8	Salinan Akta Jual Beli	No.159/2004	10-06-2004
9	Salinan Akta Jual Beli	No.160/2004	10-06-2004
10	Salinan Akta Jual Beli	No.161/2004	10-06-2004
11	Salinan Akta Jual Beli	No.162/2004	10-06-2004
12	Salinan Akta Jual Beli	No.163/2004	10-06-2004
13	Salinan Akta Jual Beli	No.164/2004	10-06-2004
14	Salinan Akta Jual Beli	No.165/2004	10-06-2004
15	Salinan Akta Jual Beli	No.166/2004	10-06-2004
16	Salinan Akta Jual Beli	No.167/2004	10-06-2004
17	Salinan Akta Jual Beli	No.168/2004	10-06-2004

Hal. 47 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Salinan Akta Jual Beli	No.169/2004	10-06-2004
19	Salinan Akta Jual Beli	No.170/2004	10-06-2004
20	Salinan Akta Jual Beli	No.171/2004	10-06-2004
21	Salinan Akta Jual Beli	No.172/2004	10-06-2004
22	Salinan Akta Jual Beli	No.173/2004	10-06-2004
23	Salinan Akta Jual Beli	No.174/2004	10-06-2004
24	Salinan Akta Jual Beli	No.175/2004	10-06-2004
25	Salinan Akta Jual Beli	No.176/2004	10-06-2004
26	Salinan Akta Jual Beli	No.177/2004	10-06-2004
27	Salinan Akta Jual Beli	No.178/2004	10-06-2004
28	Salinan Akta Jual Beli	No.179/2004	10-06-2004
29	Salinan Akta Jual Beli	No. 180/2004	10-06-2004
30	Salinan Akta Jual Beli	No.181/2004	10-06-2004
31	Salinan Akta Jual Beli	No. 182/2004	10-06-2004

Dokumen Pengikatan Jaminan Lainnya : a. Dokumen I :

No	URAIAN 1 DOKUMEN	TANGGAL
1	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.22	11-06-2003
2	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-008911.HT.04.06.TH.2003/STD	08-08-2003
3	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.23	11-06-2003
4	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-008981 HT.04.06.TH.2003/STD	12-08-2003
5	Asli BPKB No.9307492 G	02-06-2000
6	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.24	11-06-2003
7	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia NO.W7-008909 HT.04.06.TH.2003/STD	08-08-2003
8	Salinan Akta Pemberian Jaminan Borg No.29	11-06-2003
9	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.43	18-06-2004
10	Salinan Akta Pernyataan SOL No.25	11-06-2003
11	Copy sesuai asli Draft Hutang Pemegang Saham	11-06-2003
12	Asli Surat Persetujuan Komisaris	28-11-2001
13	Asli Facsimili	09-06-2003
14	Salinan Surat No.KPI/9/1659/R	08-07-2003
15	Asli Tanda Terima	24-09-2003
16	Copy Surat Persetujuan a.n Ny.Dwi	15-06-2004
17	Copy Surat Persetujuan a.n Boy Manopelangi	15-06-2004
18	Salinan Surat No.MRK/3/219/R	17-06-2004
19	Asli Surat Pernyataan	18-06-2004
20	Asli Surat Keterangan NO.024/NA/I/2004	18-06-2004
21	Salinan Surat No.KPS/2/1840/R	08-07-2004
22	Asli Tanda Terima	08-07-2004
23	Asli Memo	15-07-2004
24	Asli Tanda Terima	08-07-2004
25	Asli Tanda Terima	06-01-2005
26	Daftar Pemegang Hak Atas Tanah	
27	Copy Surat No.KKS/4/0090/R	08-01-2008
28	Asli Surat No. 021/LIMEC/TSY/XII/2007	04-12-2007
29	Asli Surat Persetujuan dari JONNY HERMAN beserta KTP atas nama JONNY HERMAN dan Kwitansi kosong yang telah di tandatangani oleh JONNY HERMAN	04-12-2007

Hal. 48 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



c. Dokumen II :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli Perjanjian Fidusia No.01.017	30-11-2001
2	Asli Perjanjian Fidusia No.02.034	29-11-2002
3	Asli Perjanjian Fidusia No.02/012	25-06-2002
4	Salinan Akta Pemberian Jaminan Borg No. 14	06-12-2001
5	Copy Salinan APPH No. 12	28-05-2003
6	Copy Salinan APPH No. 13	28-05-2003
7	Copy Salinan APPH No. 14	28-05-2003
8	Copy Salinan APPH No. 15	28-05-2003
9	Copy Salinan APPH No.03	04-06-2003
10	Salinan APPH No.20	11-06-2003
11	Salinan APPH No.21	11-06-2003
12	Salinan Akta PPJPK No.26	11-06-2003
13	Salinan Akta PPJPK No.27	11-06-2003
14	Salinan Akta Pernyataan No.28	11-06-2003
15	Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.45	16-07-2003
16	Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.44	16-07-2003
17	Salinan Akta Pernyataan No.62	19-11-2003
18	Salinan Akta Pernyataan No.64	19-11-2003
19	Salinan Akta Pernyataan No.63	19-11-2003
20	Salinan Akta Pernyataan No.65	19-11-2003
21	Salinan Akta Pernyataan No.66	19-11-2003
22	Salinan Akta Pernyataan No.67	19-11-2003
23	Salinan Akta Pembatalan Perjanjian No.68	19-11-2003
24	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.69	19-11-2003
25	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.70	19-11-2003
26	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.71	19-11-2003
27	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.72	19-11-2003
28	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.73	19-11-2003
29	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.74	19-11-2003
30	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.75	19-11-2003
31	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.76	19-11-2003
32	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.77	19-11-2003
33	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.78	19-11-2003
34	Salinan Akta SKMHT No.98	21-11-2003
35	Salinan Akta SKMHT No.99	21-11-2003
36	Asli Tanda Terima	06-06-2003
37	Copy surat NO.N/16/XII/JKT/2003	30-12-2003

3. Barang bukti berupa uang :

Sejumlah Rp1.762.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada : ELVY. K, Pegawai PT. BNI Persero Tbk Divisi SDM, Jalan Letjend S. Parman Kav. 55- 56 Jakarta Selatan, disimpan/dititipkan di Rekening PT. BNI Persero Tbk Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat Nomor 0123383867.
dirampas untuk negara Ca PT. Bank BNI persero (tbk).



4. Dokumen Surat-surat :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Salinan Surat No.KPI/9/1246/R	02-06-2003
2	Salinan Surat No.W12/6.1/2162/R	03-06-2003
3	Asli Berita Acara Serah Terima	03-06-2003
4	Laporan Persediaan Barang	
5	Copy Surat NO.150/LIMEC/VIII/2003	27-08-2003
6	Copy KTP-KTP	
7	Asli Surat Pernyataan a.n Ujang Syamsudin	10-06-2004
8	Asli Surat Pernyataan a.n Tina Linda Halim	
9	Asli Surat Pernyataan a.n Antonia Agustina I.	
10	Asli Surat Pernyataan a.n Sunarsih	
11	Asli Surat Pernyataan a.n Widiati Astuti	
12	Asli Surat Pernyataan a.n Riana Wahyuni	
13	Asli Surat Pernyataan a.n Parlin	
14	Asli Surat Pernyataan a.n Suryanti	
15	Asli Surat Pernyataan a.n Sutrisno	
16	Asli Memo No.KPI/9/4039	22-11-2005
17	Salinan Memo No.OPR/5.1/2351	29-12-2005
18	Copy Memo No.KPS/2/100	17-01-2005
19	Copy Memo No.KPI/7/1268	28-07-2006
20	Copy Memo No.OPR/5.1/1470	03-08-2006
21	Copy Tanda Terima	19-12-2005
22	Copy Letter Of Appointment	16-09-2005
23	Laporan Penerimaan/Outstanding tagihan	16-09-2005
24	Monitoring KMK Transaksional	
25	Salinan Surat No.KPI/9/1441/R	13-06-2003
26	Copy Surat dari PT. Lima Jayakarta Utama	03-11-2003
27	Asli Tanda Terima Perjanjian Kredit	
28	Salinan Surat No.KPS/4/0723/R	11-03-2004
29	Salinan Surat No.DRK/3/492/R	19-10-2004
30	Copy Surat No.DRK/3/369/R	07-04-2005
31	Copy Surat No.KPI/7/2006	29-09-2006
32	Copy SHM No.241/Pasar Minggu	
33	Copy Laporan Penilaian Aset	
34	List Nilai Taksasi	
35	Copy Telex	
36	Copy Tanda Terima	

Dokumen Perjanjian Kredit (PK) dan Surat Keputusan Kredit (SKK) :

a. Dokumen I:

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Copy SKK No.KPI/2/047	28-05-2003
2	Asli PK No.2003/KPI/30	11-06-2003
3	Asli PPGB No.2003/KPI/PPGB/02	11-06-2003
4	Salinan SKK No.KPS/2/016/R	10-02-2004
5	Asli PK No.2004/KPS/06	11-02-2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Asli P3K No.(1) 2003/KPI/30	11-02-2004
7	Asli P4GB No.(1) 2003/KPI/PPGB/02	11-02-2004
8	Copy Fax No.411943/Rabu/KPS/2	11-02-2004
9	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/06	18-06-2004
10	Asli P3K No.(2) 2003/KPI/30	18-06-2004
11	Asli P4GB No.(2) 2003/KPI/PPGB/02	18-06-2004
12	Asli Tanda Terima	29-06-2004
13	Salinan SKK No.KPS/2/199/R	02-12-2004
14	Asli PK No.2004/KPS/68	02-12-2004
15	Salinan SKK No.KPS/2/205/R	14-12-2004
16	Asli PK No.2004/KPS/69	16-12-2004
17	Copy Tanda Terima	27-12-2004
18	Salinan SKK No.KPS/2/216/R	24-12-2004
19	Asli PK No.2004/KPS/71	27-12-2004
20	Copy Fax No.03.1885/Senin/KPS	27-12-2004
21	Salinan SKK No.KPS/2/001/R	05-01-2005
22	Asli PK No.2005/KPS/01	
23	Salinan SKK No.KPS/2/010/R	17-01-2005
24	Asli PK No.2005/KPS/003	17-01-2005
25	Salinan SKK No.KPS/2/025/R	27-01-2005
26	Asli PK No.2005/KPS/004	27-01-2005
27	Salinan SKK No.KPS/2/027/R	03-02-2005
28	Asli PK No.2005/KPS/005	04-02-2005
29	Salinan SKK No.KPS/2/029/R	15-02-2005
30	Asli PK No.2005/KPS/012	15-02-2005
31	Copy Fax No.14.3767/Rabu/KPS	23-02-2005
32	Asli PK No.2005/KPS/015	22-02-2005
33	Asli PK No.2005/KPS/016	25-02-2005
34	Salinan SKK No.KPS/2/038/R	23-02-2005
35	Salinan SKK No.KPI/2/046/R	08-03-2005
36	Asli PK No.002/KPI/PK/2005	08-03-2005
37	Salinan SKK No.KPI/2/054/R	21-03-2005
38	Asli PK NO.004/KPI/PK/2005	21-03-2005
39	Asli Tanda Terima	21-03-2005
40	Salinan SKK No.KPI/2/060/R	30-03-2005
41	Asli PK No.005/KP1/PK/2005	30-03-2005
42	Asli Tanda Terima	12-04-2005
43	Salinan SKK No.KPI/2/076/R	12-04-2005
44	Asli PK NO.008/KPI/PK/2005	12-04-2005
45	Copy Fax No.21.3499/Rabu/KPI	13-04-2005
46	Salinan SKK No.KPI/2/082/R	21-04-2005
47	Asli PK NO.009/KPI/PK/2005	25-04-2005
48	Copy Fax No.23.2600/Selasa/KPI	26-04-2005
49	Asli Tanda Terima	25-04-2005
50	Salinan SKK No.KPI/2/090/R	06-05-2005
51	Asli PK No.014/KPI/PK/2005	11-05-2005
52	Salinan SKK No.KPI/2/110/R	26-05-2005
53	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/68	06-06-2005
54	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/69	06-06-2005
55	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/71	06-06-2005
56	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/01	06-06-2005
57	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/003	06-06-2005
58	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/004	06-06-2005

Hal. 51 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



59	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/005	06-06-2005
60	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/012	06-06-2005
61	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/015	06-06-2005
62	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/016	06-06-2005
63	Asli P3K No.(1) 002/KPI/PK/2005	06-06-2005
64	Salinan SKK No.KPI/4/127/R	28-06-2005
65	Asli P3K No.(2) 2004/KPS/06	12-07-2005
66	Asli P3K No. (3) 2003/KPI/30	12-07-2005
67	Asli P4GB No.(3) 2003/KPI/PPGB/02	12-07-2005
68	Asli P3K No.(2) 2005/KPS/016	09-08-2006
69	Asli P3K No.(1) 004/KPI/PK/2005	09-08-2006
70	Asli P3K No.(1) 005/KPI/PK/2005	09-08-2006
71	Asli P3K No.(1) 008/KPI/PK/2005	09-08-2006
72	Asli P3K No.(1) 009/KPI/PK/2005	09-08-2006
73	Asli P3K No.(1) 014/KPI/PK/2005	09-08-2006
74	Asli P4GB No.(4) 2003/KPI/PPGB/02	09-08-2006
75	Asli P3K No.(3) 2004/KPS/06	09-08-2006
76	Asli P3K No.(4) 2003/KPI/30	09-08-2006
77	Asli Tanda Terima	12-03-2004

Dokumen II :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Salinan SKK No.W.12/3.1/7134/R	28-11-2001
2.	Asli PK No.01.060	30-11-2001
3.	Asli PK No.01.061	30-11-2001
4.	Asli PPGB No.W.12/01/020	30-11-2001
5.	Salinan SKK No.W.12/3.1/2370/R	21-06-2002
6.	Asli PK No.02.036	25-06-2002
7.	Salinan SKK No.W. 12/3.1/3976/R	01-08-2002
8.	Addendum PPGB No.(1) W.12/01/020	01-08-2002
9.	Salinan SKK No.W.12/3.1/4805/R	08-10-2002
10.	Asli PK No.02.071	09-10-2002
11.	Salinan SKK No.W.12/3.1/6700/R	27-10-2002
12.	Asli PK No.02.108	29-10-2002
13.	Asli PPGB No.W.12/02/027	29-11-2002
14.	Salinan SKK No.W.12/3.1/1233/R	28-03-2003
15.	Asli PK No.03024	31-03-2003
16.	Copy SKK No.KPI/057	19-06-2003
17.	Asli PK No.2003/KPI/32	26-02-2003
18.	Asli PK No. 2003/KPI/33	26-03-2003
19.	Copy Surat No.07/WW/V/2003	03-05-2003
20.	Asli PK No.2003/KPI/24	26-03-2003
21.	Copy Surat No.21/WW/V/2003	09-06-2003
22.	Salinan SKK No.KPI/2/071/R	15-07-2003
23.	Asli PK No.2003/KPI/40	16-07-2003
24.	Asli PK No.2003/KPI/41	16-07-2003
25.	Salinan SKK No.KPI/2/102/R	03-09-2003
26.	Asli PK No.2003/KPI/58	04-09-2003
27.	Asli PK No.2003/KPI/59	04-09-2003
28.	Asli PK No.2003/KPI/60	04-09-2003
29.	Asli PK No.2003/KPI/61	04-09-2003
30.	Copy SKK No. KPI/2/134/R	16-10-2003
31.	Asli PK No.2003/KPI/76	16-10-2003
32.	Asli PK No.2003/KPI/77	16-03-2003
33.	Asli PK No.2003/KPI/78	16-03-2003
34.	Asli PK No.2003/KPI/79	16-03-2003
35.	Asli Tanda Terima	22-10-2003
36.	Salinan SKK No.KPI/2/188/R	08-12-2003
37.	Asli PK No.2003/KPI/99	08-12-2003
38.	Asli PK No.2003/KPI/100	08-12-2003
39.	Copy SKK No.KPS/2/008/R	20-01-2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Asli PK No.2004/KPS/03	20-01-2004
41.	Salinan SKK No.KPS/2/011/R	30-01-2004
42.	Asli PK No.2004/KPS/04	03-02-2004
43.	Asli PK No.2004/KPS/05	03-02-2004
44.	Copy SKK No.KPS/2/028/R	19-02-2004
45.	Asli PK No.2004/KPS/14	24-02-2004
46.	Copy Fax No.44.2186/Rabu/KPS	25-02-2004
47.	Salinan SKK No.KPS/2/030/R	04-03-2004
48.	Asli PK No.2004/KPS/15	08-03-2004
49.	Salinan SKK No.KPS/2/033/R	19-03-2004
50.	Asli PK No.2004/KPS/16	23-03-2004
51.	Salinan SKK No.KPS/2/039/R	02-04-2004
52.	Asli PK No.2004/KPS/18	02-04-2004
53.	Salinan SKK No.KPS/2/042/R	19-04-2004
54.	Asli PK No.2004/KPS/19	19-04-2004
55.	Salinan SKK No.KPS/2/079/R	16-06-2004
56.	Salinan SKK No.KPS/2/081/R	17-06-2004
57.	Asli PK No.2004/KPS/29	18-06-2004
58.	Copy SKK No.KPS/2/104/R	
59.	Asli PK No.2004/KPS/40	29-06-2004
60.	Salinan SKK No.KPS/2/114/R	19-07-2004
61.	Asli PK No.2004/KPS/43	20-07-2004
62.	Salinan SKK No.KPS/2/122/R	09-08-2004
63.	Asli PK No.2004/KPS/47	10-08-2004
64.	Salinan SKK No.KPS/2/131/R	19-08-2004
65.	Asli PK No.2004/KPS/49	20-08-2004
66.	Salinan SKK No.KPS/2/140/R	30-08-2004
67.	Asli PK No.2004/KPS/50	31-08-2004
68.	Salinan SKK No.KPS/2/148/R	14-09-2004
69.	Asli PK No.2004/KPS/54	15-09-2004
70.	Salinan SKK No.KPS/2/155/R	27-09-2004
71.	Asli PK No.2004/KPS/54	27-09-2004
72.	Asli Tanda Terima	12-10-2004
73.	Salinan SKK No.KPS/2/166/R	15-10-2004
74.	Asli PK No.2004/KPS/57	15-04-2004
75.	Salinan SKK No.KPS/2/171/R	27-10-2004
76.	Asli PK No.2004/KPS/60	28-10-2004
77.	Salinan SKK No.KPS/2/181/R	10-11-2004
78.	Asli PK No.2004/KPS/64	10-11-2004
79.	Asli Tanda Terima	16-12-2004
80.	Salinan SKK No.KPI/12/214/R	21-04-2005
81.	Monitoring KMK Transaksional	
82.	Copy Fax No.16.4365/Jum'45/KPI	20-06-2003

Dokumen Kontrak Kerja PT.Lima Jayakarta Utama :

Dokumen I :

No.	URAIAN/ DOKUMEN	TANGGAL
1.	Asli KK No.0171/SP-06/LIMEC/2003	30-06-2003
2.	Asli KK No.0162/SP-06/LIMEC/2003	30-06-2003
3.	Asli KK No.0167/SP-06/LIMEC/2003	30-06-2003
4.	Asli KK No.0182/SP-07/LIMEC/2003	25-07-2003
5.	Asli KK No.0186/SPP/LIMEC/2003	28-07-2003
6.	Asli KK No.0192/SP-09/LIMEC/2003	05-09-2003
7.	Asli KK No.0197/SP-09/LIMEC/2003	09-09-2003
8.	Asli KK No.0202/SP-09/LIMEC/2003	15-09-2003
9.	Asli KK No.0119/SP-09/LIMEC/2003	11-09-2003
10.	Asli KK No.0214/SP-10/LIMEC/2003	17-10-2003
11.	Asli KK No.0219/SP-10/LIMEC/2003	10-10-2003
12.	Asli KK No.0217/SP-12/LIMEC/2003	22-10-2003
13.	Asli KK No.0229/SP-12/LIMEC/2003	12-12-2003
14.	Asli KK No.0221/SP-10/LIMEC/2003	13-10-2003
15.	Asli KK No.0233/SP-12/LIMEC/2003	16-12-2003
16.	Asli KK No.034/SP-1/LIMEC/2003	06-02-2004
17.	Asli KK No.038/SP-1/LIMEC/2004	11-02-2004

Hal. 53 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Asli KK No.043/SP-II/LIMEC/2004	16-02-2004
19.	Asli KK No.045/SP-II/LIMEC/2004	17-02-2004
20.	Asli KK No.046/SP-II/LIMEC/2004	16-02-2004
21.	Asli KK No.050/SP-II/LIMEC/2004	24-02-2004
22.	Asli KK No.049/SP-II/LIMEC/2004	20-02-2004
23.	Asli KK No.047/SP-II/LIMEC/2004	24-02-2004
24.	Asli KK No.051/SP-II/LIMEC/2004	26-02-2004
25.	Asli KK No.054/SP-II/LIMEC/2004	27-02-2004
26.	Asli PK No.056/SP-II/LIMEC/2004	01-03-2004
27.	Asli KK No.057/SP-II/LIMEC/2004	02-03-2004
28.	Asli KK No.130/SP-IV/LIMEC/2004	22-03-2004
29.	11 Addendum	29-08-2005
30.	Ali Tanda Terima	15-04-2004

Dokumen II :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Asli KK No.435/SP-IX/LIMEC/2004	09-09-2004
2.	Asli KK No.438/SP-IX/LIMEC/2004	09-09-2004
3.	Asli KK No.446/SP-IX/LIMEC/2004	15-09-2004
4.	Asli KK No.450/SP-IX/LIMEC/2004	17-09-2004
5.	Asli KK No.455/SPP-IX/LIMEC/2004	20-09-2004
6.	Asli KK No.458/SP-IX/LIMEC/2004	21-09-2004
7.	Asli KK No.460/SP-IX/LIMEC/2004	22-09-2004
8.	Asli KK No.465/SP-IX/LIMEC/2004	24-09-2004
9.	Asli KK No.469/SP-IX/LIMEC/2004	27-09-2004
10.	Asli KK No.472/SP-IX/LIMEC/2004	30-09-2004
11.	Asli KK No.476/SP-IX/LIMEC/2004	01-10-2004
12.	Asli KK No.480/SP-IX/LIMEC/2004	04-10-2004
13.	Asli KK No.482/SP-IX/LIMEC/2004	05-10-2004
14.	Asli KK No.490/SP-IX/LIMEC/2004	08-10-2004
15.	Asli KK No.496/SP-IX/LIMEC/2004	11-10-2004
16.	Asli KK No.504/SP-IX/LIMEC/2004	14-10-2004
17.	Asli KK No.508/SP-IX/LIMEC/2004	15-10-2004
18.	Asli KK No.512/SP-IX/LIMEC/2004	18-10-2004
19.	Asli KK No.515/SP-IX/LIMEC/2004	22-10-2004
20.	Asli KK No.520/SP-IX/LIMEC/2004	25-10-2004
21.	Asli KK No.369/SP-VIII/LIMEC/2004	13-10-2004
22.	Asli KK No.376/SP-VIII/LIMEC/2004	16-08-2004
23.	Asli KK No.382/SP-VIII/LIMEC/2004	19-08-2004
24.	Asli KK No.385/SP-VIII/LIMEC/2004	20-08-2004
25.	Asli KK No.389/SP-VIII/LIMEC/2004	23-08-2004
26.	Asli PK No.394/SP-VIII/LIMEC/2004	25-08-2004
27.	Asli KK No.398/SP-VIII/LIMEC/2004	27-08-2004
28.	Asli KK No.402/SP-VIII/LIMEC/2004	27-08-2004
29.	Asli KK No.407/SP-VIII/LIMEC/2004	29-08-2005
30.	Asli KK No.410/SP-VIII/LIMEC/2004	30-08-2004
31.	Asli KK No.415/SP-IX/LIMEC/2004	01-09-2004
32.	Asli KK No.419/SP-IX/LIMEC/2004	02-09-2004
33.	Asli KK No.422/SP-IX/LIMEC/2004	03-09-2004
34.	Asli KK No.526/SP-X/LIMEC/2004	27-10-2004
35.	Asli KK No.531/SP-X/LIMEC/2004	01-11-2004
36.	Asli KK No.333/SP-VII/LIMEC/2004	28-07-2004
37.	Asli KK No.340/SP-VII/LIMEC/2004	30-07-2004
38.	Asli KK No.343/SP-VII/LIMEC/2004	20-08-2004
39.	Asli KK No.347/SP-VII/LIMEC/2004	05-08-2004
40.	Asli KK No.356/SP-VII/LIMEC/2004	09-08-2004
41.	Asli KK No.365/SP-VIII/LIMEC/2004	10-08-2004
42.	Asli KK No.368/SP-VIII/LIMEC/2004	12-08-2004
43.	Asli KK No.644/SP-VII/LIMEC/2004	13-08-2004
44.	Asli KK No.652/SP-VII/LIMEC/2004	24-12-2004
45.	Asli KK No.653/SP-VII/LIMEC/2004	30-12-2004
46.	Asli KK No.653/SP-VII/LIMEC/2004	30-12-2004
47.	Asli KK No.654/SP-VII/LIMEC/2004	31-12-2004
48.	Asli KK No.001SP-I/LIMEC/2004	03-12-2004
49.	Asli KK No.607/SP-XII/LIMEC/2004	13-12-2004
50.	Asli KK No.612/SP-XII/LIMEC/2004	15-12-2004
51.	Asli KK No.615/SP-XII/LIMEC/2004	17-12-2004

Hal. 54 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Asli KK No.618/SP-XII/LIMEC/2004	20-12-2004
53.	Asli KK No.548/SP-XI/LIMEC/2004	17-11-2004
54.	Asli KK No.552/SP-XI/LIMEC/2004	19-11-2004
55.	Asli KK No.588/SP-XI/LIMEC/2004	02-12-2004
56.	Asli KK No.592/SP-XI/LIMEC/2004	03-12-2004
57.	Asli KK No.596/SP-XI/LIMEC/2004	03-12-2004
58.	Asli KK No.601/SP-XI/LIMEC/2004	06-12-2004
59.	Asli KK No.002/SP-I/LIMEC/2004	03-01-2004
60.	Asli KK No.004/SP-XI/LIMEC/2004	04-01-2005
61.	Asli KK No.009/SP-XI/LIMEC/2005	07-01-2005
62.	Asli KK No.011/SP-XI/LIMEC/2005	10-02-2005
63.	Asli KK No.012/SP-XI/LIMEC/2005	10-01-2005
64.	Asli KK No.015/SP-XI/LIMEC/2005	11-01-2005
65.	Asli KK No.018/SP-XI/LIMEC/2005	14-01-2005
66.	Asli KK No.020/SP-XI/LIMEC/2005	17-01-2005
67.	Asli KK No.026/SP-XI/LIMEC/2005	20-01-2005
68.	Asli KK No.025/SP-XI/LIMEC/2005	20-01-2005
69.	Asli KK No.028/SP-XI/LIMEC/2005	24-01-2005
70.	Asli KK No.033/SP-XI/LIMEC/2005	27-01-2005
71.	Asli KK No.037/SP-XI/LIMEC/2005	01-02-2005
72.	Asli KK No.046/SP-II/LIMEC/2005	03-02-2005
73.	Asli KK No.048/SP-II/LIMEC/2005	07-02-2005
74.	Asli KK No.051/SP-II/LIMEC/2005	14-02-2005
75.	Asli KK No.053/SP-II/LIMEC/2005	15-02-2005
76.	Asli KK No.091/SP-II/LIMEC/2005	10-03-2005
77.	Asli KK No.088/SP-III/LIMEC/2005	08-03-2005
78.	Asli KK No.085/SP-III/LIMEC/2005	07-03-2005
79.	Asli KK No.082/SP-III/LIMEC/2005	04-03-2005
80.	Asli KK No.076/SP-III/LIMEC/2005	03-03-2005
81.	Asli KK No.073/SP-III/LIMEC/2005	01-03-2005
82.	Asli KK No.069/SP-II/LIMEC/2005	28-02-2005
83.	Asli KK No.066/SP-II/LIMEC/2005	25-02-2005
84.	Asli KK No.046/SP-II/LIMEC/2005	08-02-2005
85.	Asli KK No.048/SP-II/LIMEC/2005	11-02-2005
86.	Asli KK No.051/SP-II/LIMEC/2005	14-02-2005
87.	Asli KK No.053/SP-II/LIMEC/2005	15-02-2005
88.	Asli KK No.136/SP-IV/LIMEC/2005	15-02-2005
89.	Asli KK No.130/SP-IV/LIMEC/2005	11-04-2005
90.	Asli KK No.096/SP-III/LIMEC/2005	14-03-2005
91.	Asli KK No.099/SP-III/LIMEC/2005	17-03-2005
92.	Asli KK No.106/SP-III/LIMEC/2005	21-03-2005
93.	Asli KK No.108/SP-III/LIMEC/2005	24-03-2005
94.	Asli KK No.148/SP-III/LIMEC/2005	25-04-2005
95.	Asli KK No.144/SP-IV/LIMEC/2005	21-04-2005
96.	Asli KK No.164/SP-IV/LIMEC/2005	28-04-2005
97.	Asli KK No.112/SP-III/LIMEC/2005	28-03-2005
98.	Asli KK No.115/SP-III/LIMEC/2005	31-03-2005
99.	Asli KK No.266/SP-VII/LIMEC/2005	12-06-2004
100.	Asli KK No.269/SP-VII/LIMEC/2004	13-06-2004
101.	Asli KK No.276/SP-VII/LIMEC/2004	14-06-2004
102.	Asli KK No.288/SP-VII/LIMEC/2004	16-06-2004
103.	Asli KK No.294/SP-VII/LIMEC/2004	20-06-2004
104.	Asli KK No.306/SP-VII/LIMEC/2004	21-07-2004
105.	Asli KK No.310/SP-VII/LIMEC/2004	21-07-2004
106.	Asli KK No.321/SP-VII/LIMEC/2004	23-07-2004
107.	Asli KK No.327/SP-VII/LIMEC/2004	26-03-2004
108.	Asli KK No.335/SP-VII/LIMEC/2004	27-07-2004
109.	Asli KK No.218/SP-VI/LIMEC/2004	23-06-2004
110.	Asli KK No.222/SP-VI/LIMEC/2004	25-06-2004
111.	Asli KK No.230/SP-VI/LIMEC/2004	28-06-2004
112.	Asli KK No.243/SP-VI/LIMEC/2004	30-06-2004
113.	Asli KK No.248/SP-VII/LIMEC/2004	02-07-2004
114.	Asli KK No.256/SP-VII/LIMEC/2004	06-07-2004
115.	Asli KK No.259/SP-VII/LIMEC/2004	08-07-2004
116.	Asli KK No.266/SP-VII/LIMEC/2004	09-07-2004
117.	Asli KK No.167/SP-V/LIMEC/2004	10-05-2004
118.	Asli KK No.174/SP-V/LIMEC/2004	14-05-2004
119.	Asli KK No.184/SP-V/LIMEC/2004	17-05-2004
120.	Asli KK No.190/SP-V/LIMEC/2004	24-05-2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.	Asli KK No.193/SP-V/LIMEC/2004	28-05-2004
122.	Asli KK No.195/SP-VI/LIMEC/2004	04-06-2004
123.	Asli KK No.198/SP-VI/LIMEC/2004	10-06-2004
124.	Asli KK No.100/SP-VI/LIMEC/2004	14-06-2004
125.	Asli KK No.206/SP-VI/LIMEC/2004	16-06-2004
126.	Asli KK No.214/SP-VI/LIMEC/2004	21-06-2004
127.	Asli KK No.68/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
128.	Asli KK No.71/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
129.	Asli KK No.073/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
130.	Asli KK No.075/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
131.	Asli KK No.77/SP-III/LIMEC/2004	11-03-2004
132.	Asli KK No.081/SP-III/LIMEC/2004	12-03-2004
133.	Asli KK No.84/SP-III/LIMEC/2004	16-03-2004
134.	Asli KK No.74/SP-III/LIMEC/2004	19-03-2004
135.	Asli KK No.82/SP-III/LIMEC/2004	26-03-2004
136.	Asli KK No.77/SP-III/LIMEC/2004	23-03-2004
137.	Asli KK No.68/SP-III/LIMEC/2004	15-03-2004
138.	Asli KK No.86/IV/LIMEC/2004	05-04-2004
139.	Asli KK No.89/SP-IV/LIMEC/2004	06-04-2004
140.	Asli KK No.90/SP-IV/LIMEC/2004	12-04-2004
141.	Asli KK No.93/SP-IV/LIMEC/2004	14-04-2004
142.	Asli KK No.42 Addendum	

Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) PT.Lima Jayakarta Utama :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SPK No. 410/LIMEC/IX/2004	08-09-2004
2	Asli SPK No. 411/WW/III/2004	30-08-2004
3	Asli SPK No. 423/WW/IX/2004	03-09-2004
4	Asli SPK No. 428/WW/IX/2004	06-09-2004
5	Asli SPK No. 432/WW/IX/2004	08-09-2004
6	Asli SPK No. 434/WW/IX/2004	09-09-2004
7	Asli SPK No. 436/WW/IX/2004	10-09-2004
8	Asli SPK No. 459/LIMEC/IX/2004	22-09-2004
9	Asli SPK No. 444/WW/IX/2004	14-09-2004
10	Asli SPK No. 449/WW/IX/2004	16-09-2004
11	Asli SPK No. 454/WW/IX/2004	17-09-2004
12	Asli SPK No. 457/WW/IX/2004	20-09-2004
13	Asli SPK No. 462/WW/IX/2004	21-09-2004
14	Asli SPK No. 466/WW/IX/2004	22-09-2004
15	Asli SPK No. 497/LIMEC/X/2004	
16	Asli SPK No. 475/WW/IX/2004	24-09-2004
17	Asli SPK No. 478/WW/IX/2004	29-09-2004
18	Asli SPK No. 481/WW/X/2004	01-10-2004
19	Asli SPK No. 486/WW/X/2004	04-10-2004
20	Asli SPK No. 489/WW/X/2004	06-10-2004
21	Asli SPK No. 494/WW/X/2004	08-10-2004
22	Asli SPK No. 498/WW/X/2004	11-10-2004
23	Asli SPK No. 502/WW/X/2004	12-12-2004
24	Asli SPK No. 366/LIMECA/111/2004	18-08-2004
25	Asli SPK No. 348/WW/VI/11/2004	04-08-2004
26	Asli SPK No. 354/WW/VI/11/2004	06-08-2004
27	Asli SPK No. 357/WW/VI/11/2004	09-08-2004

Hal. 56 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Asli SPK No. 361/WWA/III/2004	11-08-2004
29	Asli SPK No. 364/WW/VI11/2004	13-08-2004
30	Asli SPK No. 369/WW/VI11/2004	16-08-2004
31	Asli SPK No. 398/LIMECA/111/2004	27-08-2004
32	Asli SPK No. 377/WW/VIII/2004	18-08-2004
33	Asli SPK No. 378/WW/VI11/2004	18-08-2004
34	Asli SPK No. 388/WW/VI11/2004	20-08-2004
35	Asli SPK No. 390/WW/VI11/2004	20-08-2004
36	Asli SPK No. 396/WW/VI11/2004	23-08-2004
37	Asli SPK No. 401 /WW/VI11/2004	25-08-2004
38	Asli SPK No. 404/WW/VI11/2004	26-08-2004
39	Asli SPK No. 524/LIMEC/X/2004	26-10-2004
40	Asli SPK No. 507/WW/X/2004	18-10-2004
41	Asli SPK No. 512/WW/X/2004	22-10-2004
42	Asli SPK No. 278/LIMECA/II/2004	03-08-2004
43	Asli SPK No. 292/WW/II/2004	19-07-2004
44	Asli SPK No. 301/WW/II/2004	21-07-2004
45	Asli SPK No. 312/WWA/I /2004	23-07-2004
46	Asli SPK No. 319/WW/VI /2004	26-07-2004
47	Asli SPK No. 324/WW/II/2004	28-07-2004
48	Asli SPK No. 328/WW/II/2004	29-07-2004
49	Asli SPK No. 335/WW/VI /2004	02-08-2004
50	Asli SPK No. 342/WW/II/2004	03-08-2004
51	Asli SPK No. 631 /LIMEC/XII/2004	21-12-2004
52	Asli SPK No. 582/WW/XII/2004	15-12-2004
53	Asli SPK No. 587/WW/XII/2004	20-12-2004
54	Asli SPK No. 632/LIMEC/XII/2004	22-12-2004
55	Asli SPK No. 592/WW/XII/2004	20-12-2004
56	Asli SPK No. 595/WW/XII/2004	21-12-2004
57	Asli SPK No. 596/WW/XII/2004	22-12-2004
58	Asli SPK No. 625/LIMEC/XII/2004	10-12-2004
59	Asli SPK No. 560/WW/XII/2004	2-12-2004
60	Asli SPK No. 564/WW/XII/2004	6-12-2004
61	Asli SPK No. 566/WW/XII/2004	7-12-2004
62	Asli SPK No. 570/WW/XII/2004	9-12-2004
63	Asli SPK No. 539/LIMEC/X1/2004	8-11-2004
64	Asli SPK No. 522/WW/XI/2004	03-11-2004
65	Asli SPK No. 528/WW/XI/2004	05-11-2004
66	Asli SPK No. 576/LIMEC/XII/2004	01-12-2004
67	Asli SPK No. 544/WW/XI/2004	22-11-2004
68	Asli SPK No. 547/VWV/XI/2004	24-11-2004
69	Asli SPK No. 552/WW/XI/2004	26-11-2004
70	Asli SPK No. 556/WW/XI/2004	30-11-2004
71	Asli SPK No. 003/LIMEC/I/2005	3-01-2005
72	Asli SPK No. 598/WW/XII/2004	23-12-2004
73	Asli SPK No. 602/WW/XII/2004	24-12-2004

Hal. 57 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Asli SPK No. 608/WW/XII/2004	28-12-2004
75	Asli SPK No. 612/WW/XII/2004	30-12-2004
76	Asli SPK No. 614/WW/XII/2004	30-12-2004
77	Asli SPK No. 008/LIMEC/I/2005	13-01-2005
78	Asli SPK No. 002/WW/I/2005	13-01-2005
79	Asli SPK No. 004/WW/I/2005	06-01-2005
80	Asli SPK No. 006/WW/I/2005	10-01-2005
81	Asli SPK No. 010/WW/I/2005	12-01-2005
82	Asli SPK No. 030/LIMEC/I/2005	25-01-2005
83	Asli SPK No. 012/WW/I/2005	14-01-2005
84	Asli SPK No. 015/VWV/I/2005	18-01-2005
85	Asli SPK No. 018/WW/I/2005	20-01-2005
86	Asli SPK No. 021/WW/I/2005	24-01-2005
87	Asli SPK No. 042/LIMEC/II/2005	01-02-2005

Dokumen Legalitas Usaha PT. Lima Jayakarta Utama :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Copy Salinan Akta Berita Acara PT.LJU No.17	20-08-2004
2.	Copy Salinan Akta Berita Acara PT.LJU No.21	31-01-2003
3.	Copy Notulen RUPS PT.LJU	19-10-2001
4.	Copy Salinan Akta PKR PT.LJU No.10	22-11-2001
5.	Copy Keputusan MENKEH R.I No.C-10890 HT.01.04.TH.99	10-06-1999
6.	Copy Data Akta Perubahan AD Perseroan	16-12-1998
7.	Copy Salinan Akta Perbaikan No. 92	16-12-1998
8.	Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat No.47	06-03-1998
9.	Copy Salinan Risalah Rapat No.115	18-07-1991
10.	Copy Salinan Akta PT.Limec No.45	18-06-1973
11.	Copy KTP-KTP	
12.	Copy NPWP No. 1.313.973.8-001 a.n PT.LJU	
13.	Copy NPWP No.4.050.261.9-001 a.n Stephanus	
14.	Copy TDP No.090414509828	25-07-2001
15.	Copy SIUP No.1.689/8277-P/09-05/PB/VIII/94	08-08-1994
16.	Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.12/1.824.511/XII/2004	10-12-2004
17.	Copy Kartu Gapensi No.09.72.11.1315.98.06584	17-02-2004
18.	Copy Sertifikat Gapensi No.09.05.6584	18-06-2003
19.	Copy Sertifikat Gapensi No.09.05.6584	14-02-2001
20.	Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi No.0905.2.83.91.09575	09-08-1994
21.	Copy Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri No.146/STP-LN/BUPP-3/I/2002	17-01-2002

Hal. 58 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Dokumen Aplikasi Kredit PT Lima Jayakarta Utama : Buku I:

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl.	Keterangan
1	Asli Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A)	-	28.04.2003	Permohonan Fasilitas Plafond KMK dan GB PT LJU
	Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK/PAK-01)	KPI/2/30	02.05.2003	
2	Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK/PAK-02/2)			Tambahan KMK maks. Rp. 26 M, KMK Trx maks. Rp. 39 M, & plafond GB maks. Rp. 2 M.
3	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK/PAK-02/1)	ARK/1/030	17.04.2003	Tambahan KMK maks. Rp. 26 M, KMK Trx maks. Rp. 39 M, & plafond GB maks. Rp. 2 M.
4	Foto copy Pengawasan Sirkulasi (BNI- 134 A)	73	15.11.2002	Permohonan Perpanjangan sekaligus tambahan fasilitas kredit an. PTLJU
	Fotocopy Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK/PAK-01)	73	15.11.2002	
				- Usulan
5	Fotocopy Memorandum Pengusulan Kredit (PAK-02/2)			tambahan KMK semula Rp. 11,4 M menjadi sebesar Rp. 18 M - Garansi Bank maks. Rp. 2 M
6	Fotocopy Memorandum Analisa Kredit (MAK/PAK02/1)	73	15.11.2002	perpanjangan dan tambahan KMK Rp. 11,4 M menjadi sebesar Rp. 18 M - Garansi Bank maks. Rp. 2 M
7	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)	.	02.01.2004	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB) PAK 03/2	.	02.01.2004	
9	Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB) PAK 03/2		14.04.2003	
10	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)		28.03.2003	
11	Fotocopy Formulir Informasi Bisnis (FIB/PAK 03/2)		13.11.2002	
12	Fotocopy Formulir Informasi Umum (FIU/PAK 03/1)		13.11.2002	—
13	Asli Formulir Proyeksi Analisa Keuangan (FAK)			Realisasi 31.12.2002, Proyeksi s/d 31.12.2006
14	Asli Formulir Analisa Keuangan (PAK- 04)	-	-	Audited 31.12.1999 s/d 31.12.2006, Home Statement 30.09.2003
	Asli Formulir Proyeksi Analisa Keuangan (FAK)	-	-	Realisasi 30.09.2003,
15				proyeksi s/d 31.12.2006
16	Asli Formulir Analisa Keuangan (PAK- 04)	-	-	Audited 31.12.1999 s/d 31.12.2006 Home Statement 31.12.2002
17	Foto copy Formulir Analisa Keuangan (FAK)-PAK 04/1		13.11.2002	Homestatement 31.12.1998-30.09.2002
18	Foto copy Formulir Analisa Keuangan (FAK)-PAK 04/1		13.11.2002	Homestatement 31.12.1998-30.09.2002
19	Asli Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK 05/1)		02.01.2004	
20	Asli Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK 05/1)		14.04.2003	

Hal. 60 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Asli Customer Risk Rating Form	-	14.04.2003	-
22	Foto copy Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK-05/1)	—	13.11.2002	
23	Foto copy Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK-05/1)		13.11.2002	
24	Foto copy Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK 06/1)		13.11.2002	
25	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1016 /R	16.05.2005	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
26	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/082/ R	21.04.2005	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
27	Asli Surat KPS	KPS/2/205/ R	14.12.2004	Permohonan disposisi KMK Transaksional
28	Asli Surat KPS	KPS/2/152/3/ R	02.06.2004	Review Bunga
29	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/042/ R	19.04.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
30	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/033/ R	19.03.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
31	Asli Surat KPS	KPS/2/103 8/R	15.04.2004	Review Bunga
32	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/076/ R	12.04.2005	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
33	Konsep Surat Divisi Korporasi	KPI/2/ /R	12.04.2005	Permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
34	Konsep Surat Divisi Korporasi	KPI/2/ /R	21.04.2005	Permohonan disposisi KMK Transaksional

Hal. 61 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/039/ R	02.04.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
36	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/067 0/R	09.03.2004	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
37	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/030/ R	04.03.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
38	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/028/ R	19.02.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
39	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/011/ R	30.01.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
40	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/008/ R	20.01.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
41	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/155/ R	08.01.2004	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
42	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/188/ R	08.12.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
43	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/3085 /R	05.12.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
44	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/2746 /R	03.11.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara

Hal. 62 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Fotocopy Surat Divisi Korporasi	KPI/2/134/ R	16.10.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
46	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/2463 /R	01.10.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
47	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/2193 /R	03.09.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
48	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/102/ R	03.09.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
49	Fotocopy Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1918 /R	06.08.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
50	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/9/1776 /R	24.07.2003	Perihal tagihan biaya pspk
51	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1/05 7	19.06.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
52	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/071/ R	15.07.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
53	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1585 /R	02.07.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/047	28.05.2003	Perihal permohonan tambahan plafond KMK Saudara
55	Fotocopy Surat BNI Wilayah 12	W 12/3.1/670 0/R	27.11.2002	Persetujuan Kredit
56	Asli Nota Intern unit Analisa Risiko Kredit	KPS/9/188	24.05.2004	MAK an. PT. LJU
57	Asli Nota Intern unit Analisa Risiko Kredit	KPS/2/177	12.05.2004	Tambahan data an. PT. LJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Asli Nota Intern unit Analisa Risiko Kredit	KPS/2/140	22.04.2004	Permohonan Tambahan & Review Fasilitas an. PT. LJU
59	Asli Memo Divisi Analisa Resiko Kredit	ARK/2/009	06.01.2004	Penyampaian PAK interim an. PT. LJU
60	Asli Memo Divisi Korporasi Satu	KPS/2/314 4	30.12.2003	Tambahan data an. PT. LJU
61	Fotocopy Memo Divisi Analisa Resiko Kredit	ARK/2/147	22.10.2003	Permintaan data an. Hatada masindo & LPT. LJU
62	Asli Memo Pengantar	KPS/2/260 6	17.10.2003	Permohonan Penambahan KMK an. PT. LJU
63	Asli Memo unit Analisa Risiko Kredit	ARK/2/150	17.04.2003	Penyampaian PAK baru an. PT. LJU
64	Asli Memo Unit Analisa resiko Kredit	ARK/2/117	28.03.2003	CRR an. PT. LJU
65	Asli Memo Pengantar	KPI/2/686	21.03.2003	PP baru plafond KMK an. PT. LJU
66	Asli & Fotocopy Fax Message	65.839/KP S/Rabu	09.06.2004	Perpanjangan Sementara fasilitas KMK an. PT. LJU
67	Asli & Fotocopy Fax Message	57.1908/Se nin/KPS	19.04.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
68	Asli Fax Message	54.1940/Ju mat/KPS	02.04.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
69	Asli & Fotocopy Fax Message	51.2046/sel asa/KPS	23.03.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
70	Asli Fax Message	47.1946/Se nin/KPS	08.03.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU

Hal. 64 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Asli Fax Message	44.2186/Rabu/KPS	25.02.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
72	Asli Fax Message	411943/Rabu/KPS/2	11.02.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
73	Asli Fax Message	40.2219/Seleasa/KPS	03.02.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
74	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/020 8	27.01.2004	Referensi debitur
75	Asli Fax Message	39 2196/Rabu/KPS	21.01.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
76	Asli Surat Kantor Cabang Cikampek	CKP/4/95/ R	19.01.2004	Referensi debitur
77	Asli Fax Message	36.3671/Seleasa/KPS	09.12.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
78	Asli Fax Message	25 3384/Jumat/KPS	17.10.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
79	Asli Fax Message	23 3927/Kamis/KPI	04.09.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU No. baru 23.4314/Kamis/K PI tgl. 08.09.2003
80	Asli Fax Message	18.3793/Rabu/KPI	16.07.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
81	Asli Fax Message	18.3793/Rabu/KPI	16.07.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU

Hal. 65 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Asli Fax Message	14 2663/Rabu/ KPI		Penandatanganan PK fasilitas KMK dan PPGB an. PT. LJU
83	Asli Surat Kantor Wilayah 12	W.12/3.1/1 239/R	31.03.2003	Informasi Debitur
84	Fotocopy Fax Message	16.4362/Ju mat/KPI	20.06.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
85	Asli Fax Message	16.4362/Ju mat/KPI ft MT	20.06.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
86	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/687	21.03.2003	Perihal Informasi Debitur
87	Asli Monitoring KMK Transaksional Maks. 68 M PT. LJU			
88	Foto copy Kartu pengawasan plafond Garansi Bank maks plafond 2M			
89	Foto copy Kartu pengawasan plafond Garansi Bank maks plafond 2M			
90	Informasi Bank Indonesia 2 set	1/624620/D PIP/DtB/Rh s KPI/9/453/	03.11.2003	
91	Informasi Bank Indonesia	1/440026/D PIP/DtB/Rh s	04.04.2003	
92	Informasi Bank Indonesia	1/438243/D PIP/DtB/Rh s	01.04.2003	
93	Fotocopy Surat PT. LJU	0112/LIMEC/ V/2004	15.04.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
94	Asli Surat PT. LJU	105/LIMEC/ V/2004	14.04.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
95	Asli Surat PT. LJU	077/LIMEC/ V/2004	01.04.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.

Hal. 66 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Asli Surat PT. LJU	063/LIMEC/II/2004	18.03.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
97	Asli Surat PT. LJU	049/LIMEC/II/2004	03.03.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
98	Asli Surat PT. LJU	040/LIMEC/I/2003	19.02.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
99	Asli Surat PT. LJU	023/LIMEC/I/2003	30.01.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
100	Asli Surat PT. LJU	07/LIMEC/I/2003	16.01.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
101	Asli Surat PT. LJU	201/LIMEC/XI/2003	05.12.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
102	Asli Surat PT. LJU	-	03.11.2003	-
103	Asli Surat PT. LJU	0181/LIMEC/X/2003	16.10.2003	Permohonan Tambahan Kredit
103 A	Asli Surat PT. LJU	150/LIMEC/A/III/2003	27.08.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
104	Asli Surat PT. LJU	126/LIMEC/VI/2003	10.07.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
105	Asli Surat PT. LJU	113/LIMEC/VI/2003	18.06.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
106	Asli Surat PT. LJU	176/LIMEC/X/2003	14.10.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
107	Asli Surat PT. LJU	116/LIMEC/MI/2003	20.03.2003	Permohonan Kredit
108	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (PAK 06)		23.12.2003	
109	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (PAK 06)		09.04.2003	

Hal. 67 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	Foto copy Kaji Ulang RM dan kelompok Divisi Korporasi	101/WW/IV/2004	13.04.2004	periode Jan - Des 2003 Penunjukkan Langsung
111	Asli Surat PT. Widya Wahana			
112	Asli Surat PT. Widya Wahana	085/WW/3/2004	31.03.2004	Penunjukkan Langsung
113	Asli Surat PT. Widya Wahana	081/WW/3/2004	29.03.2004	Penunjukkan Langsung
114	Asli Surat PT. Widya Wahana	076/WW/3/2004	26.03.2004	Penunjukkan Langsung
115	Asli Surat PT. Widya Wahana	072/WW/3/2004	24.03.2004	Penunjukkan Langsung
116	Asli Surat PT. Widya Wahana	069/WW/3/2004	17.03.2004	Penunjukkan Langsung
117	Asli Surat PT. Widya Wahana	061/WW/3/2004	12.03.2004	Penunjukkan Langsung
118	Asli Surat PT. Widya Wahana	057/WW/3/2004	09.03.2004	Penunjukkan Langsung
119	Asli Surat PT. Widya Wahana	052/WW/III/2004	05.03.2004	Penunjukkan Langsung
120	Asli Surat PT. Widya Wahana	034/WW/II/2004	03.03.2004	Penunjukkan Langsung
121	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	048/PTT/II/2004	02.03.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
122	Asli Surat PT. Widya Wahana	031/WW/II/2004	01.03.2004	Penunjukkan Langsung
123	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	046/PTT/II/2004	26.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
124	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	042/PTT/II/2004	24.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
125	Asli Surat PT. Widya Wahana	029/WW/II/2004	24.02.2004	Penunjukkan Langsung

Hal. 68 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	Asli Surat PT. Widya Wahana	028/WW/II/2004	20.02.2004	Penunjukkan Langsung
127	Asli Surat PT. Widya Wahana	027/WW/II/2004	19.02.2004	Penunjukkan Langsung
128	Asli Surat PT. Widya Wahana	026/WW/II/2004	18.02.2004	Penunjukkan Langsung
129	Asli Surat PT. Widya Wahana	024/WW/II/2004	17.02.2004	Penunjukkan Langsung
130	Asli Surat PT. Widya Wahana	022/WW/II/2004	16.02.2004	Penunjukkan Langsung
131	Asli Surat PT. Widya Wahana	021/WW/II/2004	13.02.2004	Penunjukkan Langsung
132	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	029/PTT/II/2004	12.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
133	Asli Surat PT. Widya Wahana	020/WW/II/2004	11.02.2004	Penunjukkan Langsung
134	Asli Surat PT. Widya Wahana	019/WW/II/2004	06.02.2004	Penunjukkan Langsung
135	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	018/PTT/II/2004	05.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
136	Asli PT. Widya Wahana	016/WW/II/2004	04.02.2004	Penunjukkan Langsung
137	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	011/PTT/II/2004	27.01.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
138	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	007/PTT/II/2004	23.01.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
139	Asli Surat PT. Widya Wahana	011/WW/II/2004	13.01.2004	Penunjukkan Langsung
140	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	0107/PTT/XI/2003	03.12.2003	Pesanan Peralatan Fire Hydrant

Hal. 69 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	Asli Surat PT. LJU	680/LIMEC/XI/2003	19.11.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan Fire Hydrant System
142	Asli Surat PT. Widya Wahana	0235/WW/XI/2003	01.12.2003	Penunjukkan Langsung
143	Asli Surat PT LJU	683/LIMEC/XI/2003	21.11.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan
144	Asli Surat PT. Widya Wahana	0224/WW/X/2003	10.10.2003	Penunjukkan Langsung
145	Asli Surat PT. Widya Wahana	0219/WW/X/2003	07.10.2003	Penunjukkan Langsung
146	Asli Surat PT. Widya Wahana	0216/WW/X/2003	03.10.2003	Penunjukkan Langsung
147	Asli Surat PT. Widya Wahana	0211/WW/IX/2003	30.09.2003	Penunjukkan Langsung
148	Asli Surat PT. Widya Wahana	057/WW/VIII/2003	26.08.2003	Penunjukkan langsung
149	Asli Surat PT. LJU	642/LIMEC/VIII/2003	21.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
150	Asli Surat PT. Widya Wahana	051/WW/VIII/2003	21.08.2003	Penunjukkan langsung
151	Asli Surat PT. LJU	637/LIMEC/A/III/2003	18.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
152	Asli Surat PT. Widya Wahana Asli Surat PT. LJU	046/WW/VIII/2003	18.08.2003	Penunjukkan langsung
		629/LIMEC/VI/II/2003	13.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
154	Asli Surat PT. Widya Wahana	041/WW/VIII/2003	13.08.2003	Penunjukkan langsung
155	Asli Surat PT. LJU	623/LIMEC/VI/II/2003	08.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
156	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	019/PTT/VII/2003	03.07.2003	Pesanan Peralatan Fire Hidrant

Hal. 70 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	Asli Surat PT. LJU	612/LIMEC/VI/2003	15.06.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan Fire Hidrant
158	Asli Surat PT. Widya Wahana	037/WW/II/2003	01.07.2003	Pemesanan 2 Unit X Ray
159	Asli Surat PT. Widya Wahana	021/WW/VI/2003	09.06.2003	Penunjukkan langsung
160	Asli Surat PT. Widya Wahana	012/WW/VI/2003	30.05.2003	Penunjukkan langsung
161	Asli Surat PT. Widya Wahana	07/WW/VI/2003	03.05.2003	Penunjukkan langsung
162	Asli Tambahan penjelasan	-	20.03.2005	Dari Pemimpin Kelompok PMK 1 kepada Pemimpin KPI
163	Asli Tambahan penjelasan	-	-	dari Bp. Gama Komarudin kepada Pemimpin KPI
164	Fotocopy Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)	09.05.6584	18.06.2003	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
165	Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	A094583	—	—
166	Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK06/1)	—	15.04.2003	
167	Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan		04.04.2003	
168	Asli Formulir Analisa CEV & Pengikatan Jaminan (FCP/PAK 06/2)	-	31.12.2003	-
169	Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK06/1)		31.12.2003	
170	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (lamp. FKS/PAK-06)		22.12.2003	berdasarkan laporan appraisal independent
171	Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (lamp. FKS/PAK-06)		22.12.2003	

Hal. 71 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	Asli Formulir Analisa CEV & Pengikatan Jaminan (FCP/PAK 06/2)	-	15.04.2003	-
173	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (lamp. FKS/PAK-06)		09.04.2003	
174	Fotocopy Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK 06/1)		13.11.2002	
175	Foto copy Formulir Analisa CEV & Pengikatan Jaminan (FCP)	-	13.11.2003	-
176	Foto copy Kartu Pengawasan Plafond Garansi Bank		-	
177	Foto copy Pembangunan Gedung Sapta Pesona "B"	-	-	
178	Foto copy Polis Asuransi Kebakaran	07.0101.04 00079/00	9.01.2004	PT. Asuransi Tri Pakarta
179	Asli Surat KPI	KPI/9/1720 IR	5.07.2003	Permohonan pembuatan Akta Kuasa Jual & Sertifikasi Jaminan Kredit LJU

Buku II :

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl	Keterangan
1	Asli Memo Divisi Korporasi I	KPS/2/p.11	28.01.2004	Perihal penjelasan DER per September 2003 a/n. PT. LJU
2	Formulir Pengawasan Sirkulasi	KPS/2/p.3	14.01.2004	Permohonan Tambahan Plafond KMKan. LJU
	Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit	KPS/2/004	12.01.2004	Tambahan plafond KMK
3	Asli Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK PAK02/2)			Tambahan KMK
4	Asli Memorandum Analisa Kredit	ARK/1/001	06.01.2004	Tambahan KMK maks. Rp. 19,5 M, &
	(MAK PAK 02/1)			KMK Trx. Rp. 29 M

Hal. 72 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)		14.05.2004	
6	Asli Formulir Informasi Bisnis (PAK 03/2)		10.05.2004	
7	Foto copy Formulir Proyeksi Ihtisar Keuangan			Realisasi 31.03.2004, proyeksi s/d 31.12.2006
8	Asli Formulir Analisa Keuangan			Audites 2001-2003, Home Statement 31.12.2004
9	Asli Formulir Penelitian Hasil Prestasi/Rating Field Report		31.01.2005	Triwulan IV/2004
10	Asli Formulir Evaluasi Nilai Jaminan			Triwulan IV/2004
11	Asli Customer Risk Rating Form		14.01.2005	Tidak Ditandatangani
12	Asli Rating Field Report		30.12.2004	
13	Asli Formulir Evaluasi Nilai Jaminan			Triwulan MI/2004
14	Asli Customer Risk Rating Form		18.05.2004	
15	Asli Customer Credit Rating Form		18.05.2004	
16	Asli Formulir Penilaian Risiko (FPR PAK- 05/1)		18.05.2004	
17	Asli Formulir Analisa Rating-Prioritas Pemasaran (FAR PAK-05/2)		18.05.2004	
18	Asli Surat BNI	KPI/2/0794	08.04.2005	Review bunga fasilitas kredit Saudara
19	Asli Surat BNI	KPI/2/060/R	30.03.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
20	Asli Surat BNI	KPI/2/054/R	21.03.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
21	Asli Surat BNI	KPI/2/0550/R	10.03.2005	Review bunga fasilitas kredit Saudara
22	Asli Surat BNI	KPI/2/046/R	08.03.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
22A	Asli Surat BNI	KPS/2/038/R	23.02.2005	Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas
23	Asli Surat BNI	KPS/2/034/R	22.02.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
24	Asli Surat BNI	KPS/2/029/R	15.02.2005	Permohonan Disposisi KMK

Hal. 73 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transaksional
25	Asli Surat BNI	KPS/2/0253/R	04.02.2005	Review bunga fasilitas kredit
26	Asli Surat BNI	KPS/2/027/R	03.02.2005	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
27	Asli Surat BNI	KPS/2/025/R	27.01.2005	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
28	Asli Surat BNI	KPS/2/0112/R	18.01.2005	Review bunga fasilitas kredit
29	Asli & Foto copy Surat BNI	KPS/2/010/R	17.01.2005	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
30	Asli Surat BNI	KPS/2/001/R	05.01.2005	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
31	Asli Surat BNI	KPS/2/216/R	24.12.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
32	Asli Surat BNI	KPS/2/3896/R	15.12.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
33	Asli Surat BNI	KPS/2/199/R	02.12.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
34	Foto copy Surat BNI	KPS/2/2735/R	11.11.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
35	Asli Surat BNI	KPS/2/181/R	10.11.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
36	Asli Surat BNI	KPS/2/171/R	27.10.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
37	Asli Surat BNI	KPS/2/2555/R	18.10.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
38	Asli Surat BNI	KPS/2/166/R	15.10.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
39	Asli Surat BNI	KPS/2/155/R	27.09.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
40	Asli Surat BNI	KPS/2/2344/R	17.09.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
41	Asli Surat BNI	KPS/2/148/R	14.09.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
42	Asli & Foto copy Surat BNI	KPS/2/140/R	30.08.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
43	Asli Surat BNI	KPS/2/131/R	19.08.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
44	Asli Surat BNI	KPS/2/2153/R	19.08.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
45	Asli Surat BNI	KPS/2/122/R	09.08.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
46	Asli Surat BNI	KPS/2/114/R	19.07.2004	Permohonan Disposisi Transaksional KMK
47	Asli Surat BNI	KPS/2/1907/R	16.07.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
48	Asli Surat BNI	KPS/2/104/R	28.06.2004	Permohonan Disposisi KMK

Hal. 74 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transaksional
49	Asli Surat BNI	KPS/2/081/R	17.06.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
50	Asli Surat BNI	KPS/2/079/R	16.06.2004	Perpanjangan dan tambahan plafond
51	Asli Surat BNI	KPS/2/016/R	10.02.2004	Perpanjangan dan tambahan plafond KMK
52	Asli Call Memo		26.04.2005	monitoring SPK-SPK yang akan jatuh tempo bulan Mei 2005 yang belum diselesaikan
53	Asli Call Memo		20.04.2005	Verifikasi penerbitan SPK
54	Asli Call Memo		08.04.2005	Verifikasi penerbitan SPK
55	Asli Memo	KPI/2/0670	26.04.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
56	Foto copy Memo	KPI/2/0670	26.04.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
57	Asli Memo	KPI/2/0575	12.04.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
58	Asli Memo	DRK/3/673	01.04.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.022.000.000 an. PT. LJU
59	Foto copy Nota Intern	DRK/3/075	31.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.022.000.000 an. PT. LJU
60	Foto copy & Asli Memo	KPI/2/0489	30.03.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
61	Foto copy Nota Intern	KPI/2/092	23.03.2005	Permohonan Review Fasilitas an. PT. LJU
62	Asli Memo	KPI/2/0444	22.03.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
63	Asli Memo	DRK/3/500	10.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.11.512.000.000 an. PT. LJU
64	Foto copy Nota Intern	DRK/3/052	09.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.11.512.000.000

Hal. 75 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				an. PT. LJU
65	Asli Memo	KPI/2/0363	09.03.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
66	Asli Memo	DRK/3/435A	02.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.10.000.000.000 an. PT. LJU
67	Foto copy Nota	DRK/3/041	28.02.2005	Disposisi KMK Transaksional mks. Rp10.000.000. 000,00 a.n. PT.LJU
68	Foto copy Formulir Pengawasan Sirkulasi ditambah dengan Lampiran	KPS/2/P.41	28.05.2005	Disposisi Tambahan Sementara KMK Transaksional a.n. PT.LJU Maks 10 M
69	Asli Memo	DRK/3/384	24.02.2005	Disposisi KMK Transaksional Maks. Rp4.978.000.000, 00 a.n. PT.LJU
70	Foto copy Nota Intern	DRK/3/036	24.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.978.000.000 an. PT. LJU
71	Asli Memo	KPS/2/0250	22.02.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
72	Asli Memo	DRK/3/330	17.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.098.000.000 an. PT. LJU
73	Foto copy Nota Intern	DRK/3/029	16.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.098.000.000 an. PT. LJU
74	Asli Memo	KPS/2/0206	15.02.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
75	Asli Memo	DRK/3/242	07.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 5.241.000.000; an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
76	Foto copy Nota Intern	DRK/3/027	04.02.2005	maks. Rp. 5.241.000.000; an. PT. LJU

Hal. 76 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Asli Memo	KPS/2/0182	04.02.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
78	Asli Memo	DRK/3/179	28.01.2005	maks. Rp. 6.169.000.000; an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
79	Foto copy Nota Intern	DRK/3/021	28.01.2005	maks. Rp. 6.169.000.000; an. PT. LJU
80	Asli Memo	KPS/2/0145	27.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
81	Asli Memo	DRK/3/167	27.01.2005	maks. Rp. 7.508.000.000 an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
82	Foto copy Nota Intern	DRK/3/014	18.01.2005	maks. Rp. 7.508.000.000 an. PT. LJU
83	Foto copy Memo	KPS/2/100	17.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
84	Asli Memo	KPS/2/0022	06.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
85	Asli Memo	DRK/3/037	07.01.2005	maks. Rp. 8.667.000.000; an. PT. LJU
86	Foto copy Nota Intern	DRK/3/005	07.01.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 8.667.000.000; an. PT. LJU
87	Asli Memo	KPS/2/100	17.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. UU
88	Asli Memo	DRK/3/1526	28.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9.703.000.000,- an. PT. UU
89	Asli Memo	KPS/2/3297	27.12.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an.

Hal. 77 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



				PT. LJU
90	Foto copy Nota Intern	DRK/3/191	27.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9.703.000.000,- an. PT. LJU
91	Asli Memo	DRK/3/1470	20.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 7.889.000.000 an. PT. LJU
92	Foto copy Nota Intern	DRK/3/180	17.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 7.889.000.000 an. PT. LJU
93	Asli Memo	KPS/2/3233	16.12.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
94	Asli Memo	DRK/3/1358	03.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9.303.000.000 an. PT. LJU
95	Foto copy Nota Intern	DRK/3/170	03.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9.303.000.000; an. PT. LJU
96	Asli Memo	KPS/2/3161	02.12.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
97	Asli Memo	DRK/3/1319	26.11.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.658.000.000 an. PT. LJU
98	Foto copy Nota Intern	DRK/3/160	11.11.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.658.000.000 an. PT. LJU
99	Asli Memo	KPS/2/3088	11.11.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
100	Asli Memo	DRK/3/1211	29.10.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.908.000.000 an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
101	Foto copy Nota Intern	DRK/3/146	28.10.2004	maks. Rp. 4.908.000.000 an. PT. LJU
102	Asli Memo	KPS/2/2975	28.10.2004	Penyampaian check list disposisi



				KMK Transaksional an. PT. LJU
103	Asli Memo	DRK/3/1168	22.10.2004	Maksimum Rp. 9.315.000.000 an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
104	Foto copy Nota Intern	DRK/3/135	19.10.2004	Maksimum Rp. 9.315.000.000 an. PT. LJU
105	Asli Memo	KPS/2/2890	19.10.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU Pembukaan kembali
106	Asli Memo	KPS/2/2495	29.09.2004	rekening pinjaman an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
107	Asli Memo	DRK/3/1003	29.09.2004	Maksimum Rp.8.405.000.000 an. PT. LJU
108	Foto copy Nota Intern	DRK/3/119	28.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 8.405.000.000 an. PT. LJU
109	Foto copy Memo	KPS/2/2483A	27.09.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional PT. LJU
110	Asli Memo	DRK/3/960	22.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 7.548.000.000 an. PT. LJU
111	Foto copy Nota Intern	DRK/3/112	21.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 7.548.000.000 an. PT. LJU
112	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/2223	16.09.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
113	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/100	02.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 9.495.000.000 an. PT. LJU
114	Asli Memo	KPS/2/2121	01.09.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an.PT. LJU
115	Foto copy Nota Intern	DRK/3/087	23.08.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 5.910.000.000 an. PT. LJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/2035	20.08.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
117	Asli Nota Intern	DRK/3/82	11.08.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.11.050.000.000 an. PT. LJU
118	Asli Memo 2 set	KPS/2/1776	10.08.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
119	Asli Nota Intern	MRK/3/070	21.07.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.13.330.000.000 an. PT. LJU
120	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/1565	21.07.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
121	Asli Memo 3 set	KPS/2/1398	29.06.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
122	Asli Nota Intern	MRK/3/045	29.06.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.15.728.000.000 an. PT. LJU
123	Asli Memo	KPS/2/1307	18.06.2004	Persetujuan Switching Anggaran
124	Asli Fax Message	24.3612/Kamis/KPI	12.05.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
125	Asli Fax Message	23.2600/Selasa/KPI	26.04.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
126	Asli Surat BNI	KPI/2/0651	21.04.2005	Informasi Data Debitur
127	Asli Surat BNI	J KK/2.1/2976	20.04.2005	Permintaan Referensi
128	Asli Fax Message	21.3499/Rabu/KPI	13.04.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. UU
129	Asli Fax Message	20.2986/Kamis/KPI	31.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
130	Asli Fax Message	19.4009/Selasa/KPI	22.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU

Hal. 80 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	Asli Fax Message	17.4543/Rabu/KPI	09.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
132	Asli Fax Message	15.1546/Senin/KPS	28.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
133	Asli Fax Message	14.3767/Rabu/KPS	23.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
134	Asli Fax Message	11.2995/Rabu/KPS	16.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
135	Asli Nota Intern	DRK/3/82	11.08.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 1.050.000.000 an. PT. LJU
136	Asli Memo 2 set	KPS/2/1776	10.08.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
137	Asli Nota Intern	MRK/3/070	21.07.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.13.330.000.000 an. PT. LJU
138	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/1565	21.07.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
139	Asli Memo 3 set	KPS/2/1398	29.06.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
140	Asli Nota Intern	MRK/3/045	29.06.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.15.728.000.000 an. PT. LJU
141	Asli Memo	KPS/2/1307	18.06.2004	Persetujuan Switching Anggaran
142	Asli Fax Message	24.3612/Kamis/KPI	12.05.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
143	Asli Fax Message	23.2600/Selasa/KPI	26.04.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
144	Asli Surat BNI	KPI/2/0651	21.04.2005	Informasi Data Debitur
145	Asli Surat BNI	JKK/2.1/2976	20.04.2005	Permintaan Referensi
146	Asli Fax Message	21.3499/Rabu/KPI	13.04.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU

Hal. 81 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147	Asli Fax Message	20.2986/Kamis/KPI	31.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
148	Asli Fax Message	19.4009/Selasa/KPI	22.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
149	Asli Fax Message	17.4543/Rabu/KPI	09.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
150	Asli Fax Message	15.1546/Senin/KPS	28.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
151	Asli Fax Message	14.3767/Rabu/KPS	23.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
152	Asli Fax Message	11.2995/Rabu/KPS	16.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
153	Asli Fax Message	10.4008/Jumat/KPS	04.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
154	Asli Fax Message	08.3678/Jumat/KPS	28.01.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
155	Asli Fax Message	07.3840/Rabu/KPS	19.01.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
				Transaksional an. PT. LJU
156	Asli Fax Message	05.3027/Kamis/KPS	06.01.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
157	Asli Fax Message	03.1885/senin/KPS	27.12.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
158	Asli Fax Message	01.2184/Senin/KPS	20.12.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
159	Asli Fax Message	98.1996/Kamis/KPS	02.12.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
160	Asli Fax Message	94.2231/Kamis/KPS	11.11.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
161	Asli Fax Message	92.2464/Kamis/KPS	28.10.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
162	Asli Surat BNI	DRK/3/492/R	19.10.2004	Polis Asuransi Jaminan Kredit
163	Asli Fax Message	90.2545/Jumat/KPS	15.10.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK

Hal. 82 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transaksional an. PT. LJU
164	Asli Fax Message	89.856/Selasa/KPS	28.09.2004	Perubahan No. Rekening fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
165	Asli Fax Message	88.2103/Senin/KPS	27.09.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
166	Asli Fax Message	85.903/Jumat/KPS	17.09.2004	Perubahan No. Rekening fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
167	Asli Fax Message	84.2588/Kamis/KPS	16.09.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
168	Asli Fax Message	83.2078/Rabu/KPS	01.09.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
169	Asli Fax Message	79.2347/Jumat/KPS	20.08.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
170	Asli Fax Message	76.1825/Selasa/KPS	10.08.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
171	Asli Fax Message	71.2321/Rabu/KPS	21.07.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK
				Transaksional an. PT. LJU
172	Asli Fax Message	KPS/2/0706	07.07.2004	Permintaan data an. PT. LJU
173	Asli Fax Message	69.2427/Selasa/KPS	29.06.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
174	Asli Fax Message	68.2453/Jumat/KPS	18.06.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
175	Asli Fax Message	67.820/Jumat/KPS	18.06.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
176	Asli Monitoring KMK Transaksional Maks. Rp.100.8M			1 (satu) set
177	Asli Informasi Bank Indonesia	1/804775/DPIP/DtB/ Rhs KPI/9/246/	27.04.2004	—
178	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	142/LIMEC/IV/2005	21.04.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
179	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	126/LIMEC/IV/2005	07.04.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
180	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	110/LIMEC/III/2005	28.03.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional

Hal. 83 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	101 /LIMEC/III/2005	17.03.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
182	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	078/LIMEC/III/2005	04.03.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
183	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	070/LIMEC/II/2005	25.02.2005	Fasilitas tambahan KMK Transaksional
184	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	062/LIM EC/I I/2005	18.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
185	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	050/LIMEC/II/2005	11.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
186	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	047/LIMEC/II/2005	08.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
187	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	042/LIMEC/II/2005	01.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
188	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	030/LIMEC/I/2005	25.01.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
189	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	008/LIMEC/I/2005	13.01.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
190	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	003/LIMEC/I/2005	03.01.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
191	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	632/LIMEC/XII/2004	22.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
192	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	631/LIMEC/XII/2004	21.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
193	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	625/LIM EC/XII/2004	10.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
194	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	686/LIMEC/XII/2004	03.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
195	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	576/LIMEC/XII/2004	01.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
196	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	539/LIMEC/XI/2004	08.11.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
197	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	524/LIMEC/X/2004	26.10.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
198	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	497/LIMEC/X/2004	12.10.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
199	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	459/LIMEC/IX/2004	22.09.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
200	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	410/LIMEC/IX/2004	08.09.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
201	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	398/LIMEC/VIII/2004	27.08.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
202	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	006/LIMEC/TSY/VIII/2004	23.08.2004	Pemberitahuan

Hal. 84 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203	Fotocopy Berita Acara PT. Lima Jayakarta Utama	17	20.08.2004	
204	Fotocopy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	366/LIMEC/VIII/2004	18.08.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
205	Fotocopy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	278/LIMEC/VII/2004	03.08.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
206	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	278/LIMEC/VII/2004	14.07.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
207	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	236/LIMEC/VI/2004	28.06.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
208	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	201 /LIMEC/VI/2004	16.06.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
209	Foto copy Surat Keterangan	22/PPAT/V/2004	25.05.2004	dari Notaris Liza Priadhini, SH
210	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	0112/LIMEC/IV/2004	15.04.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
211	Asli Kartu Pengawasan Proyek PT. Lima Jayakarta Utama			periode 01.02.2005 s/d 24.05.2005
212	Asli 2 set Surat BNI	KPS/2/147	07.12.2004	Surat Keterangan Dukungan Keuangan
213	Asli Surat BNI	KPS/2/1840/R	08.07.2004	Permohonan bantuan pembebanan Hak tanggungan
214	Foto copy Surat Pernyataan		18.06.2004	Tjulung Stefanus Yawoga
215	Foto copy Surat Pernyataan		18.06.2004	Ujang Syamsudin
216	Foto copy NPWP an. Tjulung SY	4.050.261.9-001		
217	Foto copy Surat Keterangan KTP sementara	86/SKKS/2012-DS/2004	26.05.2004	an. Dwi
218	Foto copy Surat Persetujuan		15.06.2004	persetujuan dari Ny. Dwi kepada Sutrisno
219	Foto copy Surat Persetujuan 3 set		15.06.2004	persetujuan dari Boy M kepada Antonia A.I
220	Foto copy KTP an. Boy M	...	—	
221	Foto copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	22-30-41-00002	09.06.2000	Toyota Harrier

Buku III:

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl	Keterangan
1	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Formulir Memorandum Analisa Penyelamatan	KPI/7/P.54 KPI/7/P.54	12.07.2006 12.07.2006	Memorandum Analisa Penyelamatan

Hal. 85 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit	KPI/12/P.2 6 KPI/12/P.2 6	04.10.2005 04.10.2005	Permohonan Perpanjangan KMK Maks Rp.45,5 M, KMK Transaksional Maks Rp. 100,800 M, Pelafond GB Maks Rp.2 M, KMK Transaksional Maks Rp. 10 M
3	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK-02/1)	-	-	permohonan review kredit berjalan
4	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK-02/2)	-	-	permohonan perpanjangan KMK plafond, KMK transaksional, KMK tambahan sementara & plafond garansi bank
5	Asli Memorandum Rekomendasi Kredit	DRK/SCA CORP/224 7	24.10.200 5	Perpanjangan fasilitas dan pendudukan KMK sementara an. PT. LJU
6	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Memo	KPI/2/Ni- 108 KPI/2/Ni- 108	13.06.200 5 10.06.200 5	Perpanjangan sementara fasilitas kredit Perpanjangan sementara fasilitas kredit an. PT. LJU
7	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Memo	KPI/2/Ni- 93	16.05.200 5	Perpanjangan Jangka Waktu Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi KMK trx
8	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Memorandum Tambahan Kredit Sementara	KPS/2/P.3 4	17.02.200 5	permohonan tambahan sementara fasilitas KMK Transaksional
9	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit	KPS/2/P. PAK KPS/2/023	01.06.200 4 31.05.200 4	permohonan perpanjangan KMK/GB

Hal. 86 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK-02/1)	ARK/1/020	21.05.200 4	review fasilitas berjalan, menganalisa & memberikan penilaian atas permohonan tambahan fasilitas KMK transaksional untuk pelaksanaan proyek.
11	Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK PAK-02/2)			
12	Asli Checklist uji kepatuhan rancangan keputusan Kredit	KPN/PGK/051	10.06.2004	-
13	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)		01.09.2005	
14	Asli Proyeksi Analisa Keuangan		-	Realisasi 31.03.2004, Proyeksi s/d 31.12.2006
15	Asli Formulir Penelitian Hasil Prestasi		20.07.200 5	Triwulan II tahun 2005
16	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audited tahun 2000-2004, homestatement tanggal 31.06.2005
17	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audited tahun 2000-2004, homestatement tanggal 31.03.2005
17A	Asli Formulir Penelitian Hasil Prestasi	-	29.12.200 5 15.04.200 5	Triwulan I tahun 2005
18	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audited tahun 2000-2002, homestatement tanggal 31.12.2003 s/d 31.03.2004
19 20	Asli Customer Risk Rating Form Asli Customer Risk Rating Form	-	24.02.200 6 27.09.200 5	-

Hal. 87 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Asli Customer Risk Rating Form	—	07.09.200 5	Dokumen Tidak ditandatangani
22	Struktur Organisasi PT Lima Jayakarta Utama			
23	Asli Surat BNI	KPI/7/0265/R	10.02.200 6	Penyaluran termijn atas tagihan proyek pengadaan CCTV & penyelesaiannya
24	Foto copy Surat BNI	KPI/7/0160/R	26.01.200 6	Penilaian kembali seluruh jaminan
25	Foto copy Surat BNI	KPI/7/0126/R	20.01.200 6	Penyelesaian pinjaman jatuh tempo dan tunggakan bunga pinjaman
26	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2992/R	26.12.200 5	Kewajiban bunga
27	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2685/R	28.11.200 5	Kewajiban bunga
28	Asli Surat BNI	KPI/12/217/R	23.11.200 5	Ralat SKK
29	Asli Surat BNI	KPI/12/214/R	21.11.200 5	Persetujuan Perpanjangan Fasilitas kredit
30	Asli Surat BNI	KPI/12/2576/R	16.11.200 5	Permohonan keringanan bunga dan switching KMK transaksional
31	Asli Surat BNI	KPI/12/2572/R	15.11.200 5	Penilaian barang jaminan
32	Asli Surat BNI	KPI/12/2548/R	10.11.200 5	Restrukturisasi kredit
33	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2527/R	27.10.200 5	Kewajiban bunga Oktober 2005
34	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2454/R	24.10.200 5	Review suku bunga
35	Asli Surat BNI	KPI/12/3722	27.09.200 5	Kewajiban bunga September 2005
36	Asli Surat BNI	KPI/4/127/R	28.06.200 5	Perpanjangan sementara fasilitas kredit

Hal. 88 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Asli Surat BNI	KPI/2/1352/R	13.06.200 5	Review bunga fasilitas kredit
38	Asli Surat BNI	KPI/2/110/R	26.05.200 5	Permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK Transaksional
39	Foto copy Surat BNI	KPI/2/090/R	06.05.200 5	Permohonan disposisi KMK transaksional
40	Foto copy Surat BNI	KPI/2/082/R	21.04.200 5	Permohonan disposisi KMK transaksional
41	Foto copy Surat BNI	KPI/2/076/R	12.04.200 5	Permohonan disposisi KMK transaksional
42	Asli Notulen Pertemuan	—	27.03.200 6	Membicarakan penyelesaian pinjaman an.
43	Asli Call Memo		15.03.200 6	menagih kewajiban yang tertunggak, rencana restrukturisasi kredit untuk penyelesaian pinjaman, data dalam rangka restrukturisasi kredit
44	Asli Call memo	-	05.02.200 6	pengecekan kebenaran proyek & informasi proyek yang belum diselesaikan dan dibayar PT. LJU
45	Asli Call memo		25.01.200 6	mantau kondisi perusahaan
46	Asli Call Memo	-	19.12.200 5	menagih tunggakan bunga pinjaman bulan September s/d November & Desember 2005
47	Asli Call Memo		26.10.200 5	menagih bunga pinjaman Sept.&Okt. 2005

Hal. 89 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Asli Notulen pertemuan		15.11.200 5	penyelesaian KMK Transaksional, tunggakan bunga, restrukturisasi kredit, penilaian kembali serta plotting jaminan an. PT. LJU
49	Foto copy Memo	KPI/9/4039	22.11.200 5	Bantuan tenaga yurist untuk plotting jaminan
50	Asli Memo	DRK/3/854 A	26.04.200 5	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.4.970.000.000 an. PT. LJU
51	Foto copy Nota Intern	DRK/3/098	26.04.200 5	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.4.970.000.000 an. PT. LJU
52	Foto copy Memo	KPI/2/0670	26.04.200 5	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
53	Asli Memo	DRK/3/746 A	13.04.200 5	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.5.232.000.000 an. PT. LJU
54	Foto copy Nota Intern	DRK/3/089	13.04.200 5	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.5.232.000.000 an. PT. LJU
55	Foto copy Memo	KPI/2/0575	12.04.200 5	Penyampaian chek list disposisi KMK an. PT. LJU
56	Asli Nota Intern	KPI/2/092	23.03.200	Permohonan review
			5	fasilitas an. PT. LJU

Hal. 90 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Asli Facsimile	KPI/7/119	27.02.200 6	Pembukaan Rek. Escrow an. PT LJU
58	Asli Facsimile Transmission	KPI/12/703/05	26.12.200 5	Nilai taksasi jaminan an. PT. LJU
59	Asli Berita Telex	60.1218/Kamis/KPI	08.12.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
60	Asli Facsimile			HT. An. PT. Lima Jayakarta Utama
61	Asli Berita Telex	56.997/Jumat/KPI	18.11.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
62	Asli Berita Telex	54.998/Senin/KPI	31.10.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
63	Asli Berita Telex	50.890/Jumat/KPI	07.10.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
64	Asli Berita Telex	49.1203/Rabu/KPI	28.09.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
65	Asli Berita Telex	481463/Rabu/KPI	21.09.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
66	Asli Telex	41.1223/Rabu/KPI	07.09.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
67	Asli Telex	40.1217/Jumat/KPI	19.08.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
68	Asli Telex	33.991/Rabu/KPI	13.07.200 5	Perpanjangan sementara fasilitas kredit an. PT. LJU

Hal. 91 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Asli Telex	32.1174/Senin/ KPI	11.07.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
70	Asli Telex	29.1688/Senin/ KPI	13.06.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
71	Asli Telex	28.1058/Selasa /KPI	07.06.200 5	Penandatanganan PPPK atas fasilitas KMK an. PT. LJU
72	Asli Telex	27.1563/Selasa /KPI	31.05.200 5	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
73	Asli Telex	26.982/Jumat/K PI	20.05.200 4	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
74	Informasi Bank Indonesia	1/1464476/DPI P/Dt B/Rhs KPI/9/0646	31.08.200 5	
75	Asli Surat PT. Independensia Consultindo	013/SKTDW- BNI/2006	26.01.200 6	
76	Foto copy Surat BNI	MAR/6/0601	11.08.200	Peningkatan segmentasi
			5	Rekanan
77	Asli Surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	644/KBA/DVO.I I/2005	31.08.2005	Transfer
78	Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan	12/1.824.511/X II/20 04	10.12.200 4	
79	Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	09.05.6584	18.06.200 3	
80	Foto copy Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	94582		
81	1 (satu) set foto copy SPPT PBB & STTS			Tahun 2005

Hal. 92 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	003/LIMEC/TS Y/III/ 2007	22.03.200 7	Konfirmasi
83	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	021 /LI MEC/TSY/VI11 /2006	02.08.200 6	Jaminan saham Sdr. Tjulang S. Yawoga di PT. Graha Lintas Properti
84	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	020/LIMEC/TS Y/VI/ 2006	19.06.200 6	Kewajiban kami bulan Juni 2006
85	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	018/LIMEC/TS Y/V/2 006	12.05.200 6	Penyelesaian fasilitas kredit kami
86	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	012/LIMEC/TS Y/IV/ 2006	03.04.200 6	Penyampaian data/informasi
87	2 set Asli & Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	011/LIMEC/TS Y/III/ 2006	27.03.200 6	Penyelesaian kewajiban kami terhadap BNI
88	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	375/LIMEC/XI/ 2005	30.11.200 5	Penilaian Barang Jaminan
89	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	376/LIMEC/XI/ 2005	30.11.200 5	Penyelesaian atas kewajiban tunggakan Bunga
90	2 set Asli & Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	365/LIM EC/X/2005	31.10.200 5	Permohonan keringanan bunga dan switching KMK Transaksional menjadi KMK Aflopend
91	Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	337/LIMEC/VIII /200 5	21.09.200 5	Perpanjangan sementara fasilitas KMK Transaksional Tambahan Sementara
92	2 set Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	336/LIM EC/VI11/200 5	31.08.200 5	Perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK Transaksional
93	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	215/LIMEC/VI/ 2005	09.06.200 5	Permohonan Perpanjangan Kredit

Hal. 93 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	Asli & Foto copy Surat PT.Lima Jayakarta Utama	170/LIMEC/V/2005	10.05.200 5	Perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK Transaksional
95	Foto copy Surat PT Lima Jayakarta Utama	156/LIMEC/V/2005	02.05.2005	Permohonan perpanjangan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan
96	Asli Formulir Analisa CEV & pengikatan jaminan	...	Sept. 2005	
97	Asli Formulir Evaluasi	-	28.09.200	-
	Taksasi Jaminan		5	
98	Asli Formulir Berita Acara Pemeriksaan Jaminan		28.09.200 5	
99	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat		01.09.200 5	
100	Asli Formulir Analisa CEV & pengikatan jaminan		18.05.2004	
101	Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan		14.05.200 4	
102	Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan		04.05.200 4	
103	Foto copy Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan		04.05.200 4	
104	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat		04.05.200 4	
105	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan	-	04.05.2004	-
106	Asli Monitoring KMK	-	04.05.2004	-
107	Asli Proyek CCTV,SAS,FAS	-	-	Maks. Rp. 100,8 milyar Jan. s/d Des 2006 & Jan. s/d Des 2005
108	Foto Copy Laporan Penerimaan/Outstanding Tagihan	-	-	Per 16 September 2005

Hal. 94 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	Foto Copy Surat PT.Asuransi Tri Jakarta	-	27.01.2006	Perpanjangan Polis Asuransi Kebakaran
110	Asli Formulir Evaluasi Jaminan			triwulan I/2005, Dokumen Tidak Ditandatangani
111	Asli Formulir Evaluasi Jaminan		20.07.200 5	Triwulan II tahun 2006, Dokumen Tidak Ditandatangani
112	Asli Formulir Evaluasi Nilai Jaminan		13.06.200 5	Triwulan I tahun 2005, Dokumen Tidak Ditandatangani
113	Foto copy Jenis dan Nilai Agunan/Jaminan		-	-
114	Foto copy Daftar Pemegang Hak Atas Tanah seluas 1.210.657 m ² desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang – Banten	-	-	-
115	Copy Perjanjian Kredit	008/KPI/PK/ 2005	12.04.200 5	KMK maks. Rp. 5.232.000.000;
116	Foto copy Jaminan Kredit PT. Lima Jayakarta Utama Berkedudukan di Jakarta	-	-	berupa tanah kosong (pantai)

Dokumen Audited, Home Statement dan Laporan Penilaian Aktiva :

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal
1	Asli Audited Report	032/LA-S/03.2003	05.02.2003
2	Asli Laporan Penilaian Aktiva	025-PRO/IND/III/03	07.03.2003
3	Asli Home Statement	-	30.06.2003
4	Asli Home Statement	-	30.09.2003
5	Asli Laporan Penilaian Aktiva	062-PRO/IND/X/03	15.10.2003
6	Asli Laporan Penilaian Aktiva	097-PRO/IND/X/03	22.12.2003

Hal. 95 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



7	Foto copy Home Statement	-	31.12.2003
8	Asli Audited Report	05/29/ARD/JM/04	31.05.2004
9	Asli Audited Report	74 NS	28.06.2004
10	Foto copy Home Statement	-	31.03.2004
11	Asli Laporan Penilaian Aktiva	024-PRO/IND/V/04	12.05.2004
12	Foto copy Home Statement	-	30.06.2004
13	Foto copy Home Statement	-	30.09.2004
14	Foto copy Home Statement	-	31.12.2004
15	Asli Audited Report	280305.13 ANP/M	28.03.2005
16	Foto copy Audited Report	48/A/05	28.03.2005
17	Foto copy Home Statement	-	31.03.2005
18	Foto copy Audited Report	79.NS	10.10.2001
19	Foto copy Audited Report	26.NS	18.04.2002

terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 614/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya atas masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kendaraan:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Harrier warna kuning metalik dengan Nomor rangka MCV 150-142289, Nomor mesin 0947686, Nomor Pol. B-8493-BG berikut kunci kontak;
- b. BPKB ASLI mobil Toyota Harrier Nomor A93074926 Nomor Pol. B-8493-BG tahun 2000 dengan Nomor rangka MCV150-142289 dan Nomor mesin 0947686;
- c. Faktur ASLI Toyota Harrier dengan Nomor 60117/APS/DN/2000 tanggal 16 Mei 2000 A.n. JONNY HERMAN yang dikeluarkan dari PT.ANDIKA PRATAMA SENTOSA;
- d. STNK ASLI Nomor 004296/MJ/001 tanggal 26 Mei 2000 A.n. JONNY HERMAN kendaraan roda empat merk Toyota Harrier warna kuning metalik dengan Nomor rangka MCV 150-142289, Nomor mesin 0947686, No. Pol. B-8493-BG.

2. Dokumen Jaminan dan Pengikatan Jaminan Tanah :

1. Dokumen Sertifikat

a. Dokumen I :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SHM No.241/Pasar Minggu	16-05-1978
2	Asli Akta Jual Beli No. 113/2001	06-12-2001
3	Salinan SKMHT No. 19	16-12-2001
4	Asli SHT No.225/2002	06-03-2002
5	Asli SHGB No.252/Kebon Manggis (beserta Asli STTS & Asli SSB)	22-10-1998
6	Salinan SKMHT No. 18	06-12-2001
7	Asli SHT No. 155/2002	15-02-2002
8	Asli SHGB No.289/Tanjung Jaya	21-12-2000
9	Asli SHGB No.290/Tanjung Jaya	21-12-2000
10	Asli SHGB No.291/Tanjung Jaya	21-12-2000
11	Salinan SKMHT No. 16	06-12-2001
12	Asli SHGB No.292/Tanjung Jaya	21-12-2000
13	Salinan SKMHT No. 15	06-12-2001
14	Asli SHGB No-293/Tanjung Jaya	21-12-2000
15	Salinan SKMHT No. 17	06-12-2001
16	Asli SHT No.391/2003	30-12-2003

Hal. 97 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Asli SHGB No.02/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001 -0008.0)	01-03-1993
18	Asli SHGB No.03/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0009.0)	01-03-1993
19	Asli SHGB No.04/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0010.0)	01-03-1993
20	Asli SHGB No.05/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0004.0)	01-03-1993
21	Asli SHGB No.06/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0005.0)	01-03-1993
22	Asli SHGB No.07/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0006.0)	01-03-1993
23	Asli SHGB No.08/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0007.0)	01-03-1993
24	Asli SHGB No.09/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0011.0)	01-03-1993
25	Asli SHGB No.10/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0013.0)	01-03-1993
26	Asli SHGB No.11/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0014.0)	01-03-1993
27	Asli SHGB No.12/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0019.0)	01-03-1993
28	Asli SHGB No.13/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0020.0)	01-03-1993
29	Asli SHGB No.14/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0023.0)	01-03-1993
30	Asli SHGB No.15/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001 -0024.0)	01-03-1993
31	Asli SHGB No.16/Banyuasih (beserta Asli STTS & Asli SPPT No.36.01.050.001.001-0025.0)	01-03-1993
32	Asli SHT No.392/2003	30-12-2003
33	Asli SHM No.981/Tanjung Jaya	21-12-2000
34	Salinan APHT No.64/2004	11-02-2004
35	Asli SHT No.32/2004	18-02-2004
36	Asli SHM No.987/Tanjung Jaya	21-12-2000
37	Salinan APHT No.61/2004	11-02-2004
38	Asli SHT No.30/2004	18-02-2004
39	Asli SHP No.05/Tanjung Jaya	28-07-2003
40	Salinan APHT No.60/2004	11-02-2004
41	Asli SHT No.31/2004	18-02-2004
42	Asli SHP No.03/Tanjung Jaya	28-07-2003
43	Salinan APHT No.63/2004	11-02-2004
44	Asli SHT No.33/2004	18-02-2004
45	Asli SHM No.106/Banyuasih	01-03-1993
46	Asli SHM No.107/Banyuasih	01-03-1993
47	Asli SHM No.108/Banyuasih	01-03-1993
48	Asli SHM No.109/Banyuasih	01-03-1993
49	Salinan APHT No.62/2004	11-02-2004
50	Asli SHT No.34/2004	18-02-2004
51	Asli SHM No.112/Banyuasih	01-03-1993
52	Asli SHM No.113/Banyuasih	01-03-1993
53	Salinan APHT No.59/2004	11-02-2004
54	Asli SHT No.29/2004	18-12-2004
55	Asli 1MB No. 14476/1MB/1981	03-12-1981
56	Asli Berita Acara Plotting SHM No.241	12-11-2001
57	Asli Berita Acara Plotting SHM No.986, 985 & 984	12-11-2001
58	Asli Berita Acara Plotting SHGB No.252	12-11-2001
59	Asli Berita Acara Plotting SHM No.978 & 979	25-10-2002

Hal. 98 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Asli Berita Acara Plotting SHGB No.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, & 16	18 s/d 19-12-1993
61	Asli Foto2 Tanah Jaminan Kredit PT. LJU	18 s/d 19-12-1993
62	Asli Berita Acara Plotting SHGB No.289, 290, 291, 292 & 293	1993
63	Copy Gambar Situasi No.1582 s.d 1601/1992	
64	Asli Surat Tanda Terima Agunan No.W. 12/6.1/059	29-11-2001
65	Asli Surat NO.47/PPAT/XI/2001	29-11-2001
66	Asli Surat NO.W12/6.1/7160/R	30-11-2001
67	Asli Surat Tanda Penerimaan Agunan No.W.12/6.1/001	04-01-2002
68	Asli Surat No.W12/6.1/6722/R	29-11-2002
69	Copy Tanda Terima	02-06-2003
70	Asli Surat Keterangan Notaris No.N/81-K/VI/Jkt/2003	03-06-2003
71	Copy Tanda Terima	05-06-2003
72	Asli Tanda Terima	09-06-2003
73	Copy Surat No.W12/6.1/2284/R	12-06-2003
74	Salinan Surat No.KPI/9/1354/R	09-06-2003
75	Salinan Surat No.KPI/9/1387A/R	10-06-2003
76	Asli Surat Keterangan Notaris No.N/87-k/VI/Jkt/2003	11-06-2003
77	Salinan Surat No.KPI/9/1720/R	15-07-2003
78	Salinan Surat No.KPI/9/1776/R	24-07-2003
79	Copy Surat No.N/3/X/JKT/2003	01-10-2003
80	Asli Surat No.004/LIMEC/TSY/XI/03	10-11-2003
81	Copy Surat No.12/N/XI/JKT/2003	10-11-2003
82	Salinan Memorandum No.KPS/9/299	12-11-2003
83	Salinan Surat No.KPS/9/29727/R	17-11-2003
84	Asli Tanda Terima	08-01-2004
85	Asli Surat Keterangan No.130/VI/2004	10-06-2004
86	Salinan Surat No.KPS/9/0487/R	10-02-2004
87	Salinan Surat No.KPS/4/0516/R	17-02-2004
88	Salinan Surat No.KPS/4/0558/R	25-02-2004
89	Asli Surat No.20/SY/N/II/2004	26-02-2004
90	Asli Memo No.KKS/3/0773	17-07-2007
91	Asli Tanda Terima Dokumen	20-07-2007

Hal. 99 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



b. Dokumen II :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SHM No.701/Tanjungjaya	26-12-1996
2	Asli SHM No.702/Tanjungjaya	26-12-1996
3	Asli SHM No.703/Tanjungjaya	26-12-1996
4	Asli SHM No.704/Tanjungjaya	26-12-1996
5	Asli SHM No.708/Tanjungjaya	26-12-1996
6	Asli SHM No.709/Tanjungjaya	26-12-1996
7	Asli SHM No.710/Tanjungjaya	26-12-1996
8	Asli SHM No.711/Tanjungjaya	26-12-1996
9	Asli SHM No.712/Tanjungjaya	26-12-1996
10	Asli SHM No.713/Tanjungjaya	26-12-1996
11	Asli SHM No.714/Tanjungjaya	26-12-1996
12	Asli SHM No.716/Tanjungjaya	26-12-1996
13	Salinan SKMHT No.36	18-06-2004
14	Salinan APHT No.200/2004	06-07-2004
15	Asli SHT No. 156/2004	15-07-2004
16	Asli SHM No.686/Tanjungjaya	26-12-1996
17	Asli SHM No.695/Tanjungjaya	26-12-1996
18	Asli SHM No.696/Tanjungjaya	26-12-1996
19	Asli SHM No.697/Tanjungjaya	26-12-1996
20	Asli SHM No.698/Tanjungjaya	26-12-1996
21	Asli SHM No.699/Tanjungjaya	26-12-1996
22	Asli SHM No.700/Tanjungjaya	26-12-1996
23	Salinan SKMHT No.35	18-06-2004
24	Salinan APHT No. 199/2004	06-07-2004
25	Asli SHT No. 162/2004	15-07-2004
26	Asli SHM No.785/Tanjungjaya	26-12-1996
27	Asli SHM No.786/Tanjungjaya	26-12-1996
28	Asli SHM No.797/Tanjungjaya	26-12-1996
29	Asli SHM No.800/Tanjungjaya	26-12-1996
30	Asli SHM No.801/Tanjungjaya	26-12-1996
31	Asli SHM NO.802/Tanjungjaya	26-12-1996
32	Asli SHM No.803/Tanjungjaya	26-12-1996
33	Asli SHM No.804/Tanjungjaya	26-12-1996
34	Asli SHM No.805/Tanjungjaya	26-12-1996
35	Asli SHM No.806/Tanjungjaya	26-12-1996
36	Asli SHM No.807/Tanjungjaya	26-12-1996
37	Asli SHM No.808/Tanjungjaya	26-12-1996
38	Salinan SKMHT No.41	18-06-2004
39	Salinan APHT No.205/2004	06-07-2004
40	Asli SHT No. 160/2004	15-07-2004
41	Asli SHM No.729/Tanjungjaya	26-12-1996
42	Asli SHM No.730/Tanjungjaya	26-12-1996
43	Asli SHM No.731/Tanjungjaya	26-12-1996
44	Asli SHM No.732/Tanjungjaya	26-12-1996
45	Asli SHM No.733/Tanjungjaya	26-12-1996
46	Asli SHM No.734/Tanjungjaya	26-12-1996
47	Asli SHM No.736/Tanjungjaya	26-12-1996
48	Asli SHM No.738/Tanjungjaya	26-12-1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Asli SHM No.739/Tanjungjaya	26-12-1996
50	Asli SHM No.740/Tanjungjaya	26-12-1996
51	Asli SHM No.741/Tanjungjaya	26-12-1996
52	Asli SHM No.742/Tanjungjaya	26-12-1996
53	Asli SHM No.743/Tanjungjaya	26-12-1996
54	Asli SHM No.744/Tanjungjaya	26-12-1996
55	Asli SHM No.746/Tanjungjaya	26-12-1996
56	Asli SHM No.747/Tanjungjaya	26-12-1996
57	Asli SHM No.749/Tanjungjaya	26-12-1996
58	Salinan SKMHT No.38	18-06-2004
59	Salinan APHT No.202/2004	06-07-2004
60	Asli SHT No. 166/2004	15-07-2004
61	Asli SHM No.670/Tanjungjaya	26-12-1996
62	Asli SHM No.671/Tanjungjaya	26-12-1996
63	Asli SHM No.672/Tanjungjaya	26-12-1996
64	Asli SHM No.673/Tanjungjaya	26-12-1996
65	Asli SHM No.675/Tanjungjaya	26-12-1996
66	Asli SHM No.676/Tanjungjaya	26-12-1996
67	Asli SHM No.685/Tanjungjaya	26-12-1996
68	Asli SHM No.680/Tanjungjaya	26-12-1996
69	Salinan SKMHT no.34	18-06-2004
70	Salinan APHT No. 198/2004	06-07-2004
71	Asli SHT No. 159/2004	15-07-2004
72	1 Set Tanda Terima dari Notaris	28-07-2004

c. Dokumen III:

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SHM No.718/Tanjungjaya	26-12-1996
2	Asli SHM No.719/Tanjungjaya	26-12-1996
3	Asli SHM No.720/Tanjungjaya	26-12-1996
4	Asli SHM No.721/Tanjungjaya	26-12-1996
5	Asli SHM No.722/Tanjungjaya	26-12-1996
6	Asli SHM No.723/Tanjungjaya	26-12-1996
7	Asli SHM No.724/Tanjungjaya	26-12-1996
8	Asli SHM No.725/Tanjungjaya	26-12-1996
9	Asli SHM No.726/Tanjungjaya	26-12-1996
10	Asli SHM No.727/Tanjungjaya	26-12-1996
11	Asli SHM No.728/Tanjungjaya	26-12-1996
12	Salinan SKMHT No.37	18-06-2004
13	Salinan APHT No.201/2004	06-07-2004
14	Asli SHT No.164/2004	15-07-2004
15	Asli SHM No.627/Tanjungjaya	14-08-1996
16	Asli SHM No.628/Tanjungjaya	14-08-1996
17	Asli SHM No.631/Tanjungjaya	14-08-1996
18	Asli SHM No.632/Tanjungjaya	14-08-1996
19	Asli SHM No.633/Tanjungjaya	14-08-1996
20	Asli SHM No.634/Tanjungjaya	14-08-1996
21	Asli SHM No.635/Tanjungjaya	14-08-1996
22	Asli SHM No.636/Tanjungjaya	14-08-1996

Hal. 101 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Salinan SKMHT No.32	18-06-2004
24	Salinan APHT No. 196/2004	06-07-2004
25	Asli SHT No. 158/2004	15-07-2004
26	Asli SHM No.809/Tanjungjaya	26-12-1996
27	Asli SHM No.867/Tanjungjaya	02-04-1998
28	Asli SHM No.868/Tanjungjaya	02-04-1998
29	Asli SHM No.869/Tanjungjaya	02-04-1998
30	Asli SHM No.870/Tanjungjaya	02-04-1998
31	Asli SHM No.871/Tanjungjaya	02-04-1998
32	Asli SHM No.872/Tanjungjaya	02-04-1998
33	Asli SHM No.873/Tanjungjaya	02-04-1998
34	Salinan SKMHT No.42	18-06-2004
35	Salinan APHT No.206/2004	06-07-2004
36	Asli SHT No. 163/2004	15-07-2004
37	Asli SHM No.764/Tanjungjaya	26-12-1996
38	Asli SHM No.767/Tanjungjaya	26-12-1996
39	Asli SHM No.769/Tanjungjaya	26-12-1996
40	Asli SHM No.770/Tanjungjaya	26-12-1996
41	Asli SHM No.774/Tanjungjaya	26-12-1996
42	Asli SHM No.776/Tanjungjaya	26-12-1996
43	Asli SHM No.778/Tanjungjaya	26-12-1996
44	Asli SHM No.779/Tanjungjaya	26-12-1996
45	Asli SHM No.782/Tanjungjaya	26-12-1996
46	Salinan SKMHT No.40	18-06-2004
47	Salinan APHT No.204/2004	06-07-2004
48	Asli SHT No.161/2004	15-07-2004
49	Asli SHM No.637/Tanjungjaya	14-08-1996
50	Asli SHM No.642/Tanjungjaya	14-08-1996
51	Asli SHM No.644/Tanjungjaya	14-08-1996
52	Asli SHM No.664/Tanjungjaya	26-12-1996
53	Asli SHM No.665/Tanjungjaya	26-12-1996
54	Asli SHM No.666/Tanjungjaya	26-12-1996
55	Asli SHM No.667/Tanjungjaya	26-12-1996
56	Asli SHM No.668/Tanjungjaya	26-12-1996
57	Asli SHM No.669/Tanjungjaya	26-12-1996
58	Salinan SKMHT No.33	18-06-2004
59	Salinan APHT No. 197/2004	06-07-2004
60	Asli SHT No. 165/2004	15-07-2004
61	Asli SHM No.752/Tanjungjaya	26-12-1996
62	Asli SHM No.753/Tanjungjaya	26-12-1996
63	Asli SHM No.754/Tanjungjaya	26-12-1996
64	Asli SHM No.755/Tanjungjaya	26-12-1996
65	Asli SHM No.756/Tanjungjaya	26-12-1996
66	Asli SHM No.758/Tanjungjaya	26-12-1996
67	Asli SHM No.759/Tanjungjaya	26-12-1996
68	Asli SHM No.760/Tanjungjaya	26-12-1996
69	Asli SHM No.763/Tanjungjaya	26-12-1996
70	Salinan SKMHT No. 39	18-06-2004
71	Salinan APHT No.203/2004	06-07-2004
72	Asli SHT No. 157/2004	15-07-2004

Hal. 102 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



2. Dokumen Akta Jual Beli :

a. Dokumen Akta Jual Beli I :

No	URAIAN / DOKUMEN		TANGGAL
1	Salinan Akta Jual Beli	No.72/2004	08-06-2004
2	Salinan Akta Jual Beli	No.73/2004	08-06-2004
3	Salinan Akta Jual Beli	No.74/2004	08-06-2004
4	Salinan Akta Jual Beli	No.75/2004	08-06-2004
5	Salinan Akta Jual Beli	No.76/2004	08-06-2004
6	Salinan Akta Jual Beli	No.77/2004	08-06-2004
7	Salinan Akta Jual Beli	No.78/2004	08-06-2004
8	Salinan Akta Jual Beli	No.79/2004	08-06-2004
9	Salinan Akta Jual Beli	No.80/2004	08-06-2004
10	Salinan Akta Jual Beli	No.81/2004	08-06-2004
11	Salinan Akta Jual Beli	No.82/2004	08-06-2004
12	Salinan Akta Jual Beli	No.83/2004	08-06-2004
13	Salinan Akta Jual Beli	No.84/2004	08-06-2004
14	Salinan Akta Jual Beli	No.85/2004	08-06-2004
15	Salinan Akta Jual Beli	No.86/2004	08-06-2004
16	Salinan Akta Jual Beli	No.87/2004	08-06-2004
17	Salinan Akta Jual Beli	No.88/2004	08-06-2004
18	Salinan Akta Jual Beli	No.89/2004	08-06-2004
19	Salinan Akta Jual Beli	No.90/2004	08-06-2004
20	Salinan Akta Jual Beli	No.91/2004	08-06-2004
21	Salinan Akta Jual Beli	No.92/2004	08-06-2004
22	Salinan Akta Jual Beli	No.93/2004	08-06-2004
23	Salinan Akta Jual Beli	No.94/2004	08-06-2004
24	Salinan Akta Jual Beli	No.95/2004	08-06-2004
25	Salinan Akta Jual Beli	No.96/2004	08-06-2004
26	Salinan Akta Jual Beli	No.97/2004	08-06-2004
27	Salinan Akta Jual Beli	No.98/2004	08-06-2004
28	Salinan Akta Jual Beli	No.99/2004	08-06-2004
29	Salinan Akta Jual Beli	No. 100/2004	08-06-2004
30	Salinan Akta Jual Beli	No.101/2004	08-06-2004
31	Salinan Akta Jual Beli	No. 102/2004	08-06-2004
32	Salinan Akta Jual Beli	No. 103/2004	08-06-2004
33	Salinan Akta Jual Beli	No. 104/2004	08-06-2004
34	Salinan Akta Jual Beli	No. 105/2004	08-06-2004
35	Salinan Akta Jual Beli	No. 106/2004	08-06-2004
36	Salinan Akta Jual Beli	No.107/2004	08-06-2004
37	Salinan Akta Jual Beli	No. 108/2004	08-06-2004
38	Salinan Akta Jual Beli	No. 109/2004	08-06-2004
39	Salinan Akta Jual Beli	No. 110/2004	08-06-2004
40	Salinan Akta Jual Beli	No.111/2004	08-06-2004
41	Salinan Akta Jual Beli	No. 112/2004	08-06-2004
42	Salinan Akta Jual Beli	No. 113/2004	08-06-2004
43	Salinan Akta Jual Beli	No. 114/2004	09-06-2004
44	Salinan Akta Jual Beli	No.115/2004	09-06-2004
45	Salinan Akta Jual Beli	No. 116/2004	09-06-2004
46	Salinan Akta Jual Beli	No. 117/2004	09-06-2004
47	Salinan Akta Jual Beli	No. 118/2004	09-06-2004
48	Salinan Akta Jual Beli	No. 119/2004	09-06-2004
49	Salinan Akta Jual Beli	No. 120/2004	09-06-2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Salinan Akta Jual Beli	No. 121/2004	09-06-2004
51	Salinan Akta Jual Beli	No. 122/2004	09-06-2004
52	Salinan Akta Jual Beli	No. 123/2004	09-06-2004
53	Salinan Akta Jual Beli	No. 124/2004	09-06-2004
54	Salinan Akta Jual Beli	No. 125/2004	09-06-2004
55	Salinan Akta Jual Beli	No. 126/2004	09-06-2004
56	Salinan Akta Jual Beli	No. 127/2004	09-06-2004
57	Salinan Akta Jual Beli	No. 128/2004	09-06-2004
58	Salinan Akta Jual Beli	No. 129/2004	09-06-2004
59	Salinan Akta Jual Beli	No. 130/2004	09-06-2004
60	Salinan Akta Jual Beli	No. 131/2004	09-06-2004
61	Salinan Akta Jual Beli	No. 132/2004	09-06-2004
62	Salinan Akta Jual Beli	No. 133/2004	09-06-2004
63	Salinan Akta Jual Beli	No. 134/2004	09-06-2004
64	Salinan Akta Jual Beli	No. 135/2004	09-06-2004
65	Salinan Akta Jual Beli	No. 136/2004	09-06-2004
66	Salinan Akta Jual Beli	No.137/2004	09-06-2004
67	Salinan Akta Jual Beli	No. 138/2004	09-06-2004
68	Salinan Akta Jual Beli	No. 139/2004	09-06-2004
69	Salinan Akta Jual Beli	No. 140/2004	09-06-2004
70	Salinan Akta Jual Beli	No. 141/2004	09-06-2004
71	Salinan Akta Jual Beli	No. 142/2004	09-06-2004
72	Salinan Akta Jual Beli	No. 143/2004	09-06-2004
73	Salinan Akta Jual Beli	No. 144/2004	09-06-2004
74	Salinan Akta Jual Beli	No.145/2004	09-06-2004
75	Salinan Akta Jual Beli	No. 146/2004	09-06-2004
76	Salinan Akta Jual Beli	No. 147/2004	09-06-2004
77	Salinan Akta Jual Beli	No. 148/2004	09-06-2004
78	Salinan Akta Jual Beli	No. 149/2004	09-06-2004
79	Salinan Akta Jual Beli	No. 150/2004	09-06-2004

b. Dokumen Akta Jual Beli II :

Akta Jual Beli II :

No	URAIAN / DOKUMEN		TANGGAL
1	Salinan Akta Jual Beli	No.151/2004	09-06-2004
2	Salinan Akta Jual Beli	No.152/2004	09-06-2004
3	Salinan Akta Jual Beli	No.153/2004	10-06-2004
4	Salinan Akta Jual Beli	No.155/2004	10-06-2004
5	Salinan Akta Jual Beli	No.156/2004	10-06-2004
6	Salinan Akta Jual Beli	No.157/2004	10-06-2004
7	Salinan Akta Jual Beli	No.158/2004	10-06-2004
8	Salinan Akta Jual Beli	No.159/2004	10-06-2004
9	Salinan Akta Jual Beli	No.160/2004	10-06-2004
10	Salinan Akta Jual Beli	No.161/2004	10-06-2004
11	Salinan Akta Jual Beli	No.162/2004	10-06-2004
12	Salinan Akta Jual Beli	No.163/2004	10-06-2004
13	Salinan Akta Jual Beli	No.164/2004	10-06-2004
14	Salinan Akta Jual Beli	No.165/2004	10-06-2004
15	Salinan Akta Jual Beli	No.166/2004	10-06-2004
16	Salinan Akta Jual Beli	No.167/2004	10-06-2004
17	Salinan Akta Jual Beli	No.168/2004	10-06-2004
18	Salinan Akta Jual Beli	No.169/2004	10-06-2004

Hal. 104 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Salinan Akta Jual Beli	No.170/2004	10-06-2004
20	Salinan Akta Jual Beli	No.171/2004	10-06-2004
21	Salinan Akta Jual Beli	No.172/2004	10-06-2004
22	Salinan Akta Jual Beli	No.173/2004	10-06-2004
23	Salinan Akta Jual Beli	No.174/2004	10-06-2004
24	Salinan Akta Jual Beli	No.175/2004	10-06-2004
25	Salinan Akta Jual Beli	No.176/2004	10-06-2004
26	Salinan Akta Jual Beli	No.177/2004	10-06-2004
27	Salinan Akta Jual Beli	No.178/2004	10-06-2004
28	Salinan Akta Jual Beli	No.179/2004	10-06-2004
29	Salinan Akta Jual Beli	No. 180/2004	10-06-2004
30	Salinan Akta Jual Beli	No.181/2004	10-06-2004
31	Salinan Akta Jual Beli	No. 182/2004	10-06-2004

3. Dokumen Pengikatan Jaminan Lainnya :

a. Dokumen I :

No	URAIAN 1 DOKUMEN	TANGGAL
1	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.22	11-06-2003
2	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-008911.HT.04.06.TH.2003/STD	08-08-2003
3	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.23	11-06-2003
4	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-008981 HT.04.06.TH.2003/STD	12-08-2003
5	Asli BPKB No.9307492 G	02-06-2000
6	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.24	11-06-2003
7	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia NO.W7-008909 HT.04.06.TH.2003/STD	08-08-2003
8	Salinan Akta Pemberian Jaminan Borg No.29	11-06-2003
9	Salinan Akta Jaminan Fidusia No.43	18-06-2004
10	Salinan Akta Pernyataan SOL No.25	11-06-2003
11	Copy sesuai asli Draft Hutang Pemegang Saham	11-06-2003
12	Asli Surat Persetujuan Komisaris	28-11-2001
13	Asli Facsimili	09-06-2003
14	Salinan Surat No.KPI/9/1659/R	08-07-2003
15	Asli Tanda Terima	24-09-2003
16	Copy Surat Persetujuan a.n Ny.Dwi	15-06-2004
17	Copy Surat Persetujuan a.n Boy Manopelangi	15-06-2004
18	Salinan Surat No.MRK/3/219/R	17-06-2004
19	Asli Surat Pernyataan	18-06-2004
20	Asli Surat Keterangan NO.024/NA/I/2004	18-06-2004
21	Salinan Surat No.KPS/2/1840/R	08-07-2004
22	Asli Tanda Terima	08-07-2004
23	Asli Memo	15-07-2004
24	Asli Tanda Terima	08-07-2004
25	Asli Tanda Terima	06-01-2005
26	Daftar Pemegang Hak Atas Tanah	
27	Copy Surat No.KKS/4/0090/R	08-01-2008
28	Asli Surat No. 021/LIMEC/TSY/XII/2007	04-12-2007
29	Asli Surat Persetujuan dari JONNY HERMAN beserta KTP atas nama JONNY HERMAN dan Kwitansi kosong yang telah di tandatangani oleh JONNY HERMAN	04-12-2007

Hal. 105 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen II:

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli Perjanjian Fidusia No.01.017	30-11-2001
2	Asli Perjanjian Fidusia No.02.034	29-11-2002
3	Asli Perjanjian Fidusia No.02/012	25-06-2002
4	Salinan Akta Pemberian Jaminan Borg No. 14	06-12-2001
5	Copy Salinan APPH No. 12	28-05-2003
6	Copy Salinan APPH No. 13	28-05-2003
7	Copy Salinan APPH No. 14	28-05-2003
8	Copy Salinan APPH No. 15	28-05-2003
9	Copy Salinan APPH No.03	04-06-2003
10	Salinan APPH No.20	11-06-2003
11	Salinan APPH No.21	11-06-2003
12	Salinan Akta PPJPK No.26	11-06-2003
13	Salinan Akta PPJPK No.27	11-06-2003
14	Salinan Akta Pernyataan No.28	11-06-2003
15	Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.45	16-07-2003
16	Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.44	16-07-2003
17	Salinan Akta Pernyataan No.62	19-11-2003
18	Salinan Akta Pernyataan No.64	19-11-2003
19	Salinan Akta Pernyataan No.63	19-11-2003
20	Salinan Akta Pernyataan No.65	19-11-2003
21	Salinan Akta Pernyataan No.66	19-11-2003
22	Salinan Akta Pernyataan No.67	19-11-2003
23	Salinan Akta Pembatalan Perjanjian No.68	19-11-2003
24	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.69	19-11-2003
25	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.70	19-11-2003
26	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.71	19-11-2003
27	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.72	19-11-2003
28	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.73	19-11-2003
29	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.74	19-11-2003
30	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.75	19-11-2003
31	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.76	19-11-2003
32	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.77	19-11-2003
33	Salinan Akta Perjanjian Pembatalan No.78	19-11-2003
34	Salinan Akta SKMHT No.98	21-11-2003
35	Salinan Akta SKMHT No.99	21-11-2003
36	Asli Tanda Terima	06-06-2003
37	Copy surat NO.N/16/XII/JKT/2003	30-12-2003

3. Barang bukti berupa uang :

Sejumlah Rp1.762.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada : ELVY. K, Pegawai PT. BNI Persero Tbk Divisi SDM, Jalan Letjend S. Parman Kav. 55- 56 Jakarta Selatan, disimpan/dititipkan di Rekening PT. BNI Persero Tbk Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat Nomor 0123383867.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara Cq PT. Bank BNI persero (tbk).

4. Dokumen Surat-surat:

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Salinan Surat No.KPI/9/1246/R	02-06-2003
2	Salinan Surat No.W12/6.1/2162/R	03-06-2003
3	Asli Berita Acara Serah Terima	03-06-2003
4	Laporan Persediaan Barang	
5	Copy Surat NO.150/LIMEC/VIII/2003	27-08-2003
6	Copy KTP-KTP	
7	Asli Surat Pernyataan a.n Ujang Syamsudin	10-06-2004
8	Asli Surat Pernyataan a.n Tina Linda Halim	
9	Asli Surat Pernyataan a.n Antonia Agustina I.	
10	Asli Surat Pernyataan a.n Sunarsih	
11	Asli Surat Pernyataan a.n Widiati Astuti	
12	Asli Surat Pernyataan a.n Riana Wahyuni	
13	Asli Surat Pernyataan a.n Parlin	
14	Asli Surat Pernyataan a.n Suryanti	
15	Asli Surat Pernyataan a.n Sutrisno	
16	Asli Memo No.KPI/9/4039	22-11-2005
17	Salinan Memo No.OPR/5.1/2351	29-12-2005
18	Copy Memo No.KPS/2/100	17-01-2005
19	Copy Memo No.KPI/7/1268	28-07-2006
20	Copy Memo No.OPR/5.1/1470	03-08-2006
21	Copy Tanda Terima	19-12-2005
22	Copy Letter Of Appointment	16-09-2005
23	Laporan Penerimaan/Outstanding tagihan	16-09-2005
24	Monitoring KMK Transaksional	
25	Salinan Surat No.KPI/9/1441/R	13-06-2003
26	Copy Surat dari PT. Lima Jayakarta Utama	03-11-2003
27	Asli Tanda Terima Perjanjian Kredit	
28	Salinan Surat No.KPS/4/0723/R	11-03-2004
29	Salinan Surat No.DRK/3/492/R	19-10-2004
30	Copy Surat No.DRK/3/369/R	07-04-2005
31	Copy Surat No.KPI/7/2006	29-09-2006
32	Copy SHM No.241/Pasar Minggu	
33	Copy Laporan Penilaian Aset	
34	List Nilai Taksasi	
35	Copy Telex	
36	Copy Tanda Terima	

Dokumen Perjanjian Kredit (PK) dan Surat Keputusan Kredit (SKK) :

b. Dokumen I:

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Copy SKK No.KPI/2/047	28-05-2003
2	Asli PK No.2003/KPI/30	11-06-2003
3	Asli PPGB No.2003/KPI/PPGB/02	11-06-2003
4	Salinan SKK No.KPS/2/016/R	10-02-2004
5	Asli PK No.2004/KPS/06	11-02-2004

Hal. 107 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Asli P3K No.(1) 2003/KPI/30	11-02-2004
7	Asli P4GB No.(1) 2003/KPI/PPGB/02	11-02-2004
8	Copy Fax No.411943/Rabu/KPS/2	11-02-2004
9	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/06	18-06-2004
10	Asli P3K No.(2) 2003/KPI/30	18-06-2004
11	Asli P4GB No.(2) 2003/KPI/PPGB/02	18-06-2004
12	Asli Tanda Terima	29-06-2004
13	Salinan SKK No.KPS/2/199/R	02-12-2004
14	Asli PK No.2004/KPS/68	02-12-2004
15	Salinan SKK No.KPS/2/205/R	14-12-2004
16	Asli PK No.2004/KPS/69	16-12-2004
17	Copy Tanda Terima	27-12-2004
18	Salinan SKK No.KPS/2/216/R	24-12-2004
19	Asli PK No.2004/KPS/71	27-12-2004
20	Copy Fax No.03.1885/Senin/KPS	27-12-2004
21	Salinan SKK No.KPS/2/001/R	05-01-2005
22	Asli PK No.2005/KPS/01	
23	Salinan SKK No.KPS/2/010/R	17-01-2005
24	Asli PK No.2005/KPS/003	17-01-2005
25	Salinan SKK No.KPS/2/025/R	27-01-2005
26	Asli PK No.2005/KPS/004	27-01-2005
27	Salinan SKK No.KPS/2/027/R	03-02-2005
28	Asli PK No.2005/KPS/005	04-02-2005
29	Salinan SKK No.KPS/2/029/R	15-02-2005
30	Asli PK No.2005/KPS/012	15-02-2005
31	Copy Fax No.14.3767/Rabu/KPS	23-02-2005
32	Asli PK No.2005/KPS/015	22-02-2005
33	Asli PK No.2005/KPS/016	25-02-2005
34	Salinan SKK No.KPS/2/038/R	23-02-2005
35	Salinan SKK No.KPI/2/046/R	08-03-2005
36	Asli PK No.002/KPI/PK/2005	08-03-2005
37	Salinan SKK No.KPI/2/054/R	21-03-2005
38	Asli PK NO.004/KPI/PK/2005	21-03-2005
39	Asli Tanda Terima	21-03-2005
40	Salinan SKK No.KPI/2/060/R	30-03-2005
41	Asli PK No.005/KP1/PK/2005	30-03-2005
42	Asli Tanda Terima	12-04-2005
43	Salinan SKK No.KPI/2/076/R	12-04-2005
44	Asli PK NO.008/KPI/PK/2005	12-04-2005
45	Copy Fax No.21.3499/Rabu/KPI	13-04-2005
46	Salinan SKK No.KPI/2/082/R	21-04-2005
47	Asli PK NO.009/KPI/PK/2005	25-04-2005
48	Copy Fax No.23.2600/Selasa/KPI	26-04-2005
49	Asli Tanda Terima	25-04-2005
50	Salinan SKK No.KPI/2/090/R	06-05-2005
51	Asli PK No.014/KPI/PK/2005	11-05-2005
52	Salinan SKK No.KPI/2/110/R	26-05-2005
53	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/68	06-06-2005
54	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/69	06-06-2005
55	Asli P3K No.(1) 2004/KPS/71	06-06-2005
56	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/01	06-06-2005
57	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/003	06-06-2005
58	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/004	06-06-2005

Hal. 108 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/005	06-06-2005
60	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/012	06-06-2005
61	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/015	06-06-2005
62	Asli P3K No.(1) 2005/KPS/016	06-06-2005
63	Asli P3K No.(1) 002/KPI/PK/2005	06-06-2005
64	Salinan SKK No.KPI/4/127/R	28-06-2005
65	Asli P3K No.(2) 2004/KPS/06	12-07-2005
66	Asli P3K No. (3) 2003/KPI/30	12-07-2005
67	Asli P4GB No.(3) 2003/KPI/PPGB/02	12-07-2005
68	Asli P3K No.(2) 2005/KPS/016	09-08-2006
69	Asli P3K No.(1) 004/KPI/PK/2005	09-08-2006
70	Asli P3K No.(1) 005/KPI/PK/2005	09-08-2006
71	Asli P3K No.(1) 008/KPI/PK/2005	09-08-2006
72	Asli P3K No.(1) 009/KPI/PK/2005	09-08-2006
73	Asli P3K No.(1) 014/KPI/PK/2005	09-08-2006
74	Asli P4GB No.(4) 2003/KPI/PPGB/02	09-08-2006
75	Asli P3K No.(3) 2004/KPS/06	09-08-2006
76	Asli P3K No.(4) 2003/KPI/30	09-08-2006
77	Asli Tanda Terima	12-03-2004

Dokumen II :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Salinan SKK No.W.12/3.1/7134/R	28-11-2001
2.	Asli PK No.01.060	30-11-2001
3.	Asli PK No.01.061	30-11-2001
4.	Asli PPGB No.W.12/01/020	30-11-2001
5.	Salinan SKK No.W.12/3.1/2370/R	21-06-2002
6.	Asli PK No.02.036	25-06-2002
7.	Salinan SKK No.W. 12/3.1/3976/R	01-08-2002
8.	Addendum PPGB No.(1) W.12/01/020	01-08-2002
9.	Salinan SKK No.W.12/3.1/4805/R	08-10-2002
10.	Asli PK No.02.071	09-10-2002
11.	Salinan SKK No.W.12/3.1/6700/R	27-10-2002
12.	Asli PK No.02.108	29-10-2002
13.	Asli PPGB No.W.12/02/027	29-11-2002
14.	Salinan SKK No.W.12/3.1/1233/R	28-03-2003
15.	Asli PK No.03024	31-03-2003
16.	Copy SKK No.KPI/057	19-06-2003
17.	Asli PK No.2003/KPI/32	26-02-2003
18.	Asli PK No. 2003/KPI/33	26-03-2003
19.	Copy Surat No.07/WW/V/2003	03-05-2003
20.	Asli PK No.2003/KPI/24	26-03-2003
21.	Copy Surat No.21/WW/V/2003	09-06-2003
22.	Salinan SKK No.KPI/2/071/R	15-07-2003
23.	Asli PK No.2003/KPI/40	16-07-2003
24.	Asli PK No.2003/KPI/41	16-07-2003
25.	Salinan SKK No.KPI/2/102/R	03-09-2003
26.	Asli PK No.2003/KPI/58	04-09-2003
27.	Asli PK No.2003/KPI/59	04-09-2003
28.	Asli PK No.2003/KPI/60	04-09-2003
29.	Asli PK No.2003/KPI/61	04-09-2003
30.	Copy SKK No. KPI/2/134/R	16-10-2003
31.	Asli PK No.2003/KPI/76	16-10-2003
32.	Asli PK No.2003/KPI/77	16-03-2003
33.	Asli PK No.2003/KPI/78	16-03-2003
34.	Asli PK No.2003/KPI/79	16-03-2003
35.	Asli Tanda Terima	22-10-2003
36.	Salinan SKK No.KPI/2/188/R	08-12-2003
37.	Asli PK No.2003/KPI/99	08-12-2003
38.	Asli PK No.2003/KPI/100	08-12-2003
39.	Copy SKK No.KPS/2/008/R	20-01-2004

Hal. 109 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



40.	Asli PK No.2004/KPS/03	20-01-2004
41.	Salinan SKK No.KPS/2/011/R	30-01-2004
42.	Asli PK No.2004/KPS/04	03-02-2004
43.	Asli PK No.2004/KPS/05	03-02-2004
44.	Copy SKK No.KPS/2/028/R	19-02-2004
45.	Asli PK No.2004/KPS/14	24-02-2004
46.	Copy Fax No.44.2186/Rabu/KPS	25-02-2004
47.	Salinan SKK No.KPS/2/030/R	04-03-2004
48.	Asli PK No.2004/KPS/15	08-03-2004
49.	Salinan SKK No.KPS/2/033/R	19-03-2004
50.	Asli PK No.2004/KPS/16	23-03-2004
51.	Salinan SKK No.KPS/2/039/R	02-04-2004
52.	Asli PK No.2004/KPS/18	02-04-2004
53.	Salinan SKK No.KPS/2/042/R	19-04-2004
54.	Asli PK No.2004/KPS/19	19-04-2004
55.	Salinan SKK No.KPS/2/079/R	16-06-2004
56.	Salinan SKK No.KPS/2/081/R	17-06-2004
57.	Asli PK No.2004/KPS/29	18-06-2004
58.	Copy SKK No.KPS/2/104/R	
59.	Asli PK No.2004/KPS/40	29-06-2004
60.	Salinan SKK No.KPS/2/114/R	19-07-2004
61.	Asli PK No.2004/KPS/43	20-07-2004
62.	Salinan SKK No.KPS/2/122/R	09-08-2004
63.	Asli PK No.2004/KPS/47	10-08-2004
64.	Salinan SKK No.KPS/2/131/R	19-08-2004
65.	Asli PK No.2004/KPS/49	20-08-2004
66.	Salinan SKK No.KPS/2/140/R	30-08-2004
67.	Asli PK No.2004/KPS/50	31-08-2004
68.	Salinan SKK No.KPS/2/148/R	14-09-2004
69.	Asli PK No.2004/KPS/54	15-09-2004
70.	Salinan SKK No.KPS/2/155/R	27-09-2004
71.	Asli PK No.2004/KPS/54	27-09-2004
72.	Asli Tanda Terima	12-10-2004
73.	Salinan SKK No.KPS/2/166/R	15-10-2004
74.	Asli PK No.2004/KPS/57	15-04-2004
75.	Salinan SKK No.KPS/2/171/R	27-10-2004
76.	Asli PK No.2004/KPS/60	28-10-2004
77.	Salinan SKK No.KPS/2/181/R	10-11-2004
78.	Asli PK No.2004/KPS/64	10-11-2004
79.	Asli Tanda Terima	16-12-2004
80.	Salinan SKK No.KPI/12/214/R	21-04-2005
81.	Monitoring KMK Transaksional	
82.	Copy Fax No.16.4365/Jum'45/KPI	20-06-2003

Dokumen Kontrak Kerja PT.Lima Jayakarta Utama :

Dokumen I :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Asli KK No.0171/SP-06/LIMEC/2003	30-06-2003
2.	Asli KK No.0162/SP-06/LIMEC/2003	30-06-2003
3.	Asli KK No.0167/SP-06/LIMEC/2003	30-06-2003
4.	Asli KK No.0182/SP-07/LIMEC/2003	25-07-2003
5.	Asli KK No.0186/SPP/LIMEC/2003	28-07-2003
6.	Asli KK No.0192/SP-09/LIMEC/2003	05-09-2003
7.	Asli KK No.0197/SP-09/LIMEC/2003	09-09-2003
8.	Asli KK No.0202/SP-09/LIMEC/2003	15-09-2003
9.	Asli KK No.0119/SP-09/LIMEC/2003	11-09-2003
10.	Asli KK No.0214/SP-10/LIMEC/2003	17-10-2003
11.	Asli KK No.0219/SP-10/LIMEC/2003	10-10-2003
12.	Asli KK No.0217/SP-12/LIMEC/2003	22-10-2003
13.	Asli KK No.0229/SP-12/LIMEC/2003	12-12-2003
14.	Asli KK No.0221/SP-10/LIMEC/2003	13-10-2003
15.	Asli KK No.0233/SP-12/LIMEC/2003	16-12-2003
16.	Asli KK No.034/SP-I/LIMEC/2003	06-02-2004
17.	Asli KK No.038/SP-I/LIMEC/2004	11-02-2004
18.	Asli KK No.043/SP-II/LIMEC/2004	16-02-2004
19.	Asli KK No.045/SP-II/LIMEC/2004	17-02-2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Asli KK No.046/SP-II/LIMEC/2004	16-02-2004
21.	Asli KK No.050/SP-II/LIMEC/2004	24-02-2004
22.	Asli KK No.049/SP-II/LIMEC/2004	20-02-2004
23.	Asli KK No.047/SP-II/LIMEC/2004	24-02-2004
24.	Asli KK No.051/SP-II/LIMEC/2004	26-02-2004
25.	Asli KK No.054/SP-II/LIMEC/2004	27-02-2004
26.	Asli PK No.056/SP-II/LIMEC/2004	01-03-2004
27.	Asli KK No.057/SP-II/LIMEC/2004	02-03-2004
28.	Asli KK No.130/SP-IV/LIMEC/2004	22-03-2004
29.	11 Addendum	29-08-2005
30.	Ali Tanda Terima	15-04-2004

Dokumen II :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Asli KK No.435/SP-IX/LIMEC/2004	09-09-2004
2.	Asli KK No.438/SP-IX/LIMEC/2004	09-09-2004
3.	Asli KK No.446/SP-IX/LIMEC/2004	15-09-2004
4.	Asli KK No.450/SP-IX/LIMEC/2004	17-09-2004
5.	Asli KK No.455/SP-IX/LIMEC/2004	20-09-2004
6.	Asli KK No.458/SP-IX/LIMEC/2004	21-09-2004
7.	Asli KK No.460/SP-IX/LIMEC/2004	22-09-2004
8.	Asli KK No.465/SP-IX/LIMEC/2004	24-09-2004
9.	Asli KK No.469/SP-IX/LIMEC/2004	27-09-2004
10.	Asli KK No.472/SP-IX/LIMEC/2004	30-09-2004
11.	Asli KK No.476/SP-IX/LIMEC/2004	01-10-2004
12.	Asli KK No.480/SP-IX/LIMEC/2004	04-10-2004
13.	Asli KK No.482/SP-IX/LIMEC/2004	05-10-2004
14.	Asli KK No.490/SP-IX/LIMEC/2004	08-10-2004
15.	Asli KK No.496/SP-IX/LIMEC/2004	11-10-2004
16.	Asli KK No.504/SP-IX/LIMEC/2004	14-10-2004
17.	Asli KK No.508/SP-IX/LIMEC/2004	15-10-2004
18.	Asli KK No.512/SP-IX/LIMEC/2004	18-10-2004
19.	Asli KK No.515/SP-IX/LIMEC/2004	22-10-2004
20.	Asli KK No.520/SP-IX/LIMEC/2004	25-10-2004
21.	Asli KK No.369/SP-VIII/LIMEC/2004	13-10-2004
22.	Asli KK No.376/SP-VIII/LIMEC/2004	16-08-2004
23.	Asli KK No.382/SP-VIII/LIMEC/2004	19-08-2004
24.	Asli KK No.385/SP-VIII/LIMEC/2004	20-08-2004
25.	Asli KK No.389/SP-VIII/LIMEC/2004	23-08-2004
26.	Asli PK No.394/SP-VIII/LIMEC/2004	25-08-2004
27.	Asli KK No.398/SP-VIII/LIMEC/2004	27-08-2004
28.	Asli KK No.402/SP-VIII/LIMEC/2004	27-08-2004
29.	Asli KK No.407/SP-VIII/LIMEC/2004	29-08-2005
30.	Asli KK No.410/SP-VIII/LIMEC/2004	30-08-2004
31.	Asli KK No.415/SP-IX/LIMEC/2004	01-09-2004
32.	Asli KK No.419/SP-IX/LIMEC/2004	02-09-2004
33.	Asli KK No.422/SP-IX/LIMEC/2004	03-09-2004
34.	Asli KK No.526/SP-X/LIMEC/2004	27-10-2004
35.	Asli KK No.531/SP-X/LIMEC/2004	01-11-2004
36.	Asli KK No.333/SP-VII/LIMEC/2004	28-07-2004
37.	Asli KK No.340/SP-VII/LIMEC/2004	30-07-2004
38.	Asli KK No.343/SP-VII/LIMEC/2004	20-08-2004
39.	Asli KK No.347/SP-VII/LIMEC/2004	05-08-2004
40.	Asli KK No.356/SP-VII/LIMEC/2004	09-08-2004
41.	Asli KK No.365/SP-VIII/LIMEC/2004	10-08-2004
42.	Asli KK No.368/SP-VIII/LIMEC/2004	12-08-2004
43.	Asli KK No.644/SP-VII/LIMEC/2004	13-08-2004
44.	Asli KK No.652/SP-VII/LIMEC/2004	24-12-2004
45.	Asli KK No.653/SP-VII/LIMEC/2004	30-12-2004
46.	Asli KK No.653/SP-VII/LIMEC/2004	30-12-2004
47.	Asli KK No.654/SP-VII/LIMEC/2004	31-12-2004
48.	Asli KK No.001SP-I/LIMEC/2004	03-12-2004
49.	Asli KK No.607/SP-XII/LIMEC/2004	13-12-2004
50.	Asli KK No.612/SP-XII/LIMEC/2004	15-12-2004
51.	Asli KK No.615/SP-XII/LIMEC/2004	17-12-2004
52.	Asli KK No.618/SP-XII/LIMEC/2004	20-12-2004

Hal. 111 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	Asli KK No.548/SP-XI/LIMEC/2004	17-11-2004
54.	Asli KK No.552/SP-XI/LIMEC/2004	19-11-2004
55.	Asli KK No.588/SP-XI/LIMEC/2004	02-12-2004
56.	Asli KK No.592/SP-XI/LIMEC/2004	03-12-2004
57.	Asli KK No.596/SP-XI/LIMEC/2004	03-12-2004
58.	Asli KK No.601/SP-XI/LIMEC/2004	06-12-2004
59.	Asli KK No.002/SP-I/LIMEC/2004	03-01-2004
60.	Asli KK No.004/SP-XI/LIMEC/2004	04-01-2005
61.	Asli KK No.009/SP-XI/LIMEC/2005	07-01-2005
62.	Asli KK No.011/SP-XI/LIMEC/2005	10-02-2005
63.	Asli KK No.012/SP-XI/LIMEC/2005	10-01-2005
64.	Asli KK No.015/SP-XI/LIMEC/2005	11-01-2005
65.	Asli KK No.018/SP-XI/LIMEC/2005	14-01-2005
66.	Asli KK No.020/SP-XI/LIMEC/2005	17-01-2005
67.	Asli KK No.026/SP-XI/LIMEC/2005	20-01-2005
68.	Asli KK No.025/SP-XI/LIMEC/2005	20-01-2005
69.	Asli KK No.028/SP-XI/LIMEC/2005	24-01-2005
70.	Asli KK No.033/SP-XI/LIMEC/2005	27-01-2005
71.	Asli KK No.037/SP-XI/LIMEC/2005	01-02-2005
72.	Asli KK No.046/SP-II/LIMEC/2005	03-02-2005
73.	Asli KK No.048/SP-II/LIMEC/2005	07-02-2005
74.	Asli KK No.051/SP-II/LIMEC/2005	14-02-2005
75.	Asli KK No.053/SP-II/LIMEC/2005	15-02-2005
76.	Asli KK No.091/SP-II/LIMEC/2005	10-03-2005
77.	Asli KK No.088/SP-III/LIMEC/2005	08-03-2005
78.	Asli KK No.085/SP-III/LIMEC/2005	07-03-2005
79.	Asli KK No.082/SP-III/LIMEC/2005	04-03-2005
80.	Asli KK No.076/SP-III/LIMEC/2005	03-03-2005
81.	Asli KK No.073/SP-III/LIMEC/2005	01-03-2005
82.	Asli KK No.069/SP-II/LIMEC/2005	28-02-2005
83.	Asli KK No.066/SP-II/LIMEC/2005	25-02-2005
84.	Asli KK No.046/SP-II/LIMEC/2005	08-02-2005
85.	Asli KK No.048/SP-II/LIMEC/2005	11-02-2005
86.	Asli KK No.051/SP-II/LIMEC/2005	14-02-2005
87.	Asli KK No.053/SP-II/LIMEC/2005	15-02-2005
88.	Asli KK No.136/SP-IV/LIMEC/2005	15-02-2005
89.	Asli KK No.130/SP-IV/LIMEC/2005	11-04-2005
90.	Asli KK No.096/SP-III/LIMEC/2005	14-03-2005
91.	Asli KK No.099/SP-III/LIMEC/2005	17-03-2005
92.	Asli KK No.106/SP-III/LIMEC/2005	21-03-2005
93.	Asli KK No.108/SP-III/LIMEC/2005	24-03-2005
94.	Asli KK No.148/SP-III/LIMEC/2005	25-04-2005
95.	Asli KK No.144/SP-IV/LIMEC/2005	21-04-2005
96.	Asli KK No.164/SP-IV/LIMEC/2005	28-04-2005
97.	Asli KK No.112/SP-III/LIMEC/2005	28-03-2005
98.	Asli KK No.115/SP-III/LIMEC/2005	31-03-2005
99.	Asli KK No.266/SP-VII/LIMEC/2005	12-06-2004
100.	Asli KK No.269/SP-VII/LIMEC/2004	13-06-2004
101.	Asli KK No.276/SP-VII/LIMEC/2004	14-06-2004
102.	Asli KK No.288/SP-VII/LIMEC/2004	16-06-2004
103.	Asli KK No.294/SP-VII/LIMEC/2004	20-06-2004
104.	Asli KK No.306/SP-VII/LIMEC/2004	21-07-2004
105.	Asli KK No.310/SP-VII/LIMEC/2004	21-07-2004
106.	Asli KK No.321/SP-VII/LIMEC/2004	23-07-2004
107.	Asli KK No.327/SP-VII/LIMEC/2004	26-03-2004
108.	Asli KK No.335/SP-VII/LIMEC/2004	27-07-2004
109.	Asli KK No.218/SP-VI/LIMEC/2004	23-06-2004
110.	Asli KK No.222/SP-VI/LIMEC/2004	25-06-2004
111.	Asli KK No.230/SP-VI/LIMEC/2004	28-06-2004
112.	Asli KK No.243/SP-VI/LIMEC/2004	30-06-2004
113.	Asli KK No.248/SP-VII/LIMEC/2004	02-07-2004
114.	Asli KK No.256/SP-VII/LIMEC/2004	06-07-2004
115.	Asli KK No.259/SP-VII/LIMEC/2004	08-07-2004
116.	Asli KK No.266/SP-VII/LIMEC/2004	09-07-2004
117.	Asli KK No.167/SP-V/LIMEC/2004	10-05-2004
118.	Asli KK No.174/SP-V/LIMEC/2004	14-05-2004
119.	Asli KK No.184/SP-V/LIMEC/2004	17-05-2004
120.	Asli KK No.190/SP-V/LIMEC/2004	24-05-2004
121.	Asli KK No.193/SP-V/LIMEC/2004	28-05-2004

Hal. 112 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.	Asli KK No.195/SP-VI/LIMEC/2004	04-06-2004
123.	Asli KK No.198/SP-VI/LIMEC/2004	10-06-2004
124.	Asli KK No.100/SP-VI/LIMEC/2004	14-06-2004
125.	Asli KK No.206/SP-VI/LIMEC/2004	16-06-2004
126.	Asli KK No.214/SP-VI/LIMEC/2004	21-06-2004
127.	Asli KK No.68/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
128.	Asli KK No.71/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
129.	Asli KK No.073/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
130.	Asli KK No.075/SP-III/LIMEC/2004	02-03-2004
131.	Asli KK No.77/SP-III/LIMEC/2004	11-03-2004
132.	Asli KK No.081/SP-III/LIMEC/2004	12-03-2004
133.	Asli KK No.84/SP-III/LIMEC/2004	16-03-2004
134.	Asli KK No.74/SP-III/LIMEC/2004	19-03-2004
135.	Asli KK No.82/SP-III/LIMEC/2004	26-03-2004
136.	Asli KK No.77/SP-III/LIMEC/2004	23-03-2004
137.	Asli KK No.68/SP-III/LIMEC/2004	15-03-2004
138.	Asli KK No.86/IV/LIMEC/2004	05-04-2004
139.	Asli KK No.89/SP-IV/LIMEC/2004	06-04-2004
140.	Asli KK No.90/SP-IV/LIMEC/2004	12-04-2004
141.	Asli KK No.93/SP-IV/LIMEC/2004	14-04-2004
142.	Asli KK No.42 Addendum	

Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) PT.Lima Jayakarta Utama :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli SPK No. 410/LIMEC/IX/2004	08-09-2004
2	Asli SPK No. 411/WW/VIII/2004	30-08-2004
3	Asli SPK No. 423/WW/IX/2004	03-09-2004
4	Asli SPK No. 428/WW/IX/2004	06-09-2004
5	Asli SPK No. 432/WW/IX/2004	08-09-2004
6	Asli SPK No. 434/WW/IX/2004	09-09-2004
7	Asli SPK No. 436/WW/IX/2004	10-09-2004
8	Asli SPK No. 459/LIMEC/IX/2004	22-09-2004
9	Asli SPK No. 444/WW/IX/2004	14-09-2004
10	Asli SPK No. 449/WW/IX/2004	16-09-2004
11	Asli SPK No. 454/WW/IX/2004	17-09-2004
12	Asli SPK No. 457/WW/IX/2004	20-09-2004
13	Asli SPK No. 462/WW/IX/2004	21-09-2004
14	Asli SPK No. 466/WW/IX/2004	22-09-2004
15	Asli SPK No. 497/LIMEC/X/2004	
16	Asli SPK No. 475/WW/IX/2004	24-09-2004
17	Asli SPK No. 478/WW/IX/2004	29-09-2004
18	Asli SPK No. 481/WW/X/2004	01-10-2004
19	Asli SPK No. 486/WW/X/2004	04-10-2004
20	Asli SPK No. 489/WW/X/2004	06-10-2004
21	Asli SPK No. 494/WW/X/2004	08-10-2004
22	Asli SPK No. 498/WW/X/2004	11-10-2004
23	Asli SPK No. 502/WW/X/2004	12-12-2004
24	Asli SPK No. 366/LIMEC/VIII/2004	18-08-2004
25	Asli SPK No. 348/WW/VIII/2004	04-08-2004
26	Asli SPK No. 354/WW/VIII/2004	06-08-2004
27	Asli SPK No. 357/WW/VIII/2004	09-08-2004
28	Asli SPK No. 361/WWA/III/2004	11-08-2004

Hal. 113 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Asli SPK No. 364/WW/VIII/2004	13-08-2004
30	Asli SPK No. 369/WW/VIII/2004	16-08-2004
31	Asli SPK No. 398/LIMEC/VIII/2004	27-08-2004
32	Asli SPK No. 377/WW/VIII/2004	18-08-2004
33	Asli SPK No. 378/WW/VIII/2004	18-08-2004
34	Asli SPK No. 388/WW/VIII/2004	20-08-2004
35	Asli SPK No. 390/WW/VIII/2004	20-08-2004
36	Asli SPK No. 396/WW/VIII/2004	23-08-2004
37	Asli SPK No. 401 /WW/VIII/2004	25-08-2004
38	Asli SPK No. 404/WW/VIII/2004	26-08-2004
39	Asli SPK No. 524/LIMEC/X/2004	26-10-2004
40	Asli SPK No. 507/WW/X/2004	18-10-2004
41	Asli SPK No. 512/WW/X/2004	22-10-2004
42	Asli SPK No. 278/LIMEC/II/2004	03-08-2004
43	Asli SPK No. 292/WW/VII/2004	19-07-2004
44	Asli SPK No. 301/WW/VII/2004	21-07-2004
45	Asli SPK No. 312/WW/I I/2004	23-07-2004
46	Asli SPK No. 319/WW/VI I/2004	26-07-2004
47	Asli SPK No. 324/WW/VII/2004	28-07-2004
48	Asli SPK No. 328/WW/VII/2004	29-07-2004
49	Asli SPK No. 335/WW/VI I/2004	02-08-2004
50	Asli SPK No. 342/WW/VII/2004	03-08-2004
51	Asli SPK No. 631 /LIMEC/XII/2004	21-12-2004
52	Asli SPK No. 582/WW/XII/2004	15-12-2004
53	Asli SPK No. 587/WW/XII/2004	20-12-2004
54	Asli SPK No. 632/LIMEC/XII/2004	22-12-2004
55	Asli SPK No. 592/WW/XII/2004	20-12-2004
56	Asli SPK No. 595/WW/XII/2004	21-12-2004
57	Asli SPK No. 596/WW/XII/2004	22-12-2004
58	Asli SPK No. 625/LIMEC/XII/2004	10-12-2004
59	Asli SPK No. 560/WW/XII/2004	2-12-2004
60	Asli SPK No. 564/WW/XII/2004	6-12-2004
61	Asli SPK No. 566/WW/XII/2004	7-12-2004
62	Asli SPK No. 570/WW/XII/2004	9-12-2004
63	Asli SPK No. 539/LIMEC/XI/2004	8-11-2004
64	Asli SPK No. 522/WW/XI/2004	03-11-2004
65	Asli SPK No. 528/WW/XI/2004	05-11-2004
66	Asli SPK No. 576/LIMEC/XII/2004	01-12-2004
67	Asli SPK No. 544/WW/XI/2004	22-11-2004
68	Asli SPK No. 547/VWV/XI/2004	24-11-2004
69	Asli SPK No. 552/WW/XI/2004	26-11-2004
70	Asli SPK No. 556/WW/XI/2004	30-11-2004
71	Asli SPK No. 003/LIMEC/I/2005	3-01-2005
72	Asli SPK No. 598/WW/XII/2004	23-12-2004
73	Asli SPK No. 602/WW/XII/2004	24-12-2004
74	Asli SPK No. 608/WW/XII/2004	28-12-2004

Hal. 114 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Asli SPK No. 612/WW/XII/2004	30-12-2004
76	Asli SPK No. 614/WW/XII/2004	30-12-2004
77	Asli SPK No. 008/LIMEC/I/2005	13-01-2005
78	Asli SPK No. 002/WW/I/2005	13-01-2005
79	Asli SPK No. 004/WW/I/2005	06-01-2005
80	Asli SPK No. 006/WW/I/2005	10-01-2005
81	Asli SPK No. 010/WW/I/2005	12-01-2005
82	Asli SPK No. 030/LIMEC/I/2005	25-01-2005
83	Asli SPK No. 012/WW/I/2005	14-01-2005
84	Asli SPK No. 015/VWV/I/2005	18-01-2005
85	Asli SPK No. 018/WW/I/2005	20-01-2005
86	Asli SPK No. 021/WW/I/2005	24-01-2005
87	Asli SPK No. 042/LIMEC/II/2005	01-02-2005
88	Asli SPK No. 042/WW/I/2005	27-01-2005
89	Asli SPK No. 028/WW/I/2005	31-01-2005
90	Asli SPK No. 050/LIMEC/II/2005	11-02-2005
91	Asli SPK No. 042/WW/II/2005	7-02-2005
92	Asli SPK No. 045/WW/II/2005	8-02-2005
93	Asli SPK No. 078/LIMEC/III/2005	04-03-2005
94	Asli SPK No. 058/WW/II/2005	18-02-2005
95	Asli SPK No. 061/WW/II/2005	21-02-2005
96	Asli SPK No. 065/WW/II/2005	23-02-2005
97	Asli SPK No. 067/WW/I/2005	25-02-2005
98	Asli SPK No. 073/WW/II/2005	28-02-2005
99	Asli SPK No. 076/WW/II/2005	02-03-2005
100	Asli SPK No. 062/LIMEC/I/2005	18-02-2005
101	Asli SPK No. 052/WW/II/2005	14-02-2005
102	Asli SPK No. 056/WW/II/2005	17-02-2005
103	Asli SPK No. 047/LIMEC/I/2005	08-02-2005
104	Asli SPK No. 031/WW/II/2005	01-02-2005
105	Asli SPK No. 035/WW/II/2005	02-02-2005
106	Asli SPK No. 037/WW/II/2005	03-02-2005
107	Asli SPK No. 039/WW/I/2005	04-02-2005
108	Asli SPK No. 126/LIMEC/IV/2005	07-04-2005
109	Asli SPK No. 111/WW/IV/2005	01-04-2005
110	Asli SPK No. 115/WW/IV/2005	06-04-2005
111	Asli SPK No. 101/LIMEC/II/2005	
112	Asli SPK No. 080/WW/III/2005	04-03-2005
113	Asli SPK No. 085/WW/III/2005	08-03-2005
114	Asli SPK No. 089/WW/III/2005	10-03-2005
115	Asli SPK No. 094/22/III/2005	15-03-2005
116	Asli SPK No. 142/LIMEC/IV/2005	21-04-2005
117	Asli SPK No. 122/WW/IV/2005	11-04-2005
118	Asli SPK No. 126/WW/IV/2005	14-04-2005
119	Asli SPK No. 155/LIMEC/V/2005	02-05-2005
110	Asli SPK No. 142/WW/IV/2005	28-04-2005

Hal. 115 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	Asli SPK No. 110/LIMEC/III/2005	28-03-2005
112	Asli SPK No. 098/WWW/III/2005	18-03-2005
113	Asli SPK No. 102/WWW/III/2005	23-03-2005
114	Asli SPK No. 089/WWW/III/2005	10-03-2005
115	Asli SPK No. 094/22/III/2005	15-03-2005
116	Asli SPK No. 142/LIMEC/IV/2005	21-04-2005
117	Asli SPK No. 122/WWW/IV/2005	11-04-2005
118	Asli SPK No. 126/WWW/IV/2005	14-04-2005
119	Asli SPK No. 155/LIMEC/V/2005	02-05-2005
120	Asli SPK No. 142/WWW/IV/2005	28-04-2005
121	Asli SPK No. 110/LIMEC/III/2005	28-03-2005
122	Asli SPK No. 098/WWW/III/2005	18-03-2005
123	Asli SPK No. 102/WWW/III/2005	23-03-2005

Dokumen Polis PT.Lima Jayakarta Utama :

No	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1	Asli Polis No.451000027170401-000	13-10-2004
2	Asli Polis No.02.10.0300562.1200	27-02-2003
3	Asli Polis No.07.0101.0400079/00	29-01-2004
4	Asli Endorsement No.1 Polis No.07.0101.0400079/01	30-06-2004
5	Asli Polis No.07.0101.0500002/00	17-01-2005
6	Asli Polis No.07.0101.0600025/00	30-01-2006
7	Asli Polis No.451000169230502	13-10-2006
8	Asli Polis No.07.0101.0700805/00	09-11-2007
9	Asli Polis No.07.0201.0704303/00	09-11-2007

Dokumen Legalitas Usaha PT. Lima Jayakarta Utama :

No.	URAIAN / DOKUMEN	TANGGAL
1.	Copy Salinan Akta Berita Acara PT.LJU No.17	20-08-2004
2.	Copy Salinan Akta Berita Acara PT.LJU No.21	31-01-2003
3.	Copy Notulen RUPS PT.LJU	19-10-2001
4.	Copy Salinan Akta PKR PT.LJU No.10	22-11-2001
5.	Copy Keputusan MENKEH R.I No.C-10890 HT.01.04.TH.99	10-06-1999
6.	Copy Data Akta Perubahan AD Perseroan	16-12-1998
7.	Copy Salinan Akta Perbaikan No. 92	16-12-1998
8.	Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat No.47	06-03-1998
9.	Copy Salinan Risalah Rapat No.115	18-07-1991
10.	Copy Salinan Akta PT.Limec No.45	18-06-1973
11.	Copy KTP-KTP	
12.	Copy NPWP No. 1.313.973.8-001 a.n PT.LJU	

Hal. 116 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Copy NPWP No.4.050.261.9-001 a.n Stephanus	
14.	Copy TDP No.090414509828	25-07-2001
15.	Copy SIUP No.1.689/8277-P/09-05/PB/VIII/94	08-08-1994
16.	Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.12/1.824.511/XII/2004	10-12-2004
17.	Copy Kartu Gapensi No.09.72.11.1315.98.06584	17-02-2004
18.	Copy Sertifikat Gapensi No.09.05.6584	18-06-2003
19.	Copy Sertifikat Gapensi No.09.05.6584	14-02-2001
20.	Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi No.0905.2.83.91.09575	09-08-1994
21.	Copy Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri No.146/STP-LN/BUPP-3/I/2002	17-01-2002

Dokumen Aplikasi Kredit PT Lima Jayakarta Utama : Buku I :

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl.	Keterangan
1	Asli Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A)	-	28.04.2003	Permohonan Fasilitas Plafond KMK dan GB PT LJU
	Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK/PAK-01)	KPI/2/30	02.05.2003	
2	Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK/PAK-02/2)			Tambahan KMK maks. Rp. 26 M, KMK Trx maks. Rp. 39 M, & plafond GB maks. Rp. 2 M.
3	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK/PAK-02/1)	ARK/1/030	17.04.2003	Tambahan KMK maks. Rp. 26 M, KMK Trx maks. Rp. 39 M, & plafond GB maks. Rp. 2 M.
4	Foto copy Pengawasan Sirkulasi (BNI- 134 A)	73	15.11.2002	Permohonan Perpanjangan sekaligus tambahan fasilitas kredit an. PTLJU
	Fotocopy Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK/PAK-01)	73	15.11.2002	
				- Usulan
5	Fotocopy Memorandum Pengusulan Kredit (PAK-02/2)			tambahan KMK semula Rp. 11,4 M menjadi sebesar Rp. 18 M - Garansi Bank maks.

Hal. 117 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp. 2 M
6	Fotocopy Memorandum Analisa Kredit (MAK/PAK02/1)	73	15.11.2002	perpanjangan dan tambahan KMK Rp. 11,4 M menjadi sebesar Rp. 18 M - Garansi Bank maks. Rp. 2 M
7	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)	.	02.01.2004	
8	Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB) PAK 03/2	.	02.01.2004	
9	Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB) PAK 03/2		14.04.2003	
10	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)		28.03.2003	
11	Fotocopy Formulir Informasi Bisnis (FIB/PAK 03/2)		13.11.2002	
12	Fotocopy Formulir Informasi Umum (FIU/PAK 03/1)		13.11.2002	—
13	Asli Formulir Proyeksi Analisa Keuangan (FAK)			Realisasi 31.12.2002, Proyeksi 31.12.2006 s/d
14	Asli Formulir Analisa Keuangan (PAK- 04)	-	-	Audited 31.12.1999 s/d 31.12.2006, Home Statement 30.09.2003
	Asli Formulir Proyeksi Analisa Keuangan (FAK)	-	-	Realisasi 30.09.2003,
15				proyeksi s/d 31.12.2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Asli Formulir Analisa Keuangan (PAK- 04)	-	-	Audited 31.12.1999 s/d 31.12.2006 Home Statement 31.12.2002
17	Fotocopy Formulir Analisa Keuangan (FAK)-PAK 04/1		13.11.2002	Homestatement 31.12.1998- 30.09.2002
18	Fotocopy Formulir Analisa Keuangan (FAK)-PAK 04/1		13.11.2002	Homestatement 31.12.1998- 30.09.2002
19	Asli Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK 05/1)		02.01.2004	-
20	Asli Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK 05/1)		14.04.2003	-
21	Asli Customer Risk Rating Form	-	14.04.2003	-
22	Fotocopy Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK-05/1)	-	13.11.2002	-
23	Fotocopy Formulir Penilaian Risiko (FPR/PAK-05/1)	-	13.11.2002	-
24	Fotocopy Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK 06/1)	-	13.11.2002	-
25	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1016 /R	16.05.2005	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
26	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/082/ R	21.04.2005	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
27	Asli Surat KPS	KPS/2/205/ R	14.12.2004	Permohonan disposisi KMK Transaksional
28	Asli Surat KPS	KPS/2/152/3/R	02.06.2004	Review Bunga
29	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/042/ R	19.04.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara

Hal. 119 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/033/ R	19.03.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
31	Asli Surat KPS	KPS/2/103 8/R	15.04.2004	Review Bunga
32	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/076/ R	12.04.2005	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
33	Konsep Surat Divisi Korporasi	KPI/2/ /R	12.04.2005	Permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
34	Konsep Surat Divisi Korporasi	KPI/2/ /R	21.04.2005	Permohonan disposisi KMK Transaksional
35	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/039/ R	02.04.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
36	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/067 0/R	09.03.2004	Perihal review buriga fasilitas kredit Saudara
37	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/030/ R	04.03.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
38	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/028/ R	19.02.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
39	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/011/ R	30.01.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
40	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/008/ R	20.01.2004	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
41	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/155/ R	08.01.2004	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara

Hal. 120 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/188/ R	08.12.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
43	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/3085 /R	05.12.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
44	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/2746 /R	03.11.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
45	Fotocopy Surat Divisi Korporasi	KPI/2/134/ R	16.10.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
46	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/2463 /R	01.10.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
47	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPI/2/2193 /R	03.09.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
48	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/102/ R	03.09.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
49	Fotocopy Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1918 /R	06.08.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
50	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/9/1776 /R	24.07.2003	Perihal tagihan biaya pspk
51	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1/05 7	19.06.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
52	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/071/ R	15.07.2003	Perihal permohonan disposisi KMK Transaksional Saudara
53	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/1585 /R	02.07.2003	Perihal review bunga fasilitas kredit Saudara
	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/047	28.05.2003	Perihal permohonan tambahan plafond KMK Saudara
55	Fotocopy Surat BNI Wilayah 12	W 12/3.1/670 0/R	27.11.2002	Persetujuan Kredit

Hal. 121 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Asli Nota Intern unit Analisa Risiko Kredit	KPS/9/188	24.05.2004	MAK an. PT. LJU
57	Asli Nota Intern unit Analisa Risiko Kredit	KPS/2/177	12.05.2004	Tambahan data an. PT. LJU
58	Asli Nota Intern unit Analisa Risiko Kredit	KPS/2/140	22.04.2004	Permohonan Tambahan & Review Fasilitas an. PT. LJU
59	Asli Memo Divisi Analisa Resiko Kredit	ARK/2/009	06.01.2004	Penyampaian PAK interim an. PT. LJU
60	Asli Memo Divisi Korporasi Satu	KPS/2/314 4	30.12.2003	Tambahan data an. PT. LJU
61	Fotocopy Memo Divisi Analisa Resiko Kredit	ARK/2/147	22.10.2003	Permintaan data an. Hatada masindo & LPT. LJU
62	Asli Memo Pengantar	KPS/2/260 6	17.10.2003	Permohonan Penambahan KMK an. PT. LJU
63	Asli Memo unit Analisa Risiko Kredit	ARK/2/150	17.04.2003	Penyampaian PAK baru an. PT. LJU
64	Asli Memo Unit Analisa resiko Kredit	ARK/2/117	28.03.2003	CRR an. PT. LJU
65	Asli Memo Pengantar	KPI/2/686	21.03.2003	PP baru plafond KMK an. PT. LJU
66	Asli & Fotocopy Fax Message	65.839/KPS/ Rabu	09.06.2004	Perpanjangan Sementara fasilitas KMK an. PT. LJU
67	Asli & Fotocopy Fax Message	57.1908/Senin/ KPS	19.04.2004	Penandatanganan an PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
68	Asli Fax Message	54.1940/Jumat/ KPS	02.04.2004	Penandatanganan an PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Asli & Fotocopy Fax Message	51.2046/selasa/KPS	23.03.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
70	Asli Fax Message	47.1946/Senin/KPS	08.03.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
71	Asli Fax Message	44.2186/Rabu/KPS	25.02.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
72	Asli Fax Message	411943/Rabu/KPS/2	11.02.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Trx. an. PT. LJU
73	Asli Fax Message	40.2219/Selasa/KPS	03.02.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
74	Asli Surat Divisi Korporasi Satu	KPS/2/0208	27.01.2004	Referensi debitur
75	Asli Fax Message	39 2196/Rabu/KPS	21.01.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
76	Asli Surat Kantor Cabang Cikampek	CKP/4/95/ R	19.01.2004	Referensi debitur
77	Asli Fax Message	36.3671/Selasa/KPS	09.12.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
78	Asli Fax Message	25 3384/Jumat/KPS	17.10.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
79	Asli Fax Message	23 3927/Kamis/KPI	04.09.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU No. baru 23.4314/Kamis/K PI tgl. 08.09.2003

Hal. 123 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Asli Fax Message	18.3793/Rabu/ KPI	16.07.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
81	Asli Fax Message	18.3793/Rabu/ KPI	16.07.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
82	Asli Fax Message	14 2663/Rabu/ KPI		Penandatanganan PK fasilitas KMK dan PPGGB an. PT. LJU
83	Asli Surat Kantor Wilayah 12	W.12/3.1/1239/ R	31.03.2003	Informasi Debitur
84	Foto copy Fax Message	16.4362/Jumat/ KPI	20.06.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
85	Asli Fax Message	16.4362/Jumat/ KPI ft MT	20.06.2003	Penandatanganan PK fasilitas KMK trx an. PT. LJU
86	Asli Surat Divisi Korporasi	KPI/2/687	21.03.2003	Perihal Informasi Debitur
87	Asli Monitoring KMK Transaksional Maks. 68 M PT. LJU	-	-	-
88	Foto copy Kartu pengawasan plafond Garansi Bank maks plafond 2M	-	-	-
89	Foto copy Kartu pengawasan plafond Garansi Bank maks plafond 2M	-	-	-
90	Informasi Bank Indonesia 2 set	1/624620/DPIP/ DtB/RhsKPI/9/ 453/	03.11.2003	-
91	Infbrmasi Bank Indonesia	1/440026/DPIP/ DtB/Rh s	04.04.2003	-
92	Informasi Bank Indonesia	1/438243/DPIP/ DtB/Rh s	01.04.2003	-
93	Fotocopy Surat PT. LJU	0112/LIMEC/IV/ /2004	15.04.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
94	Asli Surat PT. LJU	105/LIMEC/IV/ /2004	14.04.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.

Hal. 124 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Asli Surat PT. LJU	077/LIMEC/IV/2004	01.04.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
96	Asli Surat PT. LJU	063/LIMEC/II/2004	18.03.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
97	Asli Surat PT. LJU	049/LIMEC/II/2004	03.03.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
98	Asli Surat PT. LJU	040/LIMEC/I/2003	19.02.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
99	Asli Surat PT. LJU	023/LIMEC/I/2003	30.01.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
100	Asli Surat PT. LJU	07/LIMEC/I/2003	16.01.2004	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
101	Asli Surat PT. LJU	201/LIMEC/XII/2003	05.12.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
102	Asli Surat PT. LJU	-	03.11.2003	-
103	Asli Surat PT. LJU	0181/LIMEC/X/2003	16.10.2003	Permohonan Tambahan Kredit
103 A	Asli Surat PT. LJU	150/LIMEC A/II/2003	27.08.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
104	Asli Surat PT. LJU	126/LIMEC /II/2003	10.07.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
105	Asli Surat PT. LJU	113/LIMEC /VI/2003	18.06.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
106	Asli Surat PT. LJU	176/LIMEC /X/2003	14.10.2003	Permohonan Pencairan Kredit Trx.
107	Asli Surat PT. LJU	116/LIMEC /MI/2003	20.03.2003	Permohonan Kredit
108	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (PAK 06)	-	23.12.2003	-
109	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (PAK 06)	-	09.04.2003	-
110	Foto copy Kaji Ulang RM dan kelompok Divisi Korporasi	101/WW/IV/2004	13.04.2004	periode Jan - Des 2003 Penunjukkan Langsung
111	Asli Surat PT. Widya Wahana			

Hal. 125 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	Asli Surat PT Widya Wahana	085/WW/3/2004	31.03.2004	Penunjukkan Langsung
113	Asli Surat PT Widya Wahana	081/WW/3/2004	29.03.2004	Penunjukkan Langsung
114	Asli Surat PT Widya Wahana	076/WW/3/2004	26.03.2004	Penunjukkan Langsung
115	Asli Surat PT Widya Wahana	072/WW/3/2004	24.03.2004	Penunjukkan Langsung
116	Asli Surat PT Widya Wahana	069/WW/3/2004	17.03.2004	Penunjukkan Langsung
117	Asli Surat PT Widya Wahana	061/WW/3/2004	12.03.2004	Penunjukkan Langsung
118	Asli Surat PT Widya Wahana	057/WW/3/2004	09.03.2004	Penunjukkan Langsung
119	Asli Surat PT. Widya Wahana	052/WW/III/2004	05.03.2004	Penunjukkan Langsung
120	Asli Surat PT. Widya Wahana	034/WW/II/2004	03.03.2004	Penunjukkan Langsung
121	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	048/PTT/II/2004	02.03.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
122	Asli Surat PT. Widya Wahana	031/WW/II/2004	01.03.2004	Penunjukkan Langsung
123	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	046/PTT/II/2004	26.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
124	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	042/PTT/II/2004	24.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
125	Asli Surat PT. Widya Wahana	029/WW/II/2004	24.02.2004	Penunjukkan Langsung
126	Asli Surat PT. Widya Wahana	028/WW/II/2004	20.02.2004	Penunjukkan Langsung
127	Asli Surat PT. Widya Wahana	027/WW/II/2004	19.02.2004	Penunjukkan Langsung
128	Asli Surat PT. Widya Wahana	026/WW/II/2004	18.02.2004	Penunjukkan Langsung
129	Asli Surat PT. Widya Wahana	024/WW/II/2004	17.02.2004	Penunjukkan Langsung
130	Asli Surat PT. Widya Wahana	022/WW/II/2004	16.02.2004	Penunjukkan Langsung

Hal. 126 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	Asli Surat PT. Widya Wahana	021/WW/II/2004	13.02.2004	Penunjukkan Langsung
132	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	029/PTT/II/2004	12.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
133	Asli Surat PT. Widya Wahana	020/WW/II/2004	11.02.2004	Penunjukkan Langsung
134	Asli Surat PT. Widya Wahana	019/WW/II/2004	06.02.2004	Penunjukkan Langsung
135	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	018/PTT/II/2004	05.02.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
136	Asli PT. Widya Wahana	016/WW/II/2004	04.02.2004	Penunjukkan Langsung
137	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	011/PTT/II/2004	27.01.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
138	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	007/PTT/II/2004	23.01.2004	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
139	Asli Surat PT. Widya Wahana	011/WW/II/2004	13.01.2004	Penunjukkan Langsung
140	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	0107/PTT/XII/2003	03.12.2003	Pesanan Peralatan Fire Hydrant
141	Asli Surat PT. LJU	680/LIMEC/XI/2003	19.11.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan Fire Hydrant System
142	Asli Surat PT. Widya Wahana	0235/WW/XII/2003	01.12.2003	Penunjukkan Langsung
143	Asli Surat PT LJU	683/LIMEC/XI/2003	21.11.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan
144	Asli Surat PT. Widya Wahana	0224/WW/X/2003	10.10.2003	Penunjukkan Langsung
145	Asli Surat PT. Widya Wahana	0219/WW/X/2003	07.10.2003	Penunjukkan Langsung

Hal. 127 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	Asli Surat PT. Widya Wahana	0216/WW/X/2003	03.10.2003	Penunjukkan Langsung
147	Asli Surat PT. Widya Wahana	0211/WW/X/2003	30.09.2003	Penunjukkan Langsung
148	Asli Surat PT. Widya Wahana	057/WW/VI/2003	26.08.2003	Penunjukkan langsung
149	Asli Surat PT. LJU	642/LIMEC/VIII/2003		Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
150	Asli Surat PT. Widya Wahana	051/WW/VI/2003	21.08.2003	Penunjukkan langsung
151	Asli Surat PT. LJU	637/LIMEC A/III/2003	18.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
152	Asli Surat PT. Widya Wahana	046/WW/VI/2003	18.08.2003	Penunjukkan langsung
153	Asli Surat PT. LJU	629/LIMEC/VIII/2003	13.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
154	Asli Surat PT. Widya Wahana	041/WW/VI/2003	13.08.2003	Penunjukkan langsung
155	Asli Surat PT. LJU	623/LIMEC/VIII/2003	08.08.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan CCTV merk Vicon
156	Asli Surat PT. Panca Tata Trika	019/PTT/VI/2003	03.07.2003	Pesanan Peralatan Fire Hidrant
157	Asli Surat PT. LJU	612/LIMEC/VI/2003	15.06.2003	Penawaran Harga Pengadaan Peralatan Fire Hidrant

Hal. 128 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158	Asli Surat PT. Widya Wahana	037/WW/VI I/2003	01.07.2003	Pemesanan 2 Unit X Ray
159	Asli Surat PT. Widya Wahana	021/WW/VI /2003	09.06.2003	Penunjukkan langsung
160	Asli Surat PT. Widya Wahana	012/WW/V/ 2003	30.05.2003	Penunjukkan langsung
161	Asli Surat PT. Widya Wahana	07/WW/V/2 003	03.05.2003	Penunjukkan langsung
162	Asli Tambahan penjelasan	-	20.03.2005	Dari Pemimpin Kelompok PMK 1 kepada Pemimpin KPI
163	Asli Tambahan penjelasan	-	-	dari Bp. Gama Komarudin kepada Pemimpin KPI
164	Fotocopy Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)	09.05.6584	18.06.2003	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
165	Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	A094583	-	-
166	Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK06/1)	-	15.04.2003	-
167	Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan		04.04.2003	
168	Asli Formulir Analisa CEV & Pengikatan Jaminan (FCP/PAK 06/2)	-	31.12.2003	-
169	Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK06/1)	-	31.12.2003	-
170	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (lamp. FKS/PAK-06)	-	22.12.2003	berdasarkan laporan appraisal independent
171	Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (lamp. FKS/PAK-06)	-	22.12.2003	-
172	Asli Formulir Analisa CEV & Pengikatan Jaminan (FCP/PAK 06/2)	-	15.04.2003	-

Hal. 129 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (lamp. FKS/PAK-06)	-	09.04.2003	-
174	Fotocopy Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ/PAK 06/1)		13.11.2002	
175	Foto copy Formulir Analisa CEV & Pengikatan Jaminan (FCP)	-	13.11.2003	-
176	Foto copy Kartu Pengawasan Plafond Garansi Bank	-	-	-
177	Foto copy Pembangunan Gedung Sapta Pesona "B"	-	-	-
178	Foto copy Polis Asuransi Kebakaran	07.0101.04 00079/00	9.01.2004	PT. Asuransi Tri Pakarta
179	Asli Surat KPI	KPI/9/1720 IR	5.07.2003	Permohonan pembuatan Akta Kuasa Jual & Sertifikasi Jaminan Kredit LJU

Buku II:

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl	Keterangan
1	Asli Memo Divisi Korporasi I	KPS/2/P.11	28.01.2004	Perihal penjelasan DER per September 2003 a/n. PT. LJU
2	Formulir Pengawasan Sirkulasi	KPS/2/p.3	14.01.2004	Permohonan Tambahan Plafond KMK an. LJU
	Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit	KPS/2/004	12.01.2004	Tambahan plafond KMK
3	Asli Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK PAK02/2)			Tambahan KMK
4	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK 02/1)	ARK/1/001	06.01.2004	Tambahan KMK maks. Rp. 19,5 M, & KMK Trx. Rp. 29 M
5	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)	-	14.05.2004	-

Hal. 130 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Asli Formulir Informasi Bisnis (PAK 03/2)	-	10.05.2004	-
7	Foto copy Formulir Proyeksi Ihtisar Keuangan	-	-	Realisasi 31.03.2004, proyeksi s/d 31.12.2006
8	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audites 2001-2003, Home Statement 31.12.2004
9	Asli Formulir Penelitian Hasil Prestasi/Rating Field Report	-	31.01.2005	Triwulan IV/2004
10	Asli Formulir Evaluasi Nilai Jaminan	-		Triwulan IV/2004
11	Asli Customer Risk Rating Form	-	14.01.2005	Tidak Ditandatangani
12	Asli Rating Field Report	-	30.12.2004	
13	Asli Formulir Evaluasi Nilai Jaminan	-	-	Triwulan MI/2004
14	Asli Customer Risk Rating Form	-	18.05.2004	-
15	Asli Customer Credit Rating Form	-	18.05.2004	-
16	Asli Formulir Penilaian Risiko (FPR PAK- 05/1)		18.05.2004	
17	Asli Formulir Analisa Rating-Prioritas Pemasaran (FAR PAK-05/2)	-	18.05.2004	-
18	Asli Surat BNI	KPI/2/0794	08.04.2005	Review bunga fasilitas kredit Saudara
19	Asli Surat BNI	KPI/2/060/R	30.03.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
20	Asli Surat BNI	KPI/2/054/R	21.03.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
21	Asli Surat BNI	KPI/2/0550/R	10.03.2005	Review bunga fasilitas kredit Saudara
22	Asli Surat BNI	KPI/2/046/R	08.03.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
22A	Asli Surat BNI	KPS/2/038/R	23.02.2005	Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas
23	Asli Surat BNI	KPS/2/034/R	22.02.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
24	Asli Surat BNI	KPS/2/029/R	15.02.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional

Hal. 131 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Asli Surat BNI	KPS/2/0253/R	04.02.2005	Review bunga fasilitas kredit
26	Asli Surat BNI	KPS/2/027/R	03.02.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
27	Asli Surat BNI	KPS/2/025/R	27.01.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
28	Asli Surat BNI	KPS/2/0112/R	18.01.2005	Review bunga fasilitas kredit
29	Asli & Foto copy Surat BNI	KPS/2/010/R	17.01.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
30	Asli Surat BNI	KPS/2/001/R	05.01.2005	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
31	Asli Surat BNI	KPS/2/216/R	24.12.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
32	Asli Surat BNI	KPS/2/3896/R	15.12.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
33	Asli Surat BNI	KPS/2/199/R	02.12.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
34	Foto copy Surat BNI	KPS/2/2735/R	11.11.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
35	Asli Surat BNI	KPS/2/181/R	10.11.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
36	Asli Surat BNI	KPS/2/171/R	27.10.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
37	Asli Surat BNI	KPS/2/2555/R	18.10.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
38	Asli Surat BNI	KPS/2/166/R	15.10.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
39	Asli Surat BNI	KPS/2/155/R	27.09.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
40	Asli Surat BNI	KPS/2/2344/R	17.09.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
41	Asli Surat BNI	KPS/2/148/R	14.09.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
42	Asli & Foto copy Surat BNI	KPS/2/140/R	30.08.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
43	Asli Surat BNI	KPS/2/131/R	19.08.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
44	Asli Surat BNI	KPS/2/2153/R	19.08.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
45	Asli Surat BNI	KPS/2/122/R	09.08.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
46	Asli Surat BNI	KPS/2/114/R	19.07.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
47	Asli Surat BNI	KPS/2/1907/R	16.07.2004	Review Bunga Fasilitas Kredit
48	Asli Surat BNI	KPS/2/104/R	28.06.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional

Hal. 132 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



49	Asli Surat BNI	KPS/2/081/R	17.06.2004	Permohonan Disposisi KMK Transaksional
50	Asli Surat BNI	KPS/2/079/R	16.06.2004	Perpanjangan dan tambahan plafond
51	Asli Surat BNI	KPS/2/016/R	10.02.2004	Perpanjangan dan tambahan plafond KMK
52	Asli Call Memo		26.04.2005	monitoring SPK- SPK yang akan jatuh tempo bulan Mei 2005 yang belum diselesaikan
53	Asli Call Memo		20.04.2005	Verifikasi penerbitan SPK
54	Asli Call Memo		08.04.2005	Verifikasi penerbitan SPK
55	Asli Memo	KPI/2/0670	26.04.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
56	Fotocopy Memo	KPI/2/0670	26.04.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
57	Asli Memo	KPI/2/0575	12.04.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
58	Asli Memo	DRK/3/673	01.04.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.022.000.000 ; an. PT. LJU
59	Foto copy Nota Intern	DRK/3/075	31.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.022.000.000 ; an. PT. LJU
60	Foto copy & Asli Memo	KPI/2/0489	30.03.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
61	Foto copy Nota Intern	KPI/2/092	23.03.2005	Permohonan Review Fasilitas an. PT. LJU
62	Asli Memo	KPI/2/0444	22.03.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
63	Asli Memo	DRK/3/500	10.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp. 11.512.000.000; an. PT. LJU
64	Foto copy Nota Intern	DRK/3/052	09.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 11.512.000.000; an. PT. LJU
65	Asli Memo	KPI/2/0363	09.03.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
66	Asli Memo	DRK/3/435A	02.03.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp 10.000.000.000 an. PT. LJU
67	Foto copy Nota	DRK/3/041	28.02.2005	Disposisi KMK Transaksional mks. Rp10.000.000.000,00 a.n. PT.LJU
68	Foto copy Formulir Pengawasan Sirkulasi Lampiran	KPs/2/P.41	28.02.2005	Disposisi Tambahan sementara KMK PT.LJU Maks 10 M
69	Asli Memo	DRK/3/384	24.02.2005	Disposisi Tambahan Transaksional maks.Rp.4.978.000.000,- an PT.LJU
70	Foto copy Nota Intern	DARK/3/036	24.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks.Rp.4.978.000.000,- an. PT. LJU
71	Asli Telex	KPS/2/0250	22.02.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
72	Asli Memo	DARK/3/330	71.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks.Rp.4.978.000.000,- an. PT. LJU
73	Foto copy Nota	DARK/3/029	16.02.2005	Disposisi KMK Transaksional maks.Rp.4.978.000.000,- an. PT. LJU



74	Intern Asli Memo	KPS/2/0206	15.02.2005	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
75	Asli Memo	DRK/3/242	07.02.2005	Disposisi Tambahan Transaksional maks. Rp.5.241.000.000 an PT.LJU
76	Foto copy Nota Intern	DRK/3/027	04.02.2005	Disposisi KMK maks. Rp. 5.241.000.000; an. PT. LJU
77	Asli Memo	KPS/2/0182	04.02.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
78	Asli Memo	DRK/3/179	28.01.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 6.169.000.000; an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
79	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/021	28.01.2005	maks. Rp. 6.169.000.000 an. PT. LJU
80	Asli Memo	KPS/2/0145	27.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU Disposisi KMK Transaksional
81	Asli Memo	DRK/3/167	27.01.2005	maks.Rp. 7. 508.000. 000 an. PT. LJU
82	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/014	18.01.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.7.508.000. 000 an. PT. LJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Fotocopy Memo	KPS/2/100	17.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
84	Asli Memo	KPS/2/0022	06.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
85	Asli Memo	DRK/3/037	07.01.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.8.667.000.000 an. PT. LJU
86	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/005	07.01.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.8.667.000.000,- an.PT.LJU
87	Asli Memo	KPS/2/100	17.01.2005	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
88	Asli Memo	DRK/3/1526	28.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks.Rp.9.703.000.000,- an. PT. LJU
89	Asli Memo	KPS/2/3297	27.12.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
90	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/191	27.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9.703.000.000,- an. PT. LJU
91	Asli Memo	DRK/3/1470	20.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.7.889.000.000,- an. PT. LJU
92	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/180	17.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp.7.889.000.000; an. PT. LJU

Hal. 136 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



93	Asli Memo	KPS/2/3233	16.12.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
94	Asli Memo	DRK/3/1358	03.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9. 303. 000. 000 an. PT. LJU
95	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/170	03.12.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 9. 303. 000. 000 an. PT. LJU
96	Asli Memo	KPS/2/3161	02.12.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
97	Asli Memo	DRK/3/1319	26.11.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.658.000.000; an. PT. LJU
98	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/160	11.11.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.658.000.000; an. PT. LJU
99	Asli Memo	KPS/2/3088	11.11.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional an.
100	Asli Memo	DRK/3/1211	29.10.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.908.000.000; an. PT. LJU
101	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/146	28.10.2004	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.908.000.000; an. PT. LJU
102	Asli Memo	KPS/2/2975	28.10.2004	Penyampaian check list disposisi KMK Transaksional



				an. PT. LJU
103	Asli Memo	DRK/3/1168	22.10.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.9.315.000.000; an. PT. LJU
104	Fotocopy Nota Intern	DRK/3/135	19.10.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.9.315.000.000; an. PT. LJU
105	Asli Memo	KPS/2/2890	19.10.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
106	Asli Memo	KPS/2/2495	29.09.2004	Pembukaan kembali rekening pinjaman an. PT. LJU
107	Asli Memo	DRK/3/1003	29.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.8.405.000.000; an. PT. LJU
108	Foto copy Nota Intern	DRK/3/119	28.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.8.405.000.000; an. PT. LJU
109	Foto copy Memo	KPS/2/2483A	27.09.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional PT. LJU
110	Asli Memo	DRK/3/960	22.09.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.7.548.000.000; an. PT. LJU
111	Foto copy Intern	DRK/3/112	21.09.2005	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp. 7.548.000.000; an. PT. LJU
112	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/2223	16.09.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
113	Foto copy Nota	DRK/3/100	02.09.2004	Disposisi KMK



	Intern			Transaksional Maksimum Rp. 9.495.000. 000; an. PT. LJU
114	Asli Memo	KPS/2/2121	01.09.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
115	Foto copy Nota Intern	DRK/3/087	23.08.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.5.910.000. 000; an. PT. LJU
116	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/2035	20.08.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
117	Asli Nota Intern	DRK/3/82	11.08.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.11.050.000. 000; an. PT. LJU
118	Asli Memo 2 set	KPS/2/1776	10.08.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
119	Asli Nota Intern	MRK/3/070	21.07.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.13.330.000. 000 an. PT. LJU
120	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/1565	21.07.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
121	Asli Memo 3 set	KPS/2/1398	29.06.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
122	Asli Nota Intern	MRK/3/045	29.06.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.15.728.000. 000 an. PT. LJU
123	Asli Memo	KPS/2/1307	18.06.2004	Persetujuan Switching Anggaran
124	Asli Fax Message	24.3612/Kamis/KPI	12.05.2005	Penandatanga nan PK fasilitas MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transaksional an. PT. LJU
125	Asli Fax Message	23.2600/Selasa/KPI	26.04.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
126	Asli Surat BNI	KPI/2/0651	21.04.2005	Informasi Data Debitur
127	Asli Surat BNI	J KK/2.1/2976	20.04.2005	Permintaan Referensi
128	Asli Fax Message	21.3499/Rabu/KPI	13.04.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. UU
129	Asli Fax Message	20.2986/Kamis/KPI	31.03.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
130	Asli Fax Message	19.4009/Selasa/KPI	22.03.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
131	Asli Fax Message	17.4543/Rabu/KPI	09.03.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
132	Asli Fax Message	15.1546/Senin/KPS	28.02.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
133	Asli Fax Message	14.3767/Rabu/KPS	23.02.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
134	Asli Fax Message	11.2995/Rabu/KPS	16.02.2005	Penandatanga nan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
135	Asli Nota Intern	DRK/3/82	11.08.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.11.050.000. 000; an. PT. LJU
136	Asli Memo 2 set	KPS/2/1776	10.08.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
137	Asli Nota Intern	MRK/3/070	21.07.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.13.330.000. 000; an. PT. LJU

Hal. 140 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	Asli & Foto copy Memo	KPS/2/1565	21.07.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
139	Asli Memo 3 set	KPS/2/1398	29.06.2004	Penyampaian Check List Disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU
140	Asli Nota Intern	MRK/3/045	29.06.2004	Disposisi KMK Transaksional Maksimum Rp.15.728.000.000 an. PT. LJU
141	Asli Memo	KPS/2/1307	18.06.2004	Persetujuan Switching Anggaran
142	Asli Fax Message	24.3612/Kamis/KPI	12.05.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
143	Asli Fax Message	23.2600/Selasa/KPI	26.04.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
144	Asli Surat BNI	KPI/2/0651	21.04.2005	Informasi Data Debitur
145	Asli Surat BNI	JKK/2.1/2976	20.04.2005	Permintaan Referensi
146	Asli Fax Message	21.3499/Rabu/KPI	13.04.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
147	Asli Fax Message	20.2986/Kamis/KPI	31.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
148	Asli Fax Message	19.4009/Selasa/KPI	22.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
149	Asli Fax Message	17.4543/Rabu/KPI	09.03.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
150	Asli Fax Message	15.1546/Senin/KPS	28.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
151	Asli Fax Message	14.3767/Rabu/KPS	23.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU

Hal. 141 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



152	Asli Fax Message	11.2995/Rabu/KPS	16.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
153	Asli Fax Message	10.4008/Jumat/KPS	04.02.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
154	Asli Fax Message	08.3678/Jumat/KPS	28.01.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
155	Asli Fax Message	07.3840/Rabu/KPS	19.01.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
156	Asli Fax Message	05.3027/Kamis/KPS	06.01.2005	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
157	Asli Fax Message	03.1885/senin/KPS	27.12.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
158	Asli Fax Message	01.2184/Senin/KPS	20.12.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
159	Asli Fax Message	98.1996/Kamis/KPS	02.12.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
160	Asli Fax Message	94.2231/Kamis/KPS	11.11.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
161	Asli Fax Message	92.2464/Kamis/KPS	28.10.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
162	Asli Surat BNI	DRK/3/492/R	19.10.2004	Polis Asuransi Jaminan Kredit
163	Asli Fax Message	90.2545/Jumat/KPS	15.10.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
164	Asli Fax Message	89.856/Selasa/KPS	28.09.2004	Perubahan No. Rekening fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
165	Asli Fax Message	88.2103/Senin/KPS	27.09.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transaksional an. PT. LJU
166	Asli Fax Message	85.903/Jumat/KPS	17.09.2004	Perubahan No. Rekening fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
167	Asli Fax Message	84.2588/Kamis/KPS	16.09.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
168	Asli Fax Message	83.2078/Rabu/KPS	01.09.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
169	Asli Fax Message	79.2347/Jumat/KPS	20.08.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
170	Asli Fax Message	76.1825/Selasa/KPS	10.08.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
171	Asli Fax Message	71.2321/Rabu/KPS	21.07.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
172	Asli Fax Message	KPS/2/0706	07.07.2004	Permintaan data an. PT. LJU
173	Asli Fax Message	69.2427/Selasa/KPS	29.06.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
174	Asli Fax Message	68.2453/Jumat/KPS	18.06.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
175	Asli Fax Message	67.820/Jumat/KPS	18.06.2004	Penandatanganan PK fasilitas KMK Transaksional an. PT. LJU
176	Asli Monitoring KMK Transaksional Maks. Rp.100.8M			1 (satu) set
177	Asli Informasi Bank Indonesia	1/804775/DPIP/DtB/Rhs KPI/9/246/	27.04.2004	—
178	Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	142/LIMEC/IV/2005	21.04.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
179	Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	126/LIMEC/IV/2005	07.04.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
180	Foto copy Surat PT. Lima	110/LIMEC/III/2005	28.03.2005	Permohonan pencairan

Hal. 143 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jakarta Utara			transaksional
181	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	101 /LIMEC/III/2005	17.03.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
182	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	078/LIMEC/III/2005	04.03.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
183	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utara	070/LIMEC/II/2005	25.02.2005	Permohonan tambahan KMK Transaksional
184	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	062/LIM EC/I I/2005	18.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
185	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	050/LIMEC/II/2005	11.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
186	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	047/LIMEC/II/2005	08.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
187	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	042/LIMEC/II/2005	01.02.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
188	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	030/LIMEC/I/2005	25.01.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
189	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	008/LIMEC/I/2005	13.01.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
190	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	003/LIMEC/I/2005	03.01.2005	Permohonan pencairan kredit transaksional
191	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	632/LIMEC/XII/2004	22.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
192	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	631/LIMEC/XII/2004	21.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
193	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	625/LIM EC/XII/2004	10.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
194	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utara	686/LIMEC/XII/2004	03.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
195	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	576/LIMEC/XII/2004	01.12.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
196	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utara	539/LIMEC/XI/2004	08.11.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional

Hal. 144 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	524/LIMEC/X/2004	26.10.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
198	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	497/LIMEC/X/2004	12.10.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
199	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	459/LIMEC/IX/2004	22.09.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
200	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	410/LIMEC/IX/2004	08.09.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
201	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	398/LIMEC/VIII/2004	27.08.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
202	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	006/LIMEC/TSY/VIII/2004	23.08.2004	Pemberitahuan
203	Foto copy Berita Acara PT. Lima Jakarta Utama	17	20.08.2004	
204	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	366/LIMEC/VIII/2004	18.08.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
205	Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	278/LIMEC/VII/2004	03.08.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
206	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	278/LIMEC/VII/2004	14.07.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
207	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	236/LIMEC/VI/2004	28.06.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
208	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	201 /LIMEC/VI/2004	16.06.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
209	Foto copy Surat Keterangan	22/PPAT/V/2004	25.05.2004	Notaris Liza Priadhini, SH
210	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	0112/LIMEC/IV/2004	15.04.2004	Permohonan pencairan kredit transaksional
211	Asli Kartu Pengawasan Proyek PT. Lima Jakarta Utama			periode 01.02.2005 s/d 24.05.2005
212	Asli 2 set Surat BNI	KPS/2/147	07.12.2004	Surat Keterangan Dukungan Keuangan
213	Asli Surat BNI	KPS/2/1840/R	08.07.2004	Permohonan bantuan pembebanan Hak tanggungan
214	Foto copy Surat Pernyataan	—	18.06.2004	Tjulang Stefanus Yawoga
215	Foto copy Surat Pernyataan	—	18.06.2004	Ujang Syamsudin

Hal. 145 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216	Foto copy NPWP an. Tjulung SY	4.050.261.9-001	-	-
217	Foto copy Surat Keterangan KTP sementara	86/SKKS/2012-DS/2004	26.05.2004	an. Dwi
218	Foto copy Surat Persetujuan	-	15.06.2004	persetujuan dari Ny. Dwi kepada Sutrisno
219	Foto copy Surat Persetujuan 3 set	-	15.06.2004	persetujuan dari Boy M kepada Antonia A.I
220	Foto copy KTP an. Boy M	-	-	-
221	Foto copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	22-30-41-00002	09.06.2000	Toyota Harrier

Buku III:

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl	Keterangan
1	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Formulir Memorandum Analisa Penyelamatan	KPI/7/P.54 KPI/7/P.54	12.07.2006 12.07.2006	Memorandum Analisa Penyelamatan
2	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit	KPI/12/P.2 6 KPI/12/P.2 6	04.10.2005 04.10.2005	Permohonan Perpanjangan KMK Maks Rp.45,5 M, KMK Transaksional Maks Rp. 100,800 M, Pelafond GB Maks Rp.2 M, KMK Transaksional Maks Rp. 10 M
3	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK-02/1)	-	-	permohonan review kredit berjalan
4	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK-02/2)	-	-	permohonan perpanjangan KMK plafond, KMK transaksional, KMK tambahan sementara & plafond garansi bank
5	Asli Memorandum Rekomendasi Kredit	DRK/SCA/CORP/2247	24.10.2005	Perpanjangan fasilitas dan pendudukan KMK sementara an. PT. LJU

Hal. 146 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Memo	KPI/2/NI-108 KPI/2/NI-108	13.06.200 5 10.06.200 5	Perpanjangan sementara fasilitas kredit Perpanjangan sementara fasilitas kredit an. PT. LJU
7	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Memo	KPI/2/NI-93	16.05.200 5	Perpanjangan Jangka Waktu Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi KMK trx
8	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Memorandum Tambahan Kredit Sementara	KPS/2/P.34	17.02.200 5	permohonan tambahan sementara fasilitas KMK Transaksional
9	Formulir Pengawasan Sirkulasi Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit	KPS/2/P.PAK KPS/2/023	01.06.200 4 31.05.200 4	permohonan perpanjangan KMK/GB
10	Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK PAK-02/1)	ARK/1/020	21.05.200 4	review fasilitas berjalan, menganalisa & memberikan penilaian atas permohonan tambahan fasilitas KMK transaksional untuk pelaksanaan proyek.
11	Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK PAK-02/2)	-	-	-
12	Asli Checklist uji kepatuhan rancangan keputusan Kredit	KPN/PGK/051	10.06.2004	-
13	Asli Formulir Informasi Umum (PAK 03/1)	-	01.09.2005	-
14	Asli Proyeksi Analisa Keuangan	-	-	Realisasi 31.03.2004, Proyeksi s/d 31.12.2006
15	Asli Formulir Penelitian Hasil Prestasi	-	20.07.200 5	Triwulan II tahun 2005
16	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audited tahun 2000-2004, homestatement tanggal 31.06.2005

Hal. 147 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audited tahun 2000-2004, homestatement tanggal 31.03.2005
17A	Asli Formulir Penelitian Hasil Prestasi	-	29.12.200 5 15.04.200 5	Triwulan I tahun 2005
18	Asli Formulir Analisa Keuangan	-	-	Audited tahun 2000-2002, homestatement tanggal 31.12.2003 s/d 31.03.2004
19	Asli Customer Risk Rating Form	-	24.02.200 6 27.09.200 5	-
20	Asli Customer Risk Rating Form	-	-	-
21	Asli Customer Risk Rating Form	-	07.09.200 5	Dokumen Tidak ditandatangani
22	Struktur Organisasi PT Lima Jayakarta Utama	-	-	-
23	Asli Surat BNI	KPI/7/0265/R	10.02.200 6	Penyaluran termijn atas tagihan proyek pengadaan CCTV & penyelesaiannya
24	Foto copy Surat BNI	KPI/7/0160/R	26.01.200 6	Penilaian kembali seluruh jaminan
25	Foto copy Surat BNI	KPI/7/0126/R	20.01.200 6	Penyelesaian pinjaman jatuh tempo dan tunggakan bunga pinjaman
26	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2992/R	26.12.200 5	Kewajiban bunga
27	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2685/R	28.11.2005	Kewajiban bunga
28	Asli Surat BNI	KPI/12/217/R	23.11.2005	Ralat SKK
29	Asli Surat BNI	KPI/12/214/R	21.11.2005	Persetujuan Perpanjangan Fasilitas kredit

Hal. 148 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Asli Surat BNI	KPI/12/2576/R	16.11.2005	Permohonan keringanan bunga dan switching KMK transaksional
31	Asli Surat BNI	KPI/12/2572/R	15.11.2005	Penilaian barang jaminan
32	Asli Surat BNI	KPI/12/2548/R	10.11.2005	Restrukturisasi kredit
33	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2527/R	27.10.2005	Kewajiban bunga Oktober 2005
34	Foto copy Surat BNI	KPI/12/2454/R	24.10.2005	Review suku bunga
35	Asli Surat BNI	KPI/12/3722	27.09.2005	Kewajiban bunga September 2005
36	Asli Surat BNI	KPI/4/127/R	28.06.2005	Perpanjangan sementara fasilitas kredit
37	Asli Surat BNI	KPI/2/1352/R	13.06.2005	Review bunga fasilitas kredit
38	Asli Surat BNI	KPI/2/110/R	26.05.2005	Permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK Transaksional
39	Foto copy Surat BNI	KPI/2/090/R	06.05.2005	Permohonan disposisi KMK transaksional
40	Foto copy Surat BNI	KPI/2/082/R	21.04.2005	Permohonan disposisi KMK transaksional
41	Foto copy Surat BNI	KPI/2/076/R	12.04.2005	Permohonan disposisi KMK transaksional
42	Asli Notulen Pertemuan	—	27.03.2006	Membicarakan penyelesaian pinjaman an.
43	Asli Call Memo		15.03.2006	menagih kewajiban yang tertunggak, rencana restrukturisasi kredit untuk penyelesaian pinjaman, data dalam rangka restrukturisasi kredit

Hal. 149 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Asli Call memo	-	05.02.2006	pengecekan kebenaran proyek & informasi proyek yang belum diselesaikan dan dibayar PT. LJU
45	Asli Call memo		25.01.2006	memantau kondisi perusahaan
46	Asli Call Memo	-	19.12.2005	menagih tunggakan bunga pinjaman bulan September s/d November & Desember 2005
47	Asli Call Memo		26.10.2005	menagih bunga pinjaman Sept.&Okt. 2005
48	Asli Notulen pertemuan		15.11.2005	penyelesaian KMK Transaksional, tunggakan bunga, restrukturisasi kredit, penilaian kembali serta plotting jaminan an. PT. LJU
49	Foto copy Memo	KPI/9/4039	22.11.2005	Bantuan tenaga yurist untuk plotting jaminan
50	Asli Memo	DRK/3/854 A	26.04.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.970.000.000; an. PT. LJU
51	Foto copy Nota Intern	DRK/3/098	26.04.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 4.970.000.000; an. PT. LJU
52	Foto copy Memo	KPI/2/0670	26.04.2005	Penyampaian chek list disposisi KMK Transaksional an. PT. LJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Asli Memo	DRK/3/746 A	13.04.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 5.232.000.000; an. PT. LJU
54	Foto copy Nota Intern	DRK/3/089	13.04.2005	Disposisi KMK Transaksional maks. Rp. 5.232.000.000; an. PT. LJU
55	Foto copy Memo	KPI/2/0575	12.04.2005	Penyampaian chek list disposisi KMK an. PT. LJU
56	Asli Nota Intern	KPI/2/092	23.03.2005	Permohonan review fasilitas an. PT. LJU
57	Asli Facsimile	KPI/7/119	27.02.2006	Pembukaan Rek. Escrow an. PT LJU
58	Asli Facsimile Transmission	KPI/12/703/05	26.12.2005	Nilai taksasi jaminan an. PT. LJU
59	Asli Berita Telex	60.1218/Kamis/ KPI	08.12.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
60	Asli Facsimile	-		HT. An. PT. Lima Jayakarta Utama
61	Asli Berita Telex	56.997/Jumat/ KPI	18.11.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
62	Asli Berita Telex	54.998/Senin/ KPI	31.10.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
63	Asli Berita Telex	50.890/Jumat/ KPI	07.10.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
64	Asli Berita Telex	49.1203/Rabu/ KPI	28.09.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU

Hal. 151 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Asli Berita Telex	481463/Rabu/ KPI	21.09.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
66	Asli Telex	41.1223/Rabu/ KPI	07.09.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
67	Asli Telex	40.1217/Jumat/ KPI	19.08.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
68	Asli Telex	33.991/Rabu/ KPI	13.07.2005	Perpanjangan sementara fasilitas kredit an. PT. LJU
69	Asli Telex	32.1174/Senin/ KPI	11.07.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
70	Asli Telex	29.1688/Senin/ KPI	13.06.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
71	Asli Telex	28.1058/Selasa /KPI	07.06.2005	Penandatanganan PPPK atas fasilitas KMK an. PT. LJU
72	Asli Telex	27.1563/Selasa /KPI	31.05.2005	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
73	Asli Telex	26.982/Jumat/K PI	20.05.2004	Maintenance jangka waktu fasilitas kredit an. PT. LJU
74	Informasi Bank Indonesia	1/1464476/DPI P/Dt B/Rhs KPI/9/0646	31.08.2005	
75	Asli Surat PT. Independensia Consultindo	013/SKTDW- BNI/2006	26.01.2006	
76	Foto copy Surat BNI	MAR/6/0601	11.08.2005	Peningkatan segmentasi rekanan
77	Asli Surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	644/KBA/DVO.I I/2005	31.08.2005	Transfer

Hal. 152 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan	12/1.824.511/X II/20 04	10.12.2004	
79	Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	09.05.6584	18.06.2003	
80	Foto copy Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	94582		
81	1 (satu) set foto copy SPPT PBB & STTS			Tahun 2005
82	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	003/LIMEC/TSY/III/2007	22.03.2007	Konfirmasi
83	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	021/LIMEC/TSY/VIII/2006	02.08.2006	Jaminan saham Sdr. Tjulang S. Yawoga di PT. Graha Lintas Properti
84	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	020/LIMEC/TSY/VI/ 2006	19.06.2006	Kewajiban kami bulan Juni 2006
85	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	018/LIMEC/TSY/V/2006	12.05.2006	Penyelesaian fasilitas kredit kami
86	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	012/LIMEC/TSY/IV/2006	03.04.2006	Penyampaian data/informasi
87	2 set Asli & Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	011/LIMEC/TSY/III/2006	27.03.2006	Penyelesaian kewajiban kami terhadap BNI
88	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	375/LIMEC/XI/2005	30.11.2005	Penilaian Barang Jaminan
89	Asli Surat PT. Lima Jakarta Utama	376/LIMEC/XI/2005	30.11.2005	Penyelesaian atas kewajiban tunggakan Bunga
90	2 set Asli & Foto copy Surat PT. Lima Jakarta Utama	365/LIMEC/X/2005	31.10.2005	Permohonan keringanan bunga dan switching KMK Transaksional menjadi KMK Aflopend

Hal. 153 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	337/LIMEC/VIII/2005	21.09.2005	Perpanjangan sementara fasilitas KMK Transaksional Tambahan Sementara
92	2 set Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	336/LIMEC/VIII/2005	31.08.2005	Perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK Transaksional
93	Asli Surat PT. Lima Jayakarta Utama	215/LIMEC/VI/2005	09.06.2005	Permohonan Perpanjangan Kredit
94	Asli & Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	170/LIMEC/VI/2005	10.05.2005	Perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK Transaksional
95	Foto copy Surat PT. Lima Jayakarta Utama	156/LIMEC/VI/2005	02.05.2005	Permohonan perpanjangan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan
96	Asli Formulir Analisa CEV & pengikatan jaminan	-	Sept. 2005	-
97	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan	-	28.09.2005	-
98	Asli Formulir Berita Acara Pemeriksaan Jaminan		28.09.2005	
99	Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat		01.09.2005	
100	Asli Formulir Analisa CEV & pengikatan jaminan		18.05.2004	
101	Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan		14.05.2004	
102	Asli Formulir Berita Acara Pemeriksaan Jaminan		04.05.2004	
103	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan		04.05.2004	
104	Asli Formulir Laporan Setempat		04.05.2004	

Hal. 154 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan		04.05.2004	-
106	Asli Monitoring KMK	-	-	Maks.Rp100,8 Milyar
107	Asli Proyeksi Proyek CCTV, SAS, FAS	-	-	Jan s/d. Des.2006 dan Jan. s/d.Des.2005
108	Foto Copy Laporan Penerimaan / Outstanding Tagihan	-	-	Per 16 September 2005
109	Foto Copy Surat PT. Asuransi Tri Pakarta	-	27.01.2006	Perpanjangan Polis Asuransi Kebakaran
110	Asli Formulir Evaluasi Jaminan	-	-	Triwulan I tahun 2005, Dokumen tidak ditandatangani
111	Asli Formulir Evaluasi Jaminan		20.07.2005	Triwulan II tahun 2006, Dokumen Tidak Ditandatangani
112	Asli Formulir Evaluasi Nilai Jaminan		13.06.2005	Triwulan I tahun 2005, Dokumen Tidak Ditandatangani
113	Foto copy Jenis dan Nilai Agunan/Jaminan		-	-
114	Foto copy Daftar Pemegang Hak Atas Tanah seluas 1.210.657 m ² desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang - Banten	-	-	-
115	Copy Perjanjian Kredit	008/KPI/PK/2005	12.04.2005	KMK maks. Rp. 5.232.000.000;
116	Foto copy Jaminan Kredit PT. Lima Jayakarta Utama Berkedudukan di Jakarta	-	-	berupa tanah kosong (pantai)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Audited, Home Statement dan Laporan Penilaian Aktiva :

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal
1	Asli Audited Report	032/LA-S/03.2003	05.02.2003
2	Asli Laporan Penilaian Aktiva	025-PRO/IND/III/03	07.03.2003
3	Asli Home Statement	-	30.06.2003
4	Asli Home Statement	-	30.09.2003
5	Asli Laporan Penilaian Aktiva	062-PRO/IND/X/03	15.10.2003
6	Asli Laporan Penilaian Aktiva	097-PRO/IND/X/03	22.12.2003
7	Foto copy Home Statement	-	31.12.2003
8	Asli Audited Report	05/29/ARD/JM/04	31.05.2004
9	Asli Audited Report	74 NS	28.06.2004
10	Foto copy Home Statement	-	31.03.2004
11	Asli Laporan Penilaian Aktiva	024-PRO/IND/V/04	12.05.2004
12	Foto copy Home Statement	-	30.06.2004
13	Foto copy Home Statement	-	30.09.2004
14	Foto copy Home Statement	-	31.12.2004
15	Asli Audited Report	280305.13 ANP/M	28.03.2005
16	Foto copy Audited Report	48/A/05	28.03.2005
17	Foto copy Home Statement	-	31.03.2005
18	Foto copy Audited Report	79.NS	10.10.2001
19	Foto copy Audited Report	26.NS	18.04.2002

terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Tjulung Stefanus Yawoga untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 373 / Pid / 2010 / PT.DKI tanggal 30 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Tjulung Stefanus Yawoga dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Hal. 156 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.614 / Pid.B / 2010 / PN.JKT.PST tanggal 20 September 2010 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Harrier warna kuning metalik dengan Nomor Rangka MCV 150-142289, Nomor Mesin 0947686 No.Pol.B 8493-BG berikut kunci kontak dan surat-suratnya dirampas untuk Negara dan diserahkan ke PT. BNI (persero) Tbk ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 614 / Pid. B / 2010 / PN.JKT.PST tanggal 20 September 2010 untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. No. 538 / K / Pid.Sus / 2011 tanggal 6 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

TJULANG STEFANUS YAWOGA tersebut ;

Hal. 157 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 6 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2012 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA PERMOHONAN PK:

TERDAPAT BUKTI BARU (NOVUM)

Sebagaimana Pemohon PK singgung di atas, ALASAN PERTAMA permohonan PK yang Pemohon ajukan, berdasar Pasal 263 ayat (2) huruf KUHAP yang menyatakan:

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Setelah Pemohon PK menyimak dan mempelajari secara seksama putusan *A quo*, ternyata terdapat BUKTI BARU (NOVUM) yang belum pernah dipertimbangkan selama persidangan pemeriksaan perkara ini berupa : REKENING KORAN PT LIMA JAYAKARTA UTAMA (ULIMEC") TAHUN 2003 - TAHUN 2005. Adapun BUKTI BARU (NOVUM) yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali seperti yang dijelaskan berikut ini:



NOVUM PERTAMA :

DAFTAR REKENING KORAN TAHUN 2003 - TAHUN 2005

PT LIMA JAYAKARTA UTAMA ("LIMEC")

No.	Nama Dokumen	Kode Bukti	Keterangan
-----	--------------	------------	------------

REKENING KORAN TAHUN 2003

1.	Rekening koran (2003) Nomor : 120000603379202	PK-1	BNI Pesero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 91.181.590,00
2.	Rekening Koran (2003) Nomor : 120000603379203	PK-2	BNI Pesero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 101.753.063,00
3.	Rekening Koran (2003) Nomor : 120000603379204	PK-3	BNI Pesero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 173.762.941,00
4.	Rekening Koran (2003) Nomor : 120000603379206	PK-4	BNI Pesero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 101.753.063,00
5.	Rekening Koran (2003) Nomor : 120000603379207	PK-5	BNI Pesero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 171.751.798,00
6.	Rekening Koran (2003) Nomor : 120000603379208	PK-6	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp .171.439.569,00
7.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379211	PK-7	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp .64.465.903,00
8.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379212	PK-8	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp .71.835.090,00

REKENING KORAN TAHUN 2004

9.	Rekening Koran (2004) Nomor : 0009839741	PK-9	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp.1.146.874.625,00• Bunga pinjaman sebesar Rp. 49.489.125,00
10.	Rekening Koran (2004) Nomor : 0009839752	PK-10	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp.2.113.781.500,00• Bunga pinjaman sebesar Rp. 85.848.000,00
11.	Rekening Koran (2004) Nomor : 0009839763	PK-11	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp.1.289.583.875,00• Bunga pinjaman sebesar Rp. 56.115.000,00
12.	Rekening Koran (2004) Nomor : 0009839774	PK-12	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp.2.730.120.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp. 118.800.000,00
13.	Rekening Koran (2004)	PK-13	BNI Persero telah men-debet rekening LIMEC untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 120000603379202		pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 22753.125,00
14.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379203	PK-14	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 44.071.875,00
15.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379204	PK-15	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 36.342.750,00
16.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379206	PK-16	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 293.588.236,00
17.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379207	PK-17	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 33.426.178,00
18.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379208	PK-18	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 80.564.309,00
19.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379211	PK-19	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 71.536.347,00
20.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379212	PK-20	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 72.679.868,00
21.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379258	PK-21	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 112.094.134,00
22.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379259	PK-22	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 117.580.450,00
23.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379260	PK-23	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 122.784.890,00
24.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379261	PK-24	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 72.130.347,00
25.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379262	PK-25	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 65.006.449,00
26.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379263	PK-26	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 150.094.096,00
27.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379264	PK-27	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 130.285.605,00
28.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379266	PK-28	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 54.865.500,00
29.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379267	PK-29	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 101.178.000,00
30.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379268	PK-30	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran :

Hal. 160 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 61.726.500,00
31.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379269	PK-31	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 130.680.000,00
32.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379270	PK-32	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 114.543.000,00
33.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379271	PK-33	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 67.716.000,00
34.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379272	PK-34	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 58.905.000,00
35.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379273	PK-35	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 89.545.500,00
36.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379274	PK-36	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 46.332.000,00
37.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379275	PK-37	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 45.079.875,00
38.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379276	PK-38	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 54.945.000,00
39.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379277	PK-39	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 84.826.125,00
40.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379278	PK-40	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 62.062.875,00
41.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379279	PK-41	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 41.375.250,00
42.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379280	PK-42	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 82.750.500,00
43.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379281	PK-43	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 70.512.750,00
44.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379282	PK-44	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 54.403.875,00
45.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379283	PK-45	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 47.625.000,00
46.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379284	PK-46	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 40.725.000,00
47.	Rekening Koran (2004) Nomor : 120000603379285	PK-47	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 26.925.000,00
48.	Rekening Koran (2004)	PK-48	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk

Hal. 161 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 120000603379286		pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 32.1750.00,00
49.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379287	PK-49	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 46.901.876,00
50.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379288	PK-50	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 29.550.000,00
51.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379289	PK-51	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 71.718.750,00
52.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379290	PK-52	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 45.225.000,00
53.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379291	PK-53	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 34.627.500,00
54.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379292	PK-54	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 41.337.500,00
55.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379293	PK-55	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 46.575.000,00
56.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379294	PK-56	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 42.187.500,00
57.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379295	PK-57	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 38.745.000,00
58.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379296	PK-58	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 37.449.000,00
59.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379297	PK-59	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 27.132.000,00
60.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379298	PK-60	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 33.630.000,00
61.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379299	PK-61	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Bunga pinjaman sebesar Rp. 49.191.000,00

REKENING KORAN TAHUN 2005

62.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839457	PK-62	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 809.000.000,00Bunga pinjaman sebesar Rp.19.477.792.630,00
63.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839468	PK-63	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.567.000.000,00Bunga pinjaman sebesar Rp.37.727.630,00
64.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839479	PK-64	<ul style="list-style-type: none">Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.567.000.000,00Bunga pinjaman sebesar Rp.37.672.283,00
65.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839480	PK-65	<ul style="list-style-type: none">Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.256.000.000,00Bunga pinjaman sebesar Rp.35.367.528,00
66.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839491	PK-66	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">Angsuran Pokok Pinjaman sebesar

Hal. 162 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 1.065.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.29.743.326,00
67.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839504	PK-67	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 955.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.26.898.558,00
68.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839515	PK-68	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.713.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.48.248.396,00
69.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839526	PK-69	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.858.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.53.029.217,00
70.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839537	PK-70	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.534.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.43.781.930,00
71.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839548	PK-71	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.791.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.59.176.470,00
72.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839559	PK-72	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.181.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.39.021.452,00
73.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839560	PK-73	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.048.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.38.626.998,00
74.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839571	PK-74	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 909.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.25.943.797,00
75.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839582	PK-75	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.113.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.40.953.329,00
76.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839593	PK-76	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 804.000.000,00 Bunga pinjaman sebesar Rp.29.583.543,00
77.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839605	PK-77	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 935.000.000,00 Bunga pinjaman sebesar Rp.34.403.744,00
78.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839616	PK-78	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar

Hal. 163 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp 2.378.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.87.449.540,00
79.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839627	PK-79	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 2.530.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.100.671.278,00
80.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839649	PK-80	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 2.440.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.100.750.087,00
81.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839650	PK-81	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 2.218.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.99.086.086,00
82.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839832	PK-82	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.083.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.4.067.608,00
83.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839843	PK-83	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.320.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.4.961.658,00
84.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839854	PK-84	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.173.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.4.409.111,00
85.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839843	PK-85	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.491.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.13.432.166,00
86.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839843	PK-86	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 994.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.8.954.781,00
87.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839843	PK-87	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.988.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.17.909.551,00
88.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839843	PK-88	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.694.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.15.260.957,00
89.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839901	PK-89	BNI Persero telah mendebit rekening LIMEC untuk pembayaran : • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.307.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp.15.241.723,00
90.	Rekening Koran (2005)	PK-90	BNI Persero telah mendebit rekening

Hal. 164 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 0009839912		LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.270.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.14.810.244,00
91.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839923	PK-91	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.086.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.12.525.057,00
92.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839945	PK-92	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 858.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.10.005.665,00
93.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839956	PK-93	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.190.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.18.670.372,00
94.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839967	PK-94	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 788.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.12.363.242,00
95.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839978	PK-95	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 2.125.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.33.349.321,00
96.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839989	PK-96	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.340.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.24.268.029,00
97.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009839990	PK-97	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.026.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.18.581.345,00
98.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840009	PK-98	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.226.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.22.208.851,00
99.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840010	PK-99	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.380.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.24.998.540,00
100.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840021	PK-100	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.250.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.26.167.913,00
101.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840032	PK-101	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.148.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar

Hal. 165 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



			Rp.24.032.613,00
102.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840043	PK-102	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 529.879.904,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.30.117.459,00
103.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840054	PK-103	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 952.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.22.177.266,00
104.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840065	PK-104	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.180.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.28.373.622,00
105.	Rekening Koran (2005) Nomor : 0009840076	PK-105	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran : <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp 1.726.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp.41.494.804,00

Novum mengungkapkan fakta bahwa hubungan hukum antara PT. LIMA Jayakarta Utama (Limec) dengan PT. BNI (persero) Tbk berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (hukum perdata) di mana Limec sebagai Debitur (penerima pinjaman sedangkan BNI sebagai kreditur (pemberi pinjaman).

1. Bahwa Rekening Koran Tahun 2003 – 2005 atas nama PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) sebagai BUKTI BARU (Novum) mengungkapkan fakta-fakta yuridis yang tidak terbantahkan yakni :

- Hubungan hukum antara PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berada dalam ruang lingkup hukum perdata (Private Recht).
- Pemakaian kata “angsuran” dan “bunga” hanya dipakai dikenal dalam hubungan hukum perdata khususnya lembaga hukum pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga, Bab Ketiga Belas Pasal 1754 – 1769 KUHPerdata.

Ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata mengatur secara tegas bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya : “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, Badan Penerbit Alumni Bandung, halaman 302, menyatakan bahwa :

“Jadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang :

- Para pihak boleh menentukan pembayaran bunga sebagai ganti rugi (Pasal 1765 Ayat 2).



- Berapa besarnya bunga : Undang-Undang tidak memberikan pembatasan”.

2. Bahwa Rekening Koran Tahun 2003 - 2005 (BUKTI BARU/NOVUM) juga mengungkap fakta yuridis bahwa hubungan hukum antara PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah hubungan pinjam-meminjam yang dalam istilah hukum perbankan hubungan berdasarkan "Perjanjian Kredit". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan:

" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pakar hukum (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung R.I) M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya : "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Badan Penerbit Alumni Bandung, halaman 302, berpendapat bahwa :

"Pada dasarnya, pinjaman uang adalah persetujuan yang berbentuk bebas. Peminjaman uang termasuk pada persetujuan pada umumnya."

3. Bahwa dengan mengacu fakta-fakta yuridis yang terungkap berdasarkan BUKTI BARU (NOVUM) sebagaimana diuraikan di atas, maka obyek sengketa antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) lahir dari adanya Perjanjian Kredit yang bersifat hubungan keperdataan (Private Recht) dalam lingkup dan wilayah hukum perdata berupa sengketa hutang piutang atas pembayaran kewajiban yang lahir dari implementasi Asas Kebebasan Berkontrak, yang berdasarkan aturan yang ditentukan Pasal 1338 KUHPerdata sehingga Perjanjian Kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan PT. LIMEC dimaksud harus dan wajib diterapkan sebagai undang-undang yang berlaku bagi pihak yang membuatnya, atau lebih dikenal dengan asas "Vacta Sun Servanda". Asas "Vacta Sun Servanda" pada dasarnya tidak tunduk terhadap perundang-undangan formil in casu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga di



kemudian hari apabila ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada pihak harus dengan dasar-dasar mana yang telah ditentukan saat perjanjian dibuat dan disepakati.

NOVUM MENGUNGKAP FAKTA YURIDIS BAHWA PUTUSAN A QUO TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN DAN SANGAT MERUGIKAN PEMOHON PK/TERPIDANA KARENA PUTUSAN A QUO TELAH MENGABAikan KEBENARAN MATERIAL DALAM PERKARA INI DI MANA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK HUTANG SEBESAR Rp 68.770.239. 904,00 (ENAM PULUH DELAPAN MILYAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT RUPIAH) DAN BUNGA PINJAMAN SEBESAR RP.6.768.774.946,00 (ENAM MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH) OLEH PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) KEPADA KREDITUR (PT. BNI (PERSERO) TBK.) TIDAK DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN A QUO.

4. Bahwa BUKTI BARU (NOVUM) mengungkap fakta yuridis bahwa putusan a quo sama sekali mengabaikan kebenaran materiil yang seharusnya dicari dalam pemeriksaan perkara ini. Hal ini terbukti, Pemohon PK bertindak untuk dan atas nama PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) telah memenuhi kewajiban yang wajar sebagai debitur dengan melakukan pembayaran Angsuran Pokok Hutang sebesar Rp 68.770.239.904,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan bunga Rp 6.768.774.946,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) akan tetapi hal ini sama sekali tidak pernah diperhitungkan dalam putusan a quo.
5. Bahwa putusan a quo telah menghukum Pemohon PK/Terpida untuk membayar uang pengganti kerugian kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah). Akan tetapi, putusan a quo sangat mencerminkan rasa ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena besaran Uang Pengganti Kerugian tersebut



sama sekali tidak memberikan perhitungan yang jelas tentang asal muasal kerugian tersebut. Putusan *a quo* sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena ketaatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran Angsuran Pokok Hutang sebesar Rp 68.770.239.904,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan bunga Rp 6.768.774.946,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sama sekali tidak diperhitungkan dalam putusan *a quo*.

6. Bahwa apabila putusan *a quo* memperhitungkan pembayaran Angsuran Pokok Hutang yang telah dibayar PT. Lima Jayakarta Utama kepada PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp 68.770.239.904,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) maka tidak berdasar apabila putusan *a quo* menyatakan kerugian PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp 132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah). Adapun jumlah kerugian yang tersisa seharusnya hanya berjumlah sebesar Rp 63.961.760.096,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah).
7. Bahwa kalau hutang debitur (PT. Lima Jayakarta Utama) secara nyata tinggal tersisa Rp 63.961.760.096,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah) yang dalam putusan *Judex Facti* sama sekali tidak dikaji karena tidak adanya pengurangan dengan angka-angka yang sudah dibayar, maka jika saja seluruh nilai aset yang menjadi jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana terurai pada butir 2.3 halaman 73 sampai dengan butir 2.4 halaman 75 Putusan No.614/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, maka yang terjadi adalah "collateral" jaminan) secara direncanakan dicaplok, dikuasai secara melawan hukum oleh Kreditur dalam hal ini Bank, yang nilainya melebihi hutang tersisa di atas.
8. Bahwa taksasi nilai jaminan (collateral) yang telah diserahkan kepada PT. BNI (Persero) Tbk jauh melebihi sisa tunggakan kredit yang harus dilunasi oleh debitur (PT. Lima Jayakarta Utama), hal ini dapat dibuktikan dari total pembebanan hak tanggungan termasuk jaminan fidusia yaitu sebesar Rp 191.138.702.565,00 (seratus sembilan puluh satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisa kewajiban (hutang tertunggak) hanya tinggal sebesar Rp 63.961.760. 096,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah). Apabila dilaksanakan eksekusi jaminan baik melalui lelang maupun penjualan yang dilakukan sendiri, maka dapat dipastikan bahwa seluruh sisa kewajiban akan dapat lunas, sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh PT. BNI (Persero) Tbk.

NOVUM KEDUA :

SURAT PT. BNI (PERSERO) TBK DIVISI KORPORASI No.KPI/7/0211/R PERIHAL PENYELESAIAN PINJAMAN PT. LIMA JAYAKARTA NOVUM INI MENGUNGKAP FAKTA BAHWA SENGKETA HUKUM ANTARA PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) DENGAN PT.BNI (PERSERO) TBK. ADALAH MASALAH KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN) YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN OLEH PT.LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) SEHINGGA SENGKETA HARUS DISELESAIKAN MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HUTANG YANG DIATUR MENURUT HUKUM PERDATA.

9. Bahwa BUKTI BARU (NOVUM KEDUA) mengungkap fakta yuridis, bahwa sebelum fasilitas kredit PT. Lima Jayakarta Utama (Debitur) di luar perkiraan ternyata bermasalah, untuk mengantisipasi hal itu sebenarnya sudah ada niat baik dan berbagai upaya yang dilakukan oleh Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT. BNI (Persero) Tbk. Bukti dari hal tersebut adalah Surat PT. BNI (Persero) Tbk – Divisi Korporasi Nomor KPI/7/0211/R tertanggal 6 Februari 2006, perihal : Penyelesaian Pinjaman Saudara (“SURAT BNI”). Surat BNI dikirim kepada Debitur untuk menanggapi surat Debitur (PT. Lima Jayakarta Utama) Nomor 002/LIMEC/MPS/I/2006 tertanggal 26 Januari 2006, perihal : Penyelesaian Pinjaman Jatuh Tempo dan Tunggakan Bunga (“SURAT LIMEC”).
10. Bahwa Debitur (PT. Lima Jayakarta Utama) menunjukkan itikad baik dengan menawarkan beberapa alternatif jalan keluar ke PT. BNI (Persero) Tbk agar masalah hutang yang tertunggak dapat diselesaikan dengan metode apa saja yang baik menurut pendapat pihak PT. BNI (Persero) Tbk sebagaimana terbukti dari SURAT LIMEC angka 6. Adapun alternatif yang ditawarkan oleh Debitur antara lain : Pemberian Keringanan Bunga, *rescheduling* jangka waktu pinjaman, penyertaan bank (*equity participation*), penyelesaian pinjaman dengan cara penjualan agunan.

Hal. 170 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk telah memberi jawaban atas SURAT LIMEC sebagaimana terbukti melalui SURAT BNI. PT. BNI (Persero) Tbk telah menyatakan bersedia membuka dialog untuk membicarakan upaya langkah-langkah konkrit guna penyelesaian pinjaman dari Debitur (PT. Lima Jayakarta Utama), hal tersebut tertuang dalam angka 3 huruf b SURAT BNI yang berbunyi : "Kehadiran Saudara di Kantor kami guna membicarakan upaya langkah-langkah konkrit penyelesaian pinjaman saudara. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterima Saudara tidak hadir maka kami menilai Saudara tidak kooperatif, dan tidak beritikad baik, untuk itu kami akan segera melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku."

Bahwa upaya hukum yang dimaksudkan PT. BNI (Persero) Tbk di sini menurut hukum haruslah mengacu pada langkah-langkah konkrit penyelesaian pinjaman menurut Hukum Perikatan.

12. Bahwa dalam kenyataan upaya hukum yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian atas kredit bermasalah (*non performing loan*) yang dialami oleh Debitur (PT. Lima Jayakarta Utama) tidak sesuai ketentuan yang berlaku yakni metode penyelesaian kredit macet dengan mengeksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Akan tetapi PT. BNI (Persero) Tbk justru menempuh jalur hukum pidana dalam penyelesaian masalah kredit macet dengan cara melaporkan Pemohon PK kepada pihak Kepolisian R.I. dengan tuduhan bahwa pemohon PK melakukan tindak pidana korupsi. Fakta ini menunjukkan bahwa PT. BNI (Persero) Tbk telah melakukan perbuatan semena-mena (*widlekeur*) bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian pinjam-meminjam yang tertuang dalam Akte-Akte Pinjaman Notariel.

NOVUM KEDUA MENGUNGKAP FAKTA YURIDIS BAHWA PT. BNI (PERSERO) TBK TIDAK MENGALAMI KERUGIAN KARENA NILAI JAMINAN HUTANG DARI PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) MELEBIHI JUMLAH HUTANG TERTUNGGAK.

13. Bahwa di samping fakta yuridis tersebut di atas, Bukti Baru (Novum Kedua) juga mengungkap fakta : tidak dipertimbangkannya secara cermat tentang kebenaran materiel atas suatu pertanyaan faktual : Berapa sebenarnya jumlah hutang yang nyata-nyata belum dibayar (tertunggak) oleh PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) kepada PT. BNI (Persero) Tbk ? membaca secara seksama putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sama sekali tidak mendasarkan putusannya pada kebenaran materiel yang



sesungguhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dari isi surat BNI pada angka 2 (dua) yang secara tegas menyatakan bahwa jumlah hutang PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) yang masih tertunggak pertanggal 6 Februari 2006 adalah sebesar Rp 110.800.000.000,00 (seratus sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah). Fakta ini jelas sangat bertentangan dengan amar putusan *a quo* yang menghukum Pemohon PK untuk membayar kerugian PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp 132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

ALASAN KEDUA PERMOHONAN PK:

PUTUSAN A QUO SALAH MENERAPKAN HUKUM

Selanjutnya, setelah Pemohon PK menyimak dan menghayati dengan seksama putusan *a quo*, ternyata di dalamnya terdapat dan melekat berupa KESALAHAN PENERAPAN atau KEKHILAFAN/KEKELIRUAN NYATA dari *Judex facti* dan *Judex Juris* sebagai berikut :

I. STATUS HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK ADALAH BADAN HUKUM PERDATA BERBENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) SEHINGGA HUKUM YANG BERLAKU DALAM PENGELOLAANNYA TUNDUK KEPADA HUKUM PERDATA.

1. Bahwa PT.BNI (Persero), Tbk adalah badan hukum yang berstatus badan hukum perdata (Perusahaan Perseroan) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah R.I. No.19 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (LNRI Tahun 1992 Nomor 39), sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 yang berbunyi:

(1) Bank Negara Indonesia 1946 yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972."

(2) Dengan disesuaikan bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Negara Indonesia 1946 dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Negara Indonesia 1946 yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan”.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 1999 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara R.I Ke Dalam Perusahaan Perseroan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum (LNRI Tahun 1992 Nomor 102), Negara melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi:

“ Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Negara Indonesia Tbk., yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1992, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1998.”

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
- (2) Nilai Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud Ayat (1), masing-masing adalah :
 1. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk., paling banyak sebesar Rp.52.800.000.000.000,00 (lima puluh dua triliun delapan ratus miliar rupiah);
 2. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., paling banyak sebesar Rp.31.600.000.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus miliar rupiah);
 3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk., paling banyak sebesar Rp.11.200.000.000.000,00 (sebelas triliun dua ratus miliar rupiah);

Hal. 173 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk paling banyak sebesar Rp.137.800.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah);

3. Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bentuknya Perseroan Terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

Pasal 1 angka 1 berbunyi : "Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan."

Pasal 1 angka 2 berbunyi : "Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa terhadap Perusahaan harus tunduk dan berlaku terhadapnya prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas, hal mana dipertegas Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., dalam bukunya: "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 93, yaitu :

"Dalam hal pendirian perseroan terbatas, pemerintah tidak berlindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola perseroan. Hal demikian disebabkan keikutsertaan pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai badan hukum privat, sehingga tanggung jawab pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik."

II. STATUS KEUANGAN PT. BNI (PERSERO) TBK BUKAN KEUANGAN NEGARA OLEH KARENA ITU KERUGIAN PT. BNI (PERSERO) TBK BUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.



5. Bahwa PT. Lima Jayakarta Utama memang mempunyai hutang pada PT. BNI (Persero) Tbk, selaku perseroan yang berdiri sendiri dan bukan kepada Negara. Dalam status Negara telah menyertakan modalnya kepada BNI Persero, maka secara otomatis Negara telah melakukan tindakan hukum perdata (*privat rechtsgebied*), di sini terjadi transformasi hukum yaitu dari hukum publik menjadi hukum privat. Artinya bahwa status uang Negara, berupa saham/modal milik Negara yang pada perseroan (BNI Persero) bukan lagi uang milik Negara, melainkan menjadi milik perseroan.
6. Bahwa dengan adanya transformasi hukum dari status yuridis keuangan publik menjadi status yuridis keuangan privat, maka kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN / APBD bukan lagi merupakan keuangan Negara melainkan keuangan persero (BNI Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf 9 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Begitu pula dengan hutang BUMN (yang berbentuk persero) bukan lagi termasuk piutang Negara, melainkan merupakan keuangan/piutang BUMN in casu BNI persero di mana pengurusannya dilakukan oleh BNI Persero sendiri dalam hal ini Direksi BNI Persero sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 :

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang - undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, kuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran. "

Pasal 11 :

"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. "

Bahwa dengan demikian jelas bahwa sejak dikeluarkannya Undang-Undang BUMN, pengurusan peserta termasuk tetapi tidak terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. BNI (Persero) Tbk (BUMN) diserahkan sepenuhnya kepada Direksi termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan piutang, maka hutang PT. Lima Jayakarta Utama kepada PT. BNI (Persero) Tbk bukanlah hutang kepada Negara. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Mahkamah Agung R.I. No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 angka 4 dan 5 ("Fatwa MA") yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4 :

Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang "badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, Yayasan perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang yang sama mewajibkan instansi-instansi Pemerintah dan badan-badan Negara bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960."

Angka 5 :

"Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi :

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :

g. Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan

Hal. 176 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah", yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai, "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;"

7. Bahwa Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. juga menegaskan dalam bukunya "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 93 (vide Bukti P-14) yaitu :

"Dalam hal pendirian perseroan terbatas, pemerintah tidak bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola perseroan. Hal demikian disebabkan 'keikutsertaan pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai badan hukum privat, sehingga tanggung jawab pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai "Badan hukum publik."

III. PERBUATAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI BUKAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEHINGGA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK DAPAT DIADILI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 Jo UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

8. Bahwa ketika Negara telah menyertakan modalnya kepada BNI Persero maka pertanggungjawaban atas keuangan / asset / hutang / piutang tunduk pada hukum privat (perdata), bukan lagi hukum publik (pidana). Di sini terjadi transformasi hukum yaitu dari hukum publik menjadi hukum privat. Artinya bahwa status uang Negara, berupa saham / modal milik Negara yang ada pada perseroan (BNI Persero) bukan lagi uang milik Negara, melainkan menjadi milik perseroan, sehingga apabila BNI Persero mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian Negara melainkan kerugian yang diderita BNI Persero, oleh sebab itu mempertanggungjawaban atas keuangan / asset / hutang / piutang BNI Persero adalah kepada para pemegang saham bukan kepada Negara.
9. Bahwa oleh karenanya terhadap permasalahan kredit Pemohon PK kepada BNI Persero, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No, 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jo Pasal 97 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebenarnya Direksi PT. BNI Persero Tbk sendiri yang melakukan pengurusan hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui jalur hukum perdata bukan ditempuh melalui jalur hukum pidana,



alasannya karena status uang / asset / utang / piutang PT. BNI Persero Tbk merupakan keuangan Negara, sehingga tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum bila penyelesaian masalah tagihan/piutang PT.BNI Persero Tbk ditempuh dengan jalur hukum mana sebagaimana halnya yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri sudah menjadi Terpidana akibat masalah hukum yang timbul dari hukum perdata (privat).

10. Bahwa putusan *a quo* salah kaprah karena hanya terfokus pada kerugian keuangan Negara tanpa meneliti, mencermati dan melihat proses kejadian yang sebenarnya tentang Perjanjian Kredit antara PT. Lima Jayakarta Utama (LIMEC) dengan PT. BNI (Persero) Tbk, yang mulai dari :

- Keharusan untuk melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran laporan keuangan, melakukan verifikasi terhadap kantor akuntan publik dan appraisal yang membuat laporan keuangan, melakukan kunjungan kepada Calon Debitur atau pihak ketiga dalam rangka konfirmasi atas syarat-syarat kredit yang diajukan, melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study dan melakukan penilaian kewajaran keuangan dan appraisal yang melakukan taksiran jaminan.
- Bahwa keharusan tersebut adalah merupakan tugas dari pihak PT. BNI (Persero) Tbk dan pihak PT. BNI (persero) Tbk sendiri justru telah melupakan dengan tidak dilakukannya tugas tersebut terutama oleh Divisi-Divisi yang memiliki tugas dan wewenang tersebut.
- Dengan tidak dilakukannya tugas sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) Bidang Perkreditan yang ada maka didapat temuan adanya indikasi tindak pidana perbankan sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:
"tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)".

12. Bahwa mengacu fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, maka hakekatnya perbuatan Pemohon Paninjauan Kembali / Terpidana bukan



perbuatan dapat dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KESIMPULAN DAN PERMINTAAN

Bertitik tolak dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip dan fakta-fakta yuridis Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon PK dapat mengajukan

Kesimpulan berikut :

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) DENGAN PT. BNI (PERSERO) TBK BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM (HUKUM PERDATA) DI MANA LIMEC SEBAGAI DEBITUR (PENERIMA PINJAMAN) SEDANGKAN BNI SEBAGAI KREDITUR (PEMBERI PINJAMAN).
2. PUTUSAN A QUO TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN DAN SANGAT MERUGIKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERPIDANA KARENA PUTUSAN A QUO TELAH MENGABAIKAN KEBENARAN MATERIAL DALAM PERKARA INI DI MANA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK HUTANG SEBESAR RP.68.770.239.904,00 (ENAM PULUH DELAPAN MILYAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN SERATUS EMPAT RUPIAH) DAN BUNGA PINJAMAN SEBESAR Rp.6.768.774.946,00 (ENAM MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH) OLEH PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) KEPADA KREDITUR (PT. BNI (PERSERO) TBK.) TIDAK PERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN A QUO.
3. SENGKETA HUKUM ANTARA PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) DENGAN PT. BNI (PERSERO)' TBK ADALAH MASALAH KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN) YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN OLEH PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA (LIMEC) SEHINGGA SENGKETA HARUS DISELESAIKAN MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HUTANG SEBAGAIMANA DIATUR MENURUT HUKUM PERDATA.



4. STATUS HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK ADALAH BADAN HUKUM PERDATA BERBENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) SEHINGGA HUKUM YANG BERLAKU DALAM PENGELOLAANNYA TUNDUK KEPADA HUKUM PERDATA.
5. STATUS KEUANGAN PT. BNI (PERSERO) TBK BUKAN KEUANGAN NEGARA OLEH KARENA ITU KERUGIAN PT. BNI (PERSERO) TBK BUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.
6. PERBUATAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI BUKAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEHINGGA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK DAPAT DIADILI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 Jo UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No.614 / Pid.B / 2010 / PN.JKT.PST jo putusan No.373 / Pid / 2010 / PT.DKI jo putusan Mahkamah Agung No.538 K / Pid.Sus / 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Lima Jayakarta Utama (PT. Limec) dalam tambahan permohonan kredit sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2005 mengalami kredit macet tidak membayar hutangnya.
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan penyimpangan-penyimpangan yaitu dokumen-dokumen yang diajukan adalah tidak benar dan perusahaan tersebut sebenarnya tidak ada alias fiktif, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima kucuran dana dari BNI karena kedekatannya dengan Gama Komaruddin telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 133.837.000.000,00 sehingga perbuatan Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK. I sampai dengan PK.105 tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai Novum ;
- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **TJULANG STEFANUS YAWOGA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 22 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,** Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal. 181 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 182 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 183 dari 182 hal. Put. No. 229 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183